



**PREFERENSI IBU RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO TERHADAP DINAMIKA PENDAPATAN: STUDI
EKONOMI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Oleh:

LUCIK
NIM. 120820201012

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**PREFERENSI IBU RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO TERHADAP DINAMIKA PENDAPATAN: STUDI
EKONOMI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

Housewife's Preference on Micro Financial Institution Towards The Dynamics of
Income: A Study of Household Economic in Sumbersari District,
Regency of Jember

TESIS

Oleh:

LUCIK
NIM. 120820201012

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**PREFERENSI IBU RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO TERHADAP DINAMIKA PENDAPATAN: STUDI
EKONOMI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

Housewife's Preference on Micro Financial Institution Towards The Dynamics of
Income: A Study of Household Economic in Sumbersari District,
Regency of Jember

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Ekonomi
dan mencapai gelar Magister Ilmu Ekonomi

Oleh:

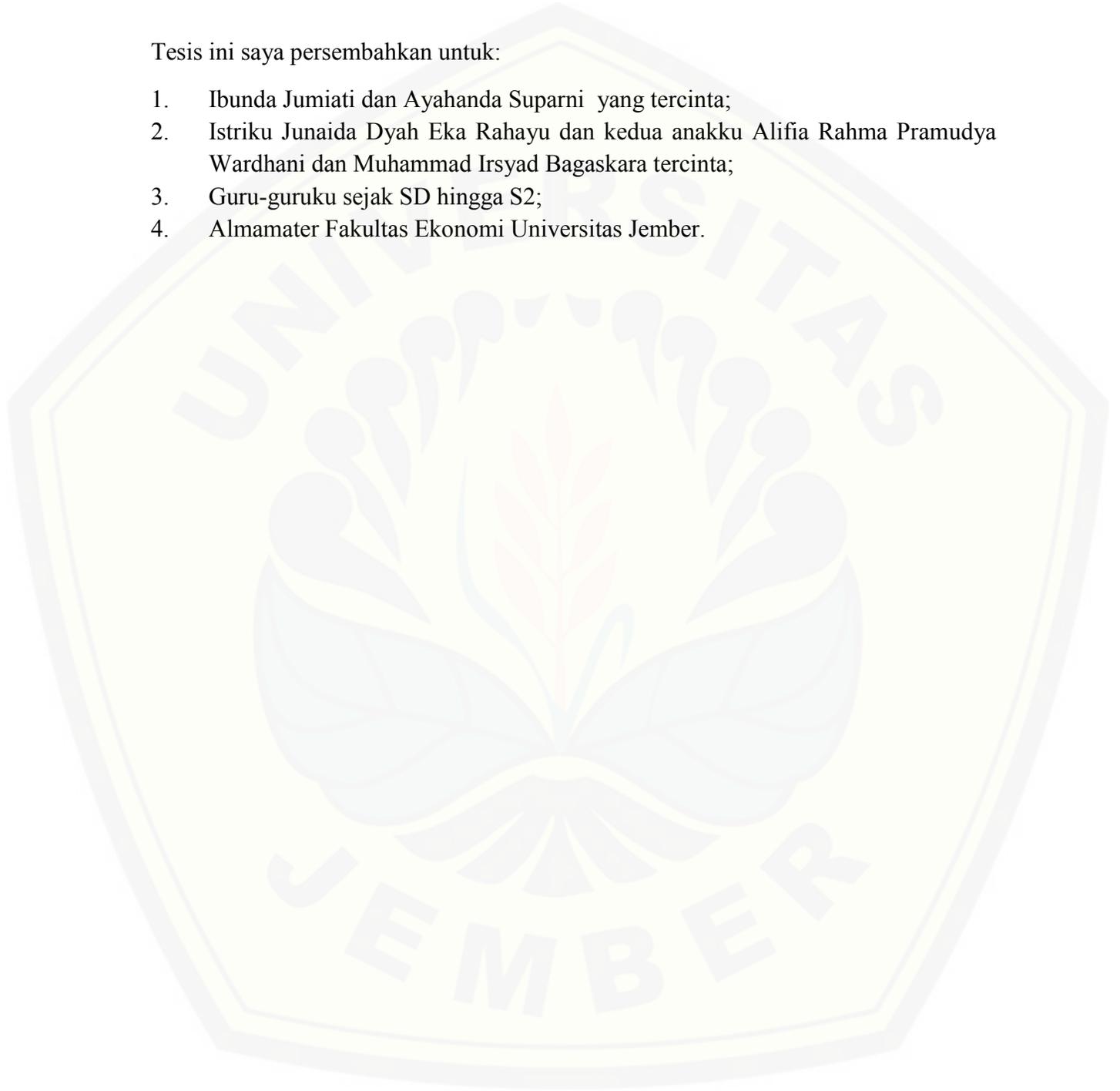
LUCIK
NIM. 120820201012

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Jumiati dan Ayahanda Suparni yang tercinta;
2. Istriku Junaida Dyah Eka Rahayu dan kedua anakku Alifia Rahma Pramudya Wardhani dan Muhammad Irsyad Bagaskara tercinta;
3. Guru-guruku sejak SD hingga S2;
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.



MOTTO

Untuk menjadi manusia unggul, jiwa manusia harus keluar dari tempat tinggal dan lingkungannya, ke tempat yang lebih tinggi dan agung.

Kita dibentuk oleh sesuatu yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan bukanlah hasil dari satu tindakan, melainkan dari kebiasaan.

Nietzsche, Friedrich. 2003. *Sabda Zarathustra (Terjemahan, Judul Asli: Also Sprach Zarathustra)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aristoteles dalam Palomeres, S. 2004. *Langitkan dirimu: kata kata hebat pembangkit semangat!!! (Terjemahan, Judul Asli: No Limits But The Sky: Inspiration for Teachers, Counselors an Kids)*. Bandung: Read!

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lucik

NIM : 120820201012

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: "Preferensi Ibu Rumah Tangga pada Lembaga Keuangan Mikro terhadap Dinamika Pendapatan: Studi Ekonomi Rumah Tangga di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Desember 2014

Yang menyatakan,

Lucik
NIM 120820201012

TESIS

**PREFERENSI IBU RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO TERHADAP DINAMIKA PENDAPATAN: STUDI
EKONOMI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

Oleh
Lucik
NIM 120820201012

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Adhitya Wardhono, SE., M.Sc., Ph.D
Dosen Pembimbing II : Dr. Siswoyo Hari Santoso, SE.,M.Si

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Preferensi Ibu Rumah Tangga pada Lembaga Keuangan Mikro terhadap Dinamika Pendapatan: Studi Ekonomi Rumah Tangga di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
Nama Mahasiswa : Lucik
NIM : 120820201012
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi
Tanggal Persetujuan : 29 Desember 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Adhitya Wardhono, SE., M.Sc., Ph.D
NIP. 19710905 199802 1 001

Dr. Siswoyo Hari Santoso, SE., M.Si
NIP. 19680715 199303 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi

Dr. Siti Komariyah, SE., M.Si
NIP. 19710610 200112 2 002

PENGESAHAN

Judul Tesis

PREFERENSI IBU RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO TERHADAP DINAMIKA PENDAPATAN: STUDI
EKONOMI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lucik

NIM : 120820201012

Jurusan : Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

29 Desember 2014

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Magister Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. H. Sarwedi, MM.
NIP. 19531015 198303 1 001 (.....)
2. Penguji I : Prof. Dr. M. Saleh, M.Sc
NIP. 19560831 198403 1 002 (.....)
3. Penguji II : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si
NIP. 19600412 198702 1 001 (.....)
4. Penguji III : Adhitya Wardhono, SE., M.Sc., Ph.D (.....)
NIP. 19710905 199802 1 001
5. Penguji IV : Dr. Siswoyo Hari Santoso, SE.,M.Si
NIP. 19680715 199303 1 001 (.....)

Foto 4 X 6
warna

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 1 199002 1 001

Housewife's Preference on Micro Financial Institution Towards The Dynamics of Income: A Study of Household Economic in Summersari Distric, Regency of Jember

Lucik

Abstract

Existing household economic evidently lead to increasing productive economic activity on household scale. It was also followed by a growing number of microfinance institutions that provide loans for capital. The number of financial institutions that ultimately forced the housewife to choose which financial institutions will be in their favor. The purpose of this study was to determine benchmark housewife preferences and patterns of institutional microfinance institutions in Jember and able to analyze the effect of preference for household income in Jember. Research on preference housewife on microfinance institutions to the dynamics of income in Jember is a qualitative research which used primary data, housewives with small business and the user of microfinance institutions. The design of analysis used by the *Interpretative Phenomenological Analysis* through six stages of analysis, 1) *Reading and re-reading*; 2) *Initial noting*; 3) *Developing Emergent themes*; 4) *Searching for connections across emergent themes*; 5) *Moving the next cases*; and 6) *Looking for patterns across cases*. The result of this research shows that the dynamics of increasing household income through productive activities increasingly forced housewife doing preference decision to choose a financial institution to fulfill the working capital. These options arise with the support of many financial institutions that exist in this area study. So that, there is competition from increasingly easy administration system, and declining of interest also getting good in service. Under the changes in the administrative system, it decrease the interest rate to better service, then there was a change in the institutional financial institutions that exist in the area study. The option provides flexibility for the housewife to get more better to access in credit. This Housewives decision is also not without results. From this study explained that there are differences in their prosperity before and after carry on the credit in order to begin or increase their business. The conclusion from this study confirms that they recognize the benefits of the presence of financial institutions with varying excellence.

Keywords: Household Economic, Preference, Micro Financial Institution, Dynamic Income.

RINGKASAN

Preferensi Ibu Rumah Tangga Pada Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Dinamika Pendapatan: Studi Ekonomi Rumah Tangga di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember; Lucik, 120820201012; 2014; 157 halaman; Jurusan Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Aktivitas rumah tangga yang didominasi oleh perempuan yang dalam hal ini ibu rumah tangga sebagai penunjang peningkatan pendapatan, menjadi hal yang penting di Indonesia. Fenomena ini semakin masif terlihat pada struktur keluarga pada level menengah ke bawah. Dinamika peningkatan pendapatan rumah tangga melalui aktivitas produktif itu semakin memaksa ibu rumah tangga melakukan preferensi pengambilan keputusan untuk memilih lembaga keuangan guna memenuhi modal kerja. Sempitnya pengetahuan terhadap lembaga keuangan mikro menjadi pilihan ibu rumah tangga memiliki kecenderungan melakukan pinjaman pada lembaga keuangan mikro yang relatif terjangkau secara mudah meskipun dengan bunga tidak murah. Hal ini menjadi peluang baru bagi lembaga keuangan mikro yang ada dimasyarakat, seperti koperasi, BPR dan juga lembaga keuangan (LKM) yang lain yang menawarkan kredit tanpa agunan dengan pembayaran secara berkala setiap hari.

Tidak hanya dengan fasilitas keuangan yang seperti itu, pemerintah daerah Jember telah memiliki kebijakan untuk mendirikan Bank Gakin di semua lingkungan atau dusun di seluruh Jember. Tujuannya adalah supaya sistem keuangan inklusif bisa merata dan bisa diakses oleh masyarakat kalangan bawah. Sampai saat ini jumlah Bank Gakin di Jember sudah mencapai 433 kantor cabang, dengan anggota para ibu rumah tangga sejumlah 29.169 orang dengan omset pinjaman sebesar Rp 40.546.123.260. Jumlah yang sangat besar untuk pemberdayaan masyarakat miskin di

Jember. Sementara itu di Kecamatan Sumbersari sendiri ada 30 kantor cabang Bank Gakin dengan anggota 3.753 pengusaha perempuan.

Selain Bank Gakin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan juga memberikan fasilitas kredit kepada anggota kelompok yang disebut dengan pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Dari LKM inilah maka akan menyaring masyarakat dengan kategorisasi tertentu yang akan dijadikan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan muncul dan berkembangnya banyak lembaga keuangan mikro ini, maka seharusnya ada banyak pilihan dari para kaum ibu untuk menggunakan jasa keuangan. Namun demikian, akan terjadi juga hubungan yang selaras dengan lembaga keuangan yang ada, bahwa dengan banyaknya kaum ibu yang semakin produktif, maka akan mempengaruhi kelembagaan lembaga keuangan yang ada.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, fokus group diskusi, observasi partisipatoris dan dokumentasi dengan *snowballing sample* sehingga diperoleh 14 informan. Kegiatan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah data, menata dan menemukan apa yang bermakna sesuai dengan focus penelitian yaitu tentang preferensi perempuan pada LKM terhadap dinamika pendapatan rumah tangga di kecamatan Sumbersari.

Penelitian ini juga mengungkap secara mendalam tentang preferensi perempuan dan perubahan pola kelembagaan pada Lembaga Keuangan Mikro sehingga menimbulkan dinamika pendapatan rumah tangga. Perbandingan kesejahteraan sebelum dan sesudah ikut LKM menjadi sangat penting untuk diketahui hasilnya, karena itu akan menjadi data bahwa ada pengaruh atau tidak ada pengaruhnya ikut LKM. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konstruksi model baru dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dapat terpecahkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola kelembagaan yang didorong oleh minat wirausaha para kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga ternyata telah membuat lembaga keuangan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada perubahan paradigma, jika dahulu masyarakat saja yang butuh lembaga keuangan, maka saat ini keduanya saling membutuhkan. Hal ini menjadikan interaksi timbal balik yang menarik antara ibu rumah tangga yang berwirausaha dengan lembaga keuangan, sehingga terjadi pola kelembagaan baru. Adanya pola kelembagaan lama dan pola kelembagaan baru pada lembaga keuangan formal seperti perbankan dan koperasi, adalah penjelmaan dari adaptasi pihak perbankan terhadap kondisi terkini.

Atas temuan dilapangan tersebut, maka peneliti mengkategorikan perubahan pola kelembagaan yang terjadi dalam kelembagaan rumah tangga maupun kelembagaan lembaga keuangan merupakan pola dinamis. Dimana dalam faktanya perubahan pola itu adalah hasil penyesuaian diri atas lingkungan yang terlebih dahulu mengalami interaksi menuju kearah yang lebih baik. Jika digambarkan maka, perubahan pola kelembagaan rumah tangga mendorong perubahan pola kelembagaan pada lembaga keuangan. Dan pola kelembagaan lembaga keuangan akan mendorong terjadinya keberhasilan berwirausaha. Sedangkan keberhasilan berwirausaha akan kembali mendorong perubahan pola kelembagaan rumah tangga dan lembaga keuangan.

Dinamika yang terjadi ada yang merasa lebih baik setelah mendapatkan tambahan modal, namun juga ada yang lebih buruk pasca mendapatkan tambahan modal tersebut. Kelembagaan dari lembaga keuangan mikro yang ada sangat mempengaruhi mereka untuk menjadi untung atau merugi atau bahkan cuma impas. Sistem kredit dengan bunga besar, banyak dikeluhkan oleh ibu rumah tangga itu, meskipun pelayanannya baik seperti tanpa agunan dan pencairan secara cepat. Sedangkan pola kelembagaan yang diprogramkan oleh pemerintah seperti Bank

Gakin masih belum bisa memberikan modal besar, dan terbatas pada orang-orang tertentu saja.

Atas temuan itulah, peneliti memberikan rekomendasi yang menjadi pola baru dalam penataan kelembagaan yang ada. Preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro harus memperhatikan tiga kelembagaan yaitu kelembagaan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kelembagaan keluarga karena ibu rumah tangga adalah bagian dari keluarga dan kelembagaan lembaga keuangan mikro yang melahirkan sistem keuangan inklusif. Sedangkan saat ini, yang menjadi masalah adalah tumpuan masyarakat atau ibu rumah tangga atas minimnya akses terhadap lembaga keuangan.

Dua hal itu ternyata harus memaksa adanya transformasi individu dan kelembagaan guna menyikapi persoalan penataan tiga kelembagaan yang ada tersebut. Sedangkan minimnya akses keuangan harus diselesaikan dengan transformasi lembaga keuangan menjadi lembaga yang inklusif sehingga akan berdampak pada akses terhadap keuangan oleh masyarakat menjadi terbuka. Jika akses ini terbuka dan transformasi individu serta kelembagaan terlaksana maka akan membentuk kesejahteraan rumah tangga, terciptanya pemerintah yang handal dan terjadinya sistem keuangan yang baik, inklusif dengan pelayanan prima. Ketiga unsur itu akan saling berhubungan, yang pada akhirnya akses sistem keuangan menjadi lebih tertata dengan baik, dan banyak memberikan alternatif pilihan untuk memajukan sektor produktif.

SUMMARY

Housewife's Preferences On Microfinance Institution Towards The Dynamics of Income: A Study of Household Economic in Summersari District, Regency of Jember; Lucik, 120820201012; 2014; 157 pages; Graduate Program, Faculty of Economics, The University of Jember.

Household activities dominated by women, who in this case housewives as supporting increased income, becomes important in Indonesia. This phenomenon is more massive seen at the family structure in the lower middle level. The dynamics of increasing household income through productive activity was increasingly forced housewife doing preference decision to choose a financial institution to meet the working capital. The narrow knowledge of the microfinance institutions brings the housewives make loans to microfinance institutions that are relatively affordable and easy although the interest is not cheap. It becomes a new opportunity for microfinance institutions that exist in the community, such as cooperatives, rural banks and also LKMM and others who offer unsecured loans with regular payments everyday.

This research carried out in the district of Jember, Summersari, with a qualitative approach. Source of data in this study is using primary and secondary data sources. The data collection method used is the in-depth interviews, focus group discussions, observation partisipatoris and documentation with snowballing sample thus obtained 14 informants. The analysis of this research is done by analyzing, arranging data, and finding the answer that focus on woman's preference on LKM towards household dynamic income in Summersari, Jember.

The results showed that the changes in the institutional pattern driven by entrepreneurial interests of women, especially housewives turned out to have made financial institutions adjust to the environment. There is a paradigm change, if in the

past, only people who need financial institutions, then this time both need each other. It makes an interesting reciprocal interaction between entrepreneurship housewife with financial institutions and build a new institutional patterns. Old institutional pattern and new institutional patterns of formal financial institutions such as a banking and cooperative, is the embodiment of the banking adaptation to current conditions.

Based on the findings above, the researcher categorizes patterns of institutional changes that occur in institutional households and institutional financial institutions is a dynamic pattern. Where, in fact, the changes pattern in this case is the result of adjustment from the previous environment that experience interaction towards a better circumstances. If it is described, the changes pattern of domestic institutional encourage institutional change in the pattern of financial institutions. And patterns of institutional financial will encourage entrepreneurial success. While the success of entrepreneurship will encourage institutional change in the pattern of households and financial institutions.

The dynamics that occur are some people feel better after getting additional capital, but others feel worse after getting additional capital. Institutional of existing microfinance institutions affect them to be profit or loss or even just impasse. Credit system with great interest, many housewives complained that, although the services are good as unsecured and quick disbursement. While the pattern programmed by government institutions such as Bank of Gakin (a bank for the poor) still not able to provide a large capital, and limited to certain people.

Based on those findings, the researchers provide recommendations into a new pattern in the arrangement of the existing institution. The housewife preferences on microfinance institutions should consider three institutions, they are government institutions as policy makers, institutional family as housewives are part of the family and institutional microfinance institutions that build an inclusive financial system. While today, the problem is the support of society or a housewife on the lack of access to financial institutions. From these two things, there must be a transformation

of individual and institutional arrangements to address the matter of these three institutions. While the lack of finance access must be completed by transforming the financial institution into an inclusive institution that will impact finance access to society becomes open. If the access is open and the transformation of the individual as well as institutional done, it forms household welfare, creates a reliable government and good financial system, inclusive with excellent service. These three elements will be interconnected, which in turn access of the financial system becomes more well-organized, and provide many alternative options for advancing the productive sector.

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Preferensi Perempuan Pada Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Dinamika Pendapatan: Studi Kasus pada Ekonomi Rumah Tangga di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Ekonomi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Adhitya Wardhono, S.E., M.Sc., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama saya dalam pembuatan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusannya beliau telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dan membimbing saya dalam penyusunan tesis ini. Beliau adalah malaikat tak bersayap yang hinggap dalam kehidupan saya dan keluarga saya;
2. Bapak Dr. Siswoyo Hari Santoso, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota, atas kesabaran dan dorongan serta motivasi yang diberikan kepada saya untuk segera menyelesaikan penyusunan tesis ini;
3. Ibu Dr. Siti Komariah, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik saya serta selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, atas kebijakan-kebijakannya mengingatkan agar saya dapat menyelesaikan studi pada waktunya;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta staff adukatif dan staff administratif;

5. Seluruh Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmunya kepada saya;
6. Orang tuaku Ibunda Jumiati dan Ayahanda Suparni serta Adikku Susanto dan semua anggota keluarga besar di Blitar yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral. Beserta keluarga Kasiyan Timur, Ibu Mertua dan Ayah mertua serta Rizal Ahmad Ramadhan, yang ikut mencurahkan perhatiannya;
7. Istriku yang tercinta Junaida Dyah Eka Rahayu dan anak-anakku yang tersayang Alifia Rahma Pramudya Wardhani dan Muhammad Irsyad Bagaskara yang selalu memberi energi pada saat saya sedang jenuh dalam perkuliahan dan penulisan tesis ini. Maafkan ayahmu karena selama ayahmu mengerjakan tesis ini engkau kurang merasakan kasih sayang dari ayah. Ayahmu berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi dan secepatnya menjemputmu dari pelukan kakek dan nenekmu yang selama ini merawatmu;
8. Rekan-rekan satu angkatan (Moises, Billy, Hadi Naim, Mashudi, Andre, Oyong, Huda, Randy, Herlin, Ria, Dyah) terimakasih atas diskusi dan suasana kuliah yang indah dan tak terlupakan;
9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini (M. Nur Purnama Sidi, Azdkiyak, Hadi Makmur, Ulung Tranggana, Deni Wijaya, Heri Kristanto, Imam Sunarto, Miftah, Taufik dan semua sahabat seperjuangan di posko BP dan Sahabat Buku Liberti).

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jember, 29 Desember 2014

Lucik

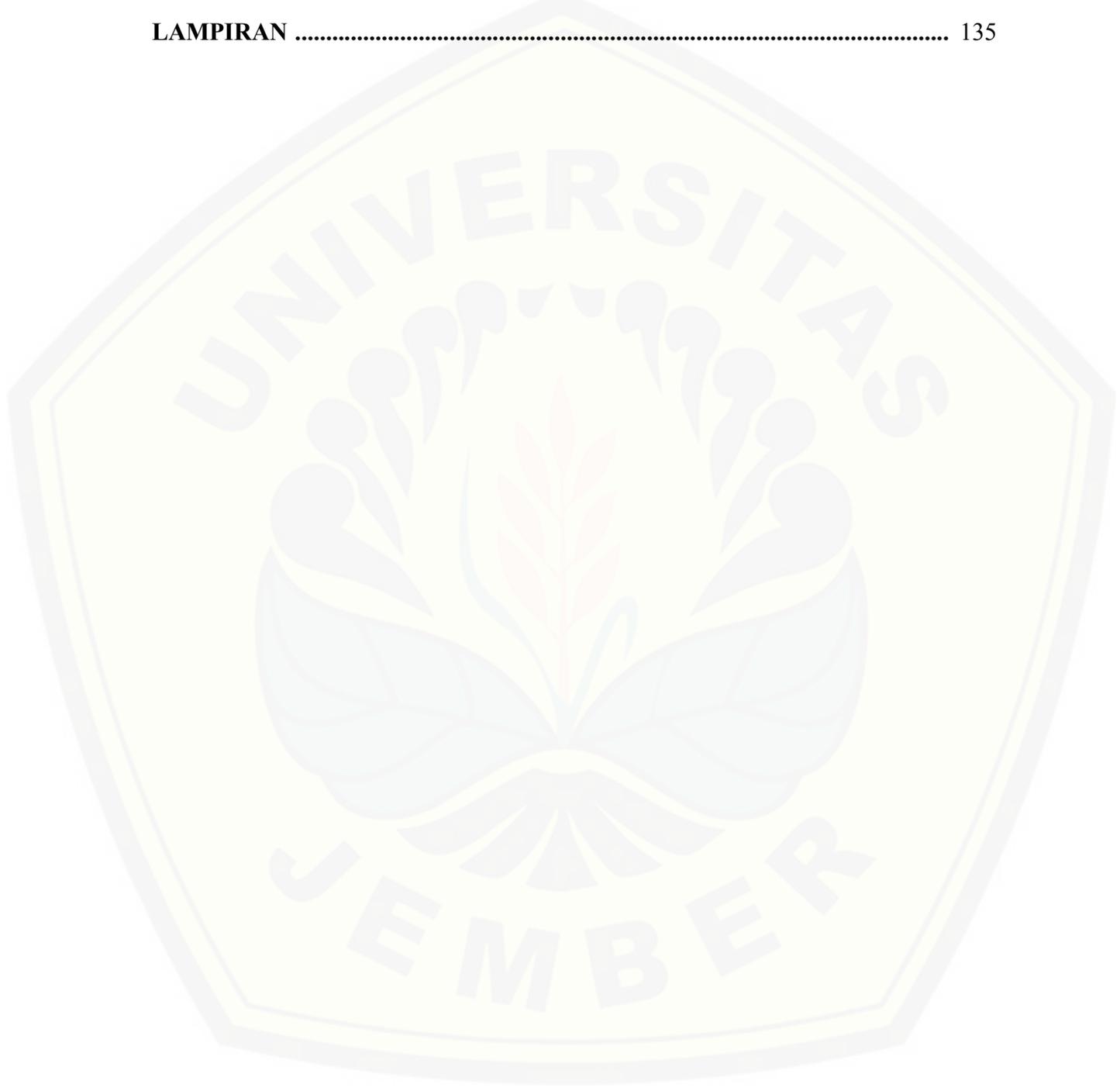
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
RINGKASAN	vix
<i>SUMMARY</i>	xiii
PRAKATA	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR SINGKATAN	xxv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	

2.1.1	Teori Preferensi Konsumen	8
2.1.2	Teori Utilitas (Nilai Guna)	13
2.1.3	Teori Pilihan Rasional	17
2.1.4	Teori Ekonomi Rumah Tangga (Household Economic)	19
2.1.5	Teori Ekonomi Kelembagaan	22
2.1.6	Konsepsi Pembangunan Ekonomi: perspektif Gender Dan Ekonomi Keluarga	31
2.2	Konsepsi Perempuan (Ibu Rumah Tangga) dan Ekonomi Keluarga	39
2.2.1	Perempuan (Ibu Rumah Tangga) dalam Konsep Kemandirian Ekonomi	41
2.2.2	Perempuan (Ibu Rumah Tangga) Bekerja	43
2.3	Konsepsi Lembaga Keuangan Mikro	46
2.4	Penelitian Sebelumnya	51
2.5	Kerangka Pemikiran	57
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN	
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	60
3.2	Sumber dan Jenis Data	60
3.3	Teknik pengumpulan Data	
3.3.1	Wawancara Mendalam (<i>Indept Interview</i>)	61
3.3.2	Diskusi Kelompok Terarah (<i>FGD</i>)	62
3.3.3	Observasi Partisipatoris	63
3.3.4	Dokumentasi	64
3.4	Desain Penelitian	64
3.5	Teknik Analisis Data	66
3.6	Batasan Penelitian	72
BAB 4	HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1	Profil Lembaga Keuangan Mikro dan Kehidupan Rumah	

	Tangga di Kecamatan Sumpalsari	
4.1.1	Profil Lembaga Keuangan Mikro di Kecamatan Sumpalsari	74
4.1.2	Motif Ekonomi Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Sumpalsari Bekerja di Sektor Informal	81
4.2	Tolak Ukur Preferensi Ibu Rumah Tangga dan Perubahan Pola Kelembagaan LKM	
4.2.1	Tolak Ukur Preferensi Ibu Rumah Tangga dalam Memilih LKM	88
4.2.2	Perubahan Pola Kelembagaan Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Dunia Usaha	97
4.2.3	Perubahan Pola Kelembagaan LKM di Sumpalsari.....	101
4.2.4	Proposisi Hasil Temuan Penelitian di Lapangan atas Pola Kelembagaan Ibu Rumah Tangga dalam Preferensi LKM di Kecamatan Sumpalsari	109
4.3	Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Pasca Meminjam Modal di LKM dan Implikasinya	
4.3.1	Pendapatan Rumah tangga Sebelum Meminjam di LKM	111
4.3.2	Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Pasca Meminjam di LKM	114
4.3.3	Proposisi Hasil Temuan atas Dinamika Pendapatan Rumah Tangga dalam Mengakses LKM dan Implikasi yang ditimbulkannya	118
4.4	Konstruksi Model Preferensi Ibu Rumah Tangga Terhadap LKM Pilihannya	120
4.5	Limitasi Penelitian	122
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	124

5.2	Saran	126
DAFTAR PUSTAKA		128
LAMPIRAN		135



DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 <i>Review</i> Penelitian Sebelumnya.....	53
4.1 Jumlah LKM di Kecamatan Sumpalsari	81
4.2 Motivasi Perempuan Terjun ke Sektor Informal	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kurva Indiferen	11
2.2 Tahap-tahap Proses Pengambilan Keputusan	18
2.3 Kurva Perilaku Rumah Tangga	20
2.4 Kerangka Berpikir	58
3.1 Desain Penelitian	65
4.1 Peta Kecamatan Sumbersari	74
4.2 Jenis Usaha Yang Ditekuni Ibu Rumah Tangga	85
4.3 Aktifitas Penagihan Bank Harian KSP di Lapak Sektor Informal	93
4.4 Dampak Layanan Keuangan Mikro bagi Aktivitas Ekonomi yang Dilakukan oleh Perempuan Miskin	99
4.5 Perbandingan Pola Kelembagaan Rumah Tangga Lama dan Pola Kelembagaan Rumah Tangga Baru	101
4.6 Alur Proses Peminjaman Kredit Model Lama	104
4.7 Alur Proses Peminjaman Kredit Model Baru	105
4.8 Hubungan Kelembagaan (Dinamis) antara Rumah Tangga dan Kelembagaan LKM	111
4.9 Dinamika Pendapatan yang dialami Nasabah	119
4.10 Kontruksi Model Preferensi Ibu Rumah Tangga pada LKM	120

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A Contoh Cuplikan Hasil Wawancara dengan Informan	135
B Laporan LKMM Bank Gakin Diskop dan UMKM Jember	143
C Dokumentasi Penelitian	155

DAFTAR SINGKATAN

B

BI	Bank Indonesia
BMT	Baitul Maal wal Tamwil
BPKB	Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Negara

F

<i>FGD</i>	<i>Focus Group Discussion</i>
------------	-------------------------------

I

<i>IFAD</i>	<i>International Fund for Agricultural Development</i>
<i>IPA</i>	<i>Interpretative Phenomenological Analysis</i>

K

KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
KSU	Koperasi Serba Usaha
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUM	Karya Usaha Mandiri

L

LKM	Lembaga Keuangan Mikro
-----	------------------------

LKMM Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MFIs *Microfinance Institutions*

MVPL *Marginal Product of Labor*

N

NIE *New Institutional Economics*

O

OJK Otoritas Jasa Keuangan

P

Permen Peraturan Menteri

PNM Permodalan Nasional Madani

PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

POKMAS Kelompok Masyarakat

PUM Pemberdayaan Usaha Mikro

R

ROSCA *Rotating Savings and Credit Association*

RTM Rumah Tangga Miskin

S

SDM Sumber Daya Manusia

SMP Sekolah Menengah Pertama

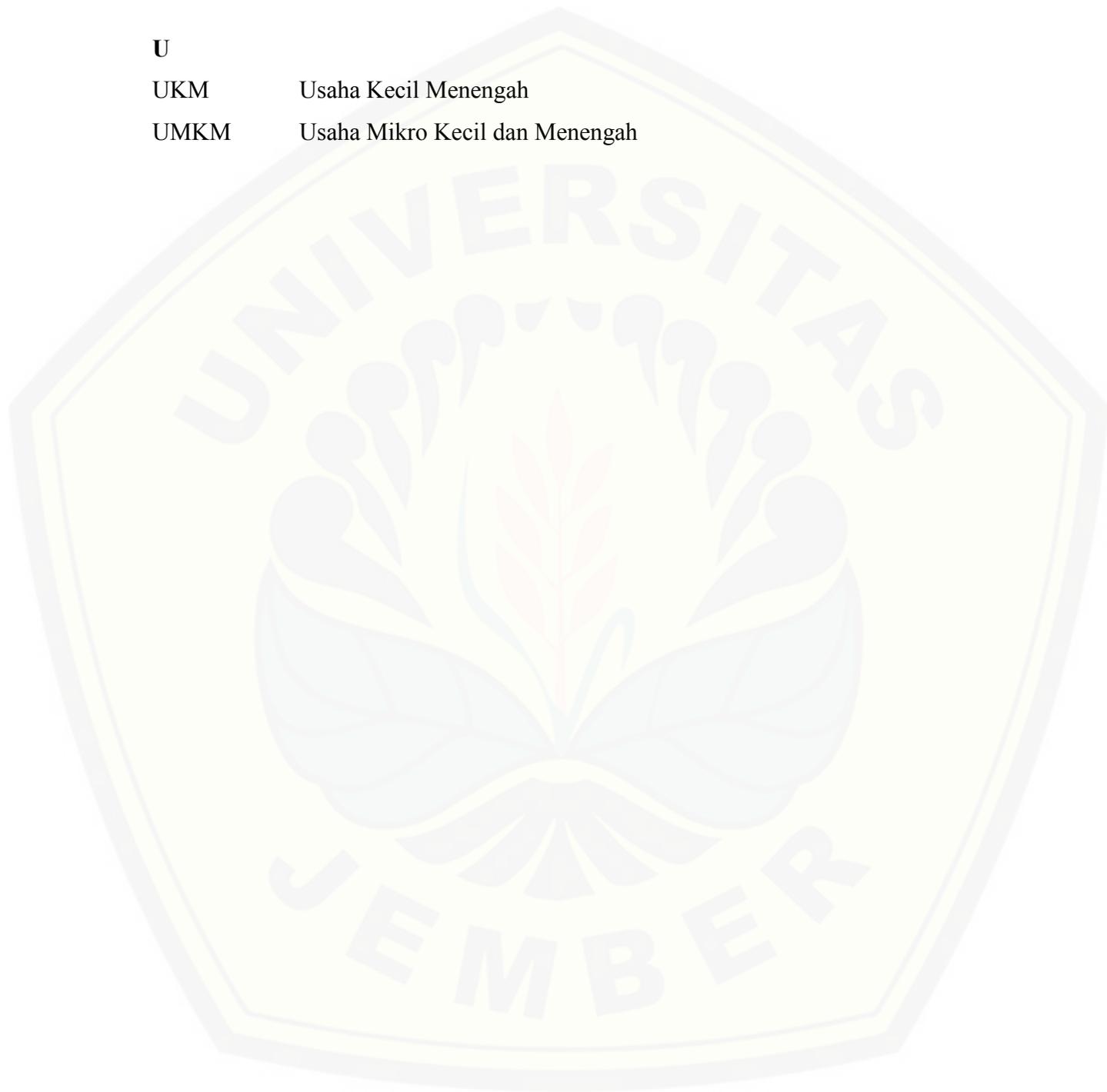
T

TVP Total Variabel Produksi

U

UKM Usaha Kecil Menengah

UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika pembangunan suatu negara ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Kondisi ini didukung pula oleh lembaga keuangan dalam memainkan fungsi intermediasinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2014; Siringoringo, 2012). Berkembangnya lembaga keuangan tidak berbanding lurus dengan akses masyarakat terhadap keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Hal itu dikuatkan dengan pendapatnya Chen dan Ravallion (2008) yang menyebutkan bahwa:

“... In spite of the hundreds of millions of people lifted out of poverty in recent decades in the Chinese, Indian, and other rapidly growing economies, over 2.5 billion people are estimated to still live on less than \$2 a day, more than half of the world’s population, especially the very poor, are without access to formal banking institutions...”

Hal itu menunjukkan bahwa angka kemiskinan utamanya di dunia berkembang masih besar sehingga perlu akses layanan jasa keuangan yang lebih inklusif.

Bedasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia (2010) bahwa tingkat literasi keuangan menunjukkan hanya 49 persen rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Sementara survey neraca rumah tangga Bank Indonesia (2011) menunjukkan bahwa rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 persen. Sehingga sebanyak 52 persen masyarakat di Indonesia belum mampu menggunakan lembaga keuangan. Dari survei tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan non formal masih relatif

rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Lastuti, tanpa tahun) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa di Indonesia, usaha mikro (UM) yang beraktivitas berjumlah 44,60 juta unit atau mencapai 91,26 persen dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Selanjutnya, usaha mikro ini berkontribusi lebih dari Rp 1.778 Triliun atau 53,30 persen dengan nilai investasi yang mencapai angka Rp 369,80 Triliun. Data lain dari BPS adalah 93,40 juta angkatan kerja di Indonesia, terdapat 42,50 juta orang yang bekerja pada usaha sendiri, dimana 24,30 juta unit adalah usaha mikro yang umumnya berada di daerah tertinggal. Dalam bangun piramid terbalik, usaha mikro berperan sebagai basis perekonomian, disusul oleh usaha kecil pada level berikutnya, yakni 4,22 juta unit atau 8,60 persen, selanjutnya usaha menengah sebesar 107 unit atau 0,23 persen dan puncaknya adalah usaha besar/konglomerat sebesar 7 ribu atau 0,01 persen. Sementara itu akses rumah tangga atas kredit lembaga keuangan dalam data BPS itu sekitar 9 persen dilayani bank umum dan 3 persen dilayani bank perkreditan rakyat (BPR).

Aktivitas rumah tangga yang didominasi oleh perempuan yang dalam hal ini ibu rumah tangga sebagai penunjang peningkatan pendapatan, menjadi hal yang penting di Indonesia. Fenomena ini semakin masif terlihat pada struktur keluarga pada level menengah ke bawah. Hal itu sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Tini (2008) bahwa ada peningkatan jumlah perempuan yang menjadi pengusaha mikro di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Data yang dapat dihimpun dalam penelitian itu, ada penambahan yang cukup signifikan jumlah pengusaha mikro perempuan dari tahun 2003 sejumlah 1.056 meningkat menjadi 2.252 pada tahun 2005. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aggarwal *et.al.* (2013) disebutkan bahwa kepercayaan terhadap peminjam perempuan seperti yang terjadi pada Grameen Bank timbul karena bentukan yang lama. Hal itu menjadi sebuah kultur di suatu wilayah tertentu yang akan berbeda dengan daerah yang lain. Beberapa wilayah di

Indonesia menjadi bagian dari adanya kultur itu, sehingga peran perempuan dalam hal ini adalah ibu rumah tangga sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga.

Dinamika peningkatan pendapatan rumah tangga melalui aktivitas produktif itu semakin memaksa ibu rumah tangga melakukan preferensi pengambilan keputusan untuk memilih lembaga keuangan guna memenuhi modal kerja. Yang muaranya untuk kegiatan usaha mereka. Hal ini seharusnya didukung oleh peran lembaga keuangan yang memadai, namun hal itu masih belum maksimal dilakukan oleh perbankan milik pemerintah.

Sempitnya pengetahuan terhadap lembaga keuangan mikro menjadi pilihan ibu rumah tangga memiliki kecenderungan melakukan pinjaman pada lembaga keuangan mikro yang relatif terjangkau secara mudah meskipun dengan bunga tidak murah. Hal ini menjadi peluang baru bagi lembaga keuangan mikro yang ada dimasyarakat seperti koperasi, BPR dan juga LKM yang lain yang menawarkan kredit tanpa agunan dengan pembayaran secara berkala setiap hari. Padahal jika dihitung, bunga dari kredit pinjaman itu lebih besar jika dibandingkan dengan perbankan umum. Dalam pandangan Aggarwal *et.al.* (2013) bahwa:

“...Microfinance institutions (MFIs) are generally seen as an important mechanism designed to increase access to finance among the poor and for lifting people out of poverty. While there are still many unanswered questions about the efficacy of MFIs, they have proliferated in recent decades and interest in MFIs has also increased as the unbanked poor are seen as one of the largest and potentially most lucrative groups of potential consumers...”

Meskipun keberadaannya masih dipertanyakan, namun LKM dipandang sebagai solusi dari sistem kredit yang inklusif, karena dengan berbagai kemudahan telah dilakukan.

Fenomena munculnya lembaga keuangan mikro dengan variasi produknya direspon secara positif oleh perubahan perilaku aktivitas ibu rumah tangga di Jember. Bahkan sampai saat ini disemua desa di Jember memiliki bank desa yang tujuannya untuk memberikan modal kepada masyarakat. Bahkan perbankan swasta mikro seperti BPR dan koperasi menjamur disemua wilayah di Jember. Menurut kepala OJK Jember Aidil Chaidir, ada 24 BPR di Jember yang memiliki kantor kas di semua

kecamatan. Jumlah koperasipun kian lama kian bertambah, meskipun yang kurang aktif juga tergolong banyak. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM Jember ada 1.822 unit koperasi, baik itu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha.

Tidak hanya dengan fasilitas keuangan yang seperti itu, pemerintah daerah Kabupaten Jember telah memiliki kebijakan untuk mendirikan Bank Gakin di semua lingkungan atau dusun di seluruh Jember. Tujuannya adalah supaya sistem keuangan inklusif dapat merata dan dapat diakses oleh masyarakat kalangan bawah. Sampai saat ini jumlah Bank Gakin di Jember sudah mencapai 433 kantor cabang, dengan anggota para ibu rumah tangga sejumlah 29.169 orang dengan omset pinjaman sebesar Rp 40.546.123.260. Jumlah yang sangat besar untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Jember. Sementara itu di Kecamatan Sumpalsari sendiri ada 30 kantor cabang Bank Gakin dengan anggota 3.753 ibu rumah tangga (Diskop dan UMKM Jember, 2014).

Dasar yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Jember dalam pembentukan LKMM bank Gakin adalah cerita keberhasilan yang terjadi di Bangladesh dengan Grameen bank yang dirintis oleh M. Yunus. Padahal dalam penelitian yang dilakukan oleh Asadul *et.al.* (2015) menyatakan bahwa pinjaman mikro yang dilakukan masyarakat dengan sistem tanggung renteng memang dapat mengurangi pinjaman kepada rentenir. Namun pinjaman dengan sistem itu ternyata selama dua dekade yaitu dari tahun 1987 hingga 2008 tidak mampu memunculkan sektor usaha baru.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Togba (2012) di Pantai Gading yang menunjukkan bahwa faktor geografis dimana para rumah tangga ini hidup, jenis pekerjaan utama dan juga besaran kredit mikro sangat mempengaruhi keberhasilan dari adanya sistem keuangan mikro itu. Wilayah pertanian dengan kondisi alam pedesaan maka tidak dapat dipaksakan untuk mengubah para ibu rumah tangga menjadikan wirausahawati. Mereka akan lebih banyak membantu suami berkebudan dan berladang, yang memang sudah menjadi bagian dari kesehariannya sejak kecil.

Sehingga kredit mikro yang harus disalurkan adalah kredit pertanian dengan jumlah yang besar dan bunga yang variatif dengan pembayaran disesuaikan dengan musim panen. Sementara daerah perkotaan masih memungkinkan para ibu rumah tangga mengembangkan jiwa wirausaha guna mendukung ekonomi keluarga. Hal ini kontradiktif dengan LKMM Bank Gakin yang ada di Jember, dimana persoalan geografis dianggap tidak ada perbedaan. Semuanya diajak untuk berwirausaha, meskipun tingkat kerentanannya berbeda, sehingga beberapa LKMM Bank Gakin ada yang gulung tikar (Kabar Jember, 16 September 2014).

Dalam Sukarno dan Damayanti (2012) pendirian LKMM Bank Gakin dimulai sejak tahun 2005 dengan membentuk Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) terus dilakukan hingga sekarang. Misi kelembagaan PUM-RTM bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan membangun usaha mikro. Usaha ini merupakan usaha alternatif atau usaha sampingan bagi rumah tangga miskin. Selain langsung menangani sasaran rumah tangga miskin, PUM-RTM berorientasi pada kesinambungan usaha. Seperti halnya dalam pengembangan usaha lain dan menjamin keberlanjutan. Mekanisme pengembangan usaha PUM-RTM terdiri dari penguatan institusi, penguatan modal usaha dan peningkatan keterampilan.

Dari kedua penelitian itu juga dapat diketahui jika proses pembuatan lembaga keuangan mikro bukanlah proses yang instan, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam waktu yang lama. Sehingga perlu dikaji lebih mendalam akan keberhasilan lembaga keuangan mikro di Jember yang secara akademik belum dilakukan evaluasi mendetail. Tidak hanya bank Gakin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan juga memberikan fasilitas kredit kepada anggota kelompok yang disebut dengan pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Dari LKM inilah maka akan menyaring masyarakat dengan kategorisasi tertentu yang akan dijadikan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (Trimelia, 2011). Dengan muncul dan berkembangnya banyak lembaga keuangan mikro ini, maka seharusnya ada banyak pilihan dari para kaum ibu untuk menggunakan jasa keuangan. Namun demikian, akan terjadi juga hubungan yang

selaras dengan lembaga keuangan yang ada, bahwa dengan banyaknya kaum ibu yang semakin produktif, maka akan mempengaruhi kelembagaan lembaga keuangan yang ada.

Banyaknya lembaga keuangan di Kecamatan Sumbersari menjadi awal ketertarikan untuk dilakukan penelitian. Salah satu kawasan kota Jember ini memiliki 74 kantor lembaga keuangan mikro di seluruh kelurahan. Bahkan jumlah Bank Gakin di kecamatan Sumbersari menempati yang terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu 30 unit di 7 kelurahan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Sumbersari utamanya kaum perempuan memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Atas tingginya wirausahawati ini, maka menjadi sebuah ketertarikan untuk diungkap lebih mendalam tentang pilihan ibu rumah tangga dalam melakukan kehidupan sosial terkait pemilihan lembaga keuangan untuk permodalan.

1.2. Rumusan Masalah

Preferensi perempuan pada lembaga keuangan mikro terhadap dinamika pendapatan ibu rumah tangga di kecamatan Sumbersari memiliki efek besar terhadap perubahan pola kelembagaan rumah tangga dan juga perubahan pola kelembagaan lembaga keuangan mikro. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengetengahkan beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah tolak ukur preferensi perempuan dan perubahan pola kelembagaan dalam LKM di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember?
- b. Bagaimanakah preferensi perempuan dalam LKM dapat mempengaruhi dinamika pendapatan rumah tangga?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tolak ukur preferensi perempuan dan pola kelembagaan dalam LKM di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
- b. Menganalisis pengaruh preferensi terhadap dinamika pendapatan rumah tangga pada LKM di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama yang mempunyai objek sama;
- b. Bagi dunia akademik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi;
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk membuat kebijakan yang terkait dengan pembentukan lembaga keuangan inklusif.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini akan diuraikan secara rinci mengenai teori-teori ekonomi yang mendukung dalam penelitian ini yaitu meliputi preferensi perempuan pada LKM terhadap dinamika pendapatan rumah tangga. Teori yang akan dibahas antara lain adalah teori preferensi, teori utilitas, teori pilihan rasional, teori ekonomi rumahtangga dan teori kelembagaan. Untuk memberikan kebijakan atas alur berpikir yang empiris dan teoritis yang jelas, maka diketengahkan pula pada sub bab berikutnya adalah kompilasi penelitian sebelumnya. Lebih dari pada itu, secara anatomis akan lebih jelas perbedaan atau persamaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sehingga berangkat dari empiris dan teoritis sebelumnya dapat dibentuk kerangka konseptual berfikir sebagai penuntun keberhasilan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan empiris yang telah disusun.

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Preferensi Konsumen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, preferensi konsumen dapat diartikan sebagai kesukaan, yang didahulukan atau yang diutamakan. Sementara itu menurut Varian (2010:33) menyatakan bahwa:

“...Preference refers to the set of assumptions related to ordering some alternatives, based on the degree of happiness, satisfaction, gratification, enjoyment, or utility they provide, a process which results in an optimal "choice" (whether real or imagined). In this way we can consider consumption choices involving many goods and services...”

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Simamora (2004:87) yang menyatakan bahwa preferensi konsumen merupakan suatu tindakan konsumen dalam memilih suatu barang atau jasa sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Preferensi dapat terbentuk melalui pola pikir konsumen yang didasari oleh beberapa alasan, antara lain:

a. Pengalaman yang diperolehnya

Masyarakat merasakan kepuasan menjadi nasabah dari suatu lembaga keuangan yang diikutinya, karena merasa terpuaskan dengan fasilitas yang tersedia, sehingga dia akan mengikutinya terus menerus.

b. Kepercayaan turun-temurun

Kepercayaan ini dikarenakan keluarga pendahulunya juga ikut dalam lembaga keuangan yang sama sehingga rekam jejaknya diikuti oleh keturunannya.

Pada aras yang sama Kotler (1997) mendefinisikan preferensi konsumen sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Analisis preferensi konsumen adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui apa yang disukai dan yang tidak disukai konsumen, juga untuk menentukan urutan kepentingan dari suatu atribut produk maupun produk itu sendiri. Dengan menggunakan analisis preferensi ini akan diperoleh urutan kepentingan karakteristik produk seperti apa yang paling penting atau yang paling disukai. Preferensi konsumen dapat diketahui dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai relatif penting setiap atribut yang terdapat pada suatu produk atau jasa. Engel *et.al.* (1994) mengemukakan beberapa faktor penentu yang mempengaruhi variasi dalam perilaku konsumen dan faktor-faktor penentu tersebut dapat di bagi menjadi dua faktor utama (Husein, 2005) :

1. Faktor Lingkungan. Perilaku konsumen di dalam lingkungan yang kompleks akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti:
 - a. Budaya,
 - b. Kelas sosial,
 - c. Pengaruh pribadi.

2. Faktor Psikologis. Faktor ini adalah proses pengolahan informasi, pembelajaran dan perubahan sikap atau perilaku yang terdiri dari :
 - a. Motivasi dan keterlibatan
 - b. Persepsi
 - c. Proses belajar / pengetahuan
 - d. Kepercayaan, demografi dan sikap

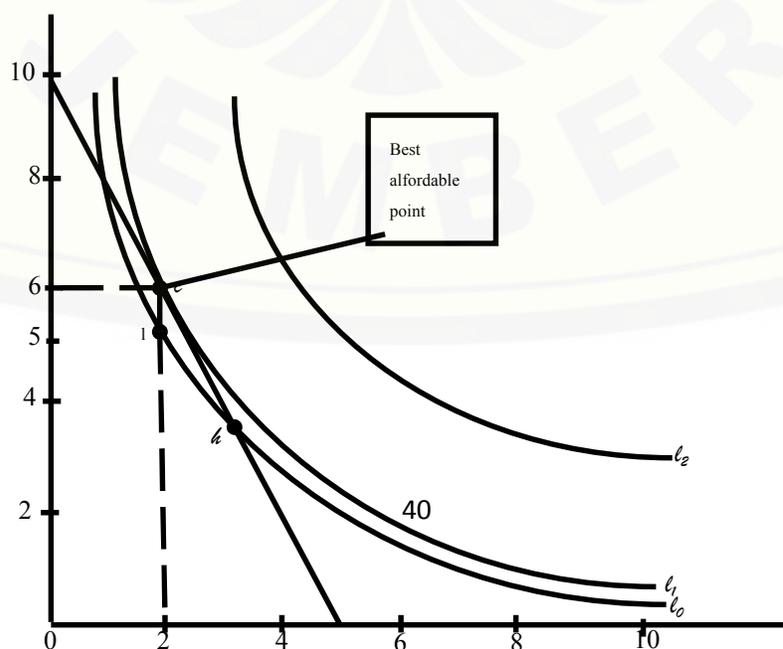
Pendapat yang sama diungkapkan Lilien *et.al.* dalam Simamora (2004), ada beberapa langkah yang harus dilalui sampai konsumen membentuk preferensi. Pertama, diasumsikan bahwa konsumen melihat produk (lembaga keuangan) sebagai sekumpulan atribut. Konsumen yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda tentang atribut apa yang relevan. Kedua, tingkat kepentingan atribut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Konsumen memiliki penekanan yang berbeda-beda dalam atribut apa yang paling penting. Ketiga, konsumen mengembangkan sejumlah kepercayaan tentang letak produk pada setiap atribut. Keempat, tingkat kepuasan konsumen terhadap produk akan beragam sesuai dengan perbedaan atribut. Kelima, konsumen akan sampai pada sikap terhadap merek yang berbeda melalui prosedur evaluasi.

Perilaku konsumen yaitu tingkah laku konsumen di pasaran dalam menentukan pilihan (preferensi) terhadap barang atau jasa yang akan dibelinya. Perilaku konsumen terjadi karena pendapatan yang terbatas, sedangkan keinginan untuk melakukan konsumsi tidak terbatas (Kotler, 1997). Hal ini menyebabkan konsumen harus lebih selektif lagi dalam memilih barang sesuai dengan keinginan, kemampuan dalam membeli barang dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Teori perilaku konsumen dimulai dari tiga asumsi dasar preferensi yaitu kelengkapan, transitivitas, dan lebih baik berlebih daripada kurang. Hal ini juga mendasari

pertimbangan para ibu rumah tangga yang meminjam uang di LKM untuk membelanjakan hasil dari uang yang mereka terima.

Preferensi konsumen dapat digambarkan melalui kurva indiferens. Keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva indiferens dan garis anggaran saling bersinggungan. Selain itu, kurva Engel pun menunjukkan pengaruh perubahan pendapatan terhadap pembelian suatu barang. Slope pada kurva Engel positif, yang menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan diikuti oleh kenaikan jumlah barang yang akan dibeli. Hal tersebut menunjukkan barang normal.

Samuelson memperkenalkan teori preferensi nyata (*Revealed Preference*) yang bertujuan untuk menyempurnakan teori ordinal. Ia menyatakan bahwa daya guna dapat diukur dan kelemahan pendekatan ordinal, yaitu dengan menerima asumsi *convexity* (kecembungan kurva) dari kurva indiferens yang negatif. Menurut Samuelson dalam Joesron dan Fathorrozi (2003:69) bahwa teori preferensi terungkap berlaku apabila adanya rasionalitas, konsisten, asas transitif dan *revealed preference axioma*. Teori preferensi terungkap menunjukkan bagaimana sikap seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan apabila harga dan pendapatan yang bervariasi dapat dipakai untuk menentukan preferensi konsumen. Seorang individu di dalam melakukan pilihan (preferensi) yang pertama kali dipertimbangkan adalah anggaran yang dimilikinya. Begitu pula apabila seseorang akan melakukan pinjaman, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah cukup tidaknya penghasilan yang dimiliki untuk digunakan melunasi tanggungannya setiap bulan.



Gambar 2.1 Indiferen Kurva (Sumber: Varian, 2010)

Titik kombinasi berada pada titik c . Pada saat itu, ia sedang dalam garis anggaran dan juga pada kurva indiferen tertinggi yang dapat dicapai. Pada titik seperti h , hanya bersedia memberikan lebih banyak film daripada membeli soda. Dia dapat bergerak ke titik i , yang sama baiknya seperti titik h dan memiliki sisa pendapatan. Dia dapat menghabiskan pendapatan dan pindah ke c , suatu titik bahwa dia lebih suka dari pada titik i . Anggaran merupakan sejumlah uang yang dimiliki oleh seseorang dan kemudian disusun secara sistematis untuk pengalokasian pengeluaran pada periode atau waktu tertentu. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Masing-masing individu akan menggunakan anggarannya tersebut untuk membeli barang yang akan dipilihnya dengan harapan akan memperoleh kepuasan yang maksimum.

Preferensi konsumen merupakan salah satu teori, yang bertujuan untuk menggambarkan alasan-alasan mengapa orang lebih suka terhadap suatu barang daripada barang lain. Dalam memahami perilaku konsumen ada 3 langkah yaitu preferensi konsumen, garis anggaran, dan pilihan yang akhirnya ditetapkan. Preferensi adalah kemampuan konsumen dalam memilih yaitu dengan cara mengurutkan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang yang berbeda.

Hubungan preferensi biasanya diasumsikan memiliki tiga sifat dasar, yaitu :

- a. Kelengkapan (*completeness*)

Jika A dan B merupakan dua kondisi atau situasi, maka tiap orang selalu harus bias menspesifikasikan apakah :

1. A lebih disukai daripada B
2. B lebih disukai daripada A, atau
3. A dan B sama-sama disukai.

Dengan dasar ini tiap orang diasumsikan tidak bingung dalam menentukan pilihan, sebab setiap orang tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan dengan demikian selalu bias menjatuhkan pilihan diantara dua alternatif.

b. Transitivitas (*transitivity*)

Jika seseorang menyatakan lebih menyukai A daripada B, dan lebih menyukai B daripada C, maka orang tersebut harus lebih menyukai A dari pada C. Dengan demikian seseorang tidak bias mengartikulasikan preferensi yang saling bertentangan.

c. Kontinuitas (*continuity*)

Jika seseorang menyatakan lebih menyukai A daripada B ini berarti segala kondisi dibawah A tersebut disukai daripada kondisi dibawah pilihan B. Diasumsikan preferensi tiap orang mengikuti dasar di atas. Dengan demikian tiap orang selalu dapat membantu menyusun ranking semua situasi atau kondisi mulai dari yang paling disenangi hingga yang paling tidak disukai dari bermacam barang dan jasa yang tersedia. Seseorang yang rasional akan memilih barang yang paling disenangi. Dengan kata lain, dari sejumlah alternatif yang ada orang lebih cenderung memilih sesuatu yang dapat memaksimumkan kepuasannya. Hal ini sejalan dengan konsep “barang yang lebih diminati menyuguhkan kepuasan yang lebih besar dari barang yang kurang diminati” (Nicholson,1994).

2.1.2 Teori Utilitas (Nilai Guna)

Utilitas atau teori nilai guna adalah teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa. Kalau kepuasan itu semakin tinggi maka semakin tinggi nilai guna. Sebaliknya semakin rendah kepuasan dari suatu barang maka nilai guna semakin rendah pula. Nilai guna dibedakan diantara dua pengertian, pertama nilai guna marginal yaitu penambahan atau pengurangan kepuasan akibat adanya penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Kedua, total nilai guna yaitu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa tertentu (Varian, 2010; 58).

Jika konsumen membeli barang karena berharap memperoleh nilai gunanya, tentu saja secara rasional konsumen berharap memperoleh nilai guna optimal. Secara rasional nilai guna akan meningkat jika jumlah komoditas yang dikonsumsi meningkat. Ada dua cara mengukur nilai guna dari suatu komoditas yaitu secara kardinal (dengan menggunakan pendekatan nilai absolut) dan secara ordinal (dengan menggunakan pendekatan nilai relatif, order atau ranking). Dalam pendekatan kardinal bahwa nilai guna yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif dan dapat diukur secara pasti. Untuk setiap unit yang dikonsumsi akan dapat dihitung nilai gunanya (Sukirno, 2005).

Bentham (1748-1832) dan Mill (1806-1876) mengungkapkan bahwa tujuan masyarakat untuk memaksimalkan jumlah utilitas dari individual, bertujuan untuk “kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar”. Dalam ekonomi neoklasik, rasionalitas didefinisikan secara tepat dalam istilah dari kebiasaan maksimalisasi utilitas dibawah keadaan ekonomi tertentu. Sebagai kebiasaan usaha hipotetikal, utilitas tidak membutuhkan adanya keadaan mental seperti “kebahagiaan”, “kepuasan”, dan lain-lain. Utilitas digunakan oleh ekonom dalam konstruksi sebagai kurva indiferen, yang berperan sebagai kombinasi dari komoditas yang dibutuhkan oleh individu atau masyarakat untuk mempertahankan tingkat kepuasan. Utilitas individu dan utilitas masyarakat dapat dibuat sebagai variabel tetap dari fungsi utilitas (contohnya seperti peta kurva indiferen) dan fungsi kesejahteraan sosial.

Nilai guna dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan: pendekatan nilai guna (*utiliti*) kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal (dengan analisis kurve kepuasan sama). Dalam pendekatan nilai guna kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Sedangkan dalam pendekatan nilai guna ordinal, manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang atau jasa tidak dikuantifikasi. Tingkah laku seorang konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimalkan kepuasannya ditunjukkan dengan bantuan kurva kepuasan sama, yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang yang akan memberikan nilai guna (kepuasan) yang sama (Varian, 2010: 59).

Pendekatan kardinal merupakan penemuan gabungan dari beberapa ahli ekonomi aliran subjektif seperti Herman Heinrich Gossen (1854), William Stanley Jevons (1871), dan Leon Wallras (1894). Pendekatan kardinal memberikan penilaian subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang atau jasa. Artinya tinggi rendahnya nilai guna suatu barang atau jasa tergantung pada subjek yang memberikan penilaian. Jadi suatu barang atau jasa akan memberikan nilai guna yang tinggi bila barang atau jasa dimaksud memberikan daya guna yang tinggi bagi sang pemakai. Dalam pendekatan kardinal berlaku asumsi sebagai berikut (Sukirno, 2005) :

1. Daya guna diukur dalam satuan uang, yaitu jumlah uang yang bersedia dibayar oleh konsumen dalam rangka menambah unit yang akan dikonsumsi.
2. Daya guna marginal dari uang tetap, yaitu bahwa nilai dari suatu uang dalam satuannya adalah sama untuk setiap orang tanpa memandang statusnya.
3. Addivitas, yaitu bahwa nilai guna total adalah keseluruhan konsumsi dari barang.
4. Daya guna bersifat independen, artinya daya guna suatu barang tidak dipengaruhi oleh karena mengkonsumsi barang lain.
5. Periode konsumsi suatu barang berdekatan dan dengan jumlah yang sama.

Sementara itu pendekatan ordinal dalam Nicholson (1994) menegaskan bahwa besarnya nilai guna ordinal dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai relatif yaitu melalui order atau ranking. Bila di dalam pendekatan

kardinal kepuasan mengkonsumsi suatu barang penilaiannya bersifat subjektif (tergantung pada siapa yang menilai), tentu saja setiap orang memiliki penilaian yang berbeda. Maka dalam pendekatan ordinal ini tingkat kepuasan dapat diurutkan dalam tingkatan-tingkatan tertentu, misalnya rendah, sedang, tinggi. Dengan demikian, setiap kepuasan yang diperoleh dapat teranalisis. Beberapa asumsi yang mendasari pendekatan ordinal adalah sebagai berikut :

1. Rasionalitas, di mana konsumen akan berusaha meningkatkan kepuasannya atau akan memilih tingkat kepuasan yang tertinggi yang dapat dicapainya.
2. Konveksitas, yaitu bentuk kurva indifference cembung dari titik origin dari sumbu absis dan ordinat.
3. Nilai guna tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi.
4. Transitivitas, yaitu konsumen akan menjatuhkan pada pilihan terbaik dari beberapa pilihan.

Hukum nilai guna yang semakin menurun dikenal dengan Hukum Gossen I, dikemukakan oleh Herman Henrich Gossen (1818-1859), seorang ahli ekonomi dari Jerman. Hipotesis teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna kardinal menurun (*Law Diminishing Cardinal Benefit*) berbunyi:

“...Tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus menerus menambah konsumsinya keatas barang tersebut dan pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif...”

Hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus menerus dalam mengkonsumsi suatu barang, tidak secara terus menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang mengonsumsinya. Pada mulanya, setiap tambahan konsumsi akan mempertinggi tingkat kepuasan orang tersebut, namun semakin lama, tingkat kepuasan seseorang tersebut akan semakin menurun. Pada akhirnya, tambahan nilai

guna akan menjadi negatif yang artinya apabila konsumsi atas barang tersebut ditambah satu unit lagi maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit.

Teori nilai guna dapat menerangkan mengenai wujud kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen, atau disebut sebagai surplus konsumen. Surplus konsumen menunjukkan adanya perbedaan antara kepuasan yang diperoleh dibandingkan dengan pembayaran yang dilakukan untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut, dalam hal ini diasumsikan bahwa kepuasan yang diperoleh seseorang selalu lebih besar. Surplus konsumen berkaitan dengan nilai guna kardinal yang semakin sedikit.

2.1.3 Teori Pilihan Rasional

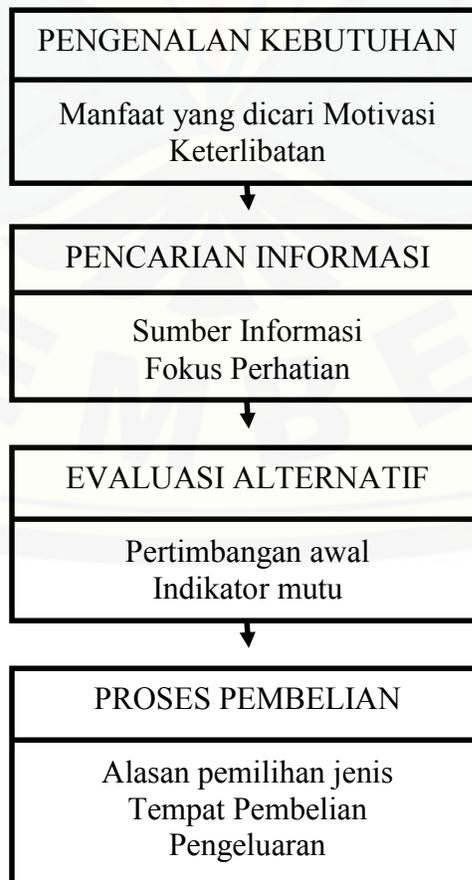
Pada pembahasan kali ini memusatkan pada masalah perorangan dalam memilih kuantitas dua barang atau jasa (yang kita namakan X, dan Y) yang akan dikonsumsi. Diasumsikan bahwa orang memperoleh utilitas dari kedua barang ini dan memperlihatkan utilitas ini dalam notasi fungsional sebagai Utilitas = $U(X, Y)$ (hal-hal lain). Notasi ini menunjukkan bahwa utilitas yang diterima seseorang karena mengkonsumsi X dan Y selama periode tertentu bergantung pada kuantitas X dan Y yang dikonsumsi pada hal-hal ini. Hal ini dapat meliputi barang-barang lain yang dapat dikuantifikasi seperti jumlah barang yang dikonsumsi. Mereka dapat juga mencakup hal-hal yang tidak dapat dikuantifikasi seperti cinta, rasa aman dan harga diri.

Sebagai contoh, jika menyinggung kasus seseorang yang sedang memilih beberapa banyak hamburger (Y) dan minuman ringan (X) untuk dikonsumsi selama satu minggu. Dalam menganalisis pilihan hamburger-minuman ringan kita mengasumsikan bahwa sebuah faktor lain yang mempengaruhi utilitas dijaga konstan. Para ahli ekonomi pertama yang memikirkan konsep utilitas memandang bahwa utilitas mungkin dapat diukur. Hambatan untuk mengukur utilitas ada 2 macam.

Pertama menyangkut unit (satuan) pengukuran yang akan digunakan. Sehingga memunculkan gagasan psikologi yang cukup baik untuk mengatakan berapa besar satu util (yaitu satu satuan utilitas) itu.

Kesulitan kedua yang timbul dalam mengukur utilitas dalam telaah tentang pilihan seseorang menyangkut asumsi *ceteris paribus*. Dalam eksperimen psikologis sederhana akan mungkin menjaga segala hal, kecuali stimulus yang sedang diamati, untuk peta konstan (artinya, menyediakan "control" eksperimental yang memadai). Tetapi, dalam bidang ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan ekonomi seseorang mustahil untuk didaftar dan dikuantifikasi, apalagi untuk menjaga sebagian dari mereka tetap konstan agar dapat mengukur utilitas yang diperoleh dari berbagai pilihan yang ada.

Pemecahan masalah dalam konteks perilaku konsumen memerlukan penimbangan yang cermat dan evaluasi sifat produk yang utilitarian. Pengambilan keputusan rasional digunakan dalam pemecahan masalah perilaku konsumen. Engel *et.al* (1994), menyatakan bahwa dalam keputusan pembelian kegiatan konsumen yang bersifat mental maupun fisik akan melalui suatu tahapan proses sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut ini:



Penjelasan dari gambar 2.2:

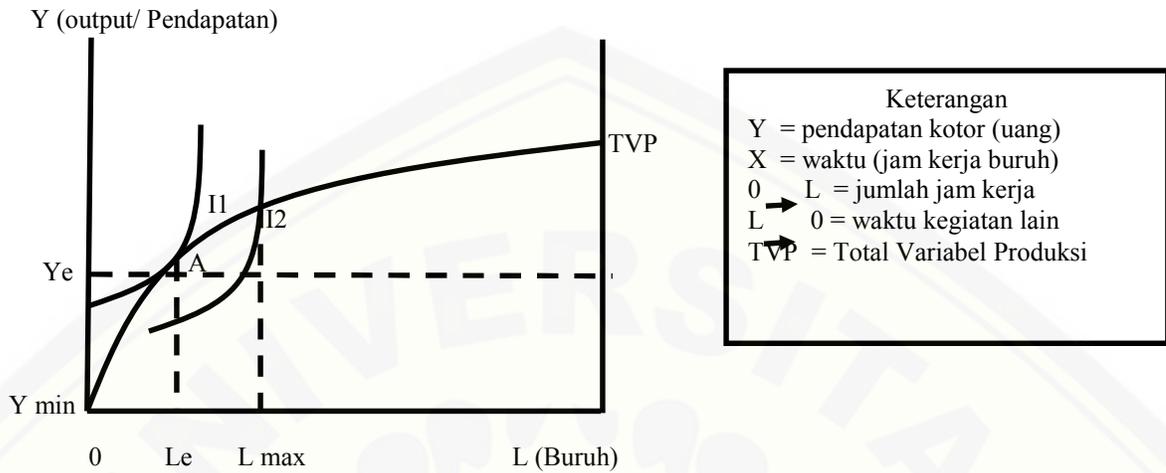
- a. Pengenalan kebutuhan: konsumen mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan.
- b. Pencarian informasi: konsumen mencari informasi yang disimpan dalam ingatan (pencarian internal) atau mendapatkan informasi yang relevan dengan keputusan dari lingkungan (pencarian eksternal).
- c. Evaluasi alternatif: konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pilihan hingga alternatif yang dipilih.
- d. Proses pembelian: konsumen memperoleh alternatif yang dipilih atau pengganti yang dapat diterima bila perlu.
- e. Perilaku pasca pembelian: konsumen mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih memenuhi kebutuhan dan harapan segera sesudah digunakan.

2.1.4 Teori Ekonomi Rumah Tangga (Household Economic)

Pendekatan sistem model ekonomi rumahtangga menurut Becker (dalam Rosmiati, 2012) mengembangkan teori untuk mempelajari model ekonomi rumah tangga pedagang kaki lima, dimana kegiatan produksi dan konsumsi tidak terpisah dan penggunaan tenaga kerja keluarga lebih diutamakan. Teori ini memandang rumahtangga sebagai pengambil keputusan dalam kegiatan produksi dan konsumsi, serta hubungannya dengan alokasi waktu dan pendapatan rumahtangga yang dianalisis secara simultan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa dalam mengkonsumsi, kepuasan rumah tangga bukan hanya ditentukan oleh barang dan jasa yang dapat diperoleh di pasar, tetapi juga dari berbagai komoditi yang dihasilkan dalam rumahtangga. Selain itu ada beberapa asumsi yang dipakai dalam teori ini, yaitu: (1) waktu dan barang atau jasa merupakan unsur kepuasan; (2) waktu dan barang atau jasa dapat dipakai sebagai faktor produksi dalam fungsi produksi rumahtangga; dan (3) rumahtangga bertindak sebagai produsen dan sebagai konsumen.

Pada aras yang berbeda berdasarkan konsep inti teori Chayanov, dalam menganalisis ekonomi keluarga adalah keseimbangan antara konsumen dan buruh dalam keluarga, yaitu ditunjukkan rasio antara jumlah yang mengkonsumsi (C) dan yang bekerja mendapat gaji (W) dalam keluarga tersebut (C/W). Jika jumlah tanggungan meningkat, maka rasio C/W akan meningkat pula (Rosmiati, 2012). Untuk menurunkan rasio tersebut, berarti harus menambah jumlah jam atau hari kerja keluarga yang bekerja, selain itu juga dapat menambah jumlah anggota keluarga yang ikut bekerja. Dalam penelitian ini mengajukan perempuan dalam keluarga tersebut ikut bekerja, supaya rasio C/W menurun. Berarti akan meningkatkan pendapatan dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka.

Teori Chayanov tentang perilaku rumah tangga, dapat digambarkan dalam ilustrasi seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 2.3 Perilaku Rumah Tangga Petani, analogi Rumah Tangga Masyarakat Kota
(Sumber: Rosmiati (2012))

Y dapat dikatakan sebagai pendapatan keluarga, yang menggunakan fungsi produksi, yaitu: $Y = P_y \cdot F(L)$. Sedangkan fungsi konsumsi digambarkan dalam bentuk kurva indifferen (I_1 dan I_2) dengan fungsi *utility*, yaitu: $U = f(Y, H)$, berarti terjadi pilihan antara bekerja (Y) dan bersenang-senang (H). Sehingga rumah tangga petani harus pada posisi Y_{min} , artinya tingkat pendapatan untuk bertahan hidup. Kemudian untuk mencapai Y_{max} , petani akan mencurahkan waktu bekerja maximum (L_{max}), berarti akan mengorbankan waktu bersenang-senang. Untuk dapat mencapai posisi keseimbangan pada Y_e dan L_e di titik A, berarti selain waktunya digunakan untuk bekerja juga untuk bersenang-senang. Dengan demikian titik A menunjukkan $MVPL$ (*Marginal Product of Labor*) merupakan persamaan (dY/dH), selanjutnya dapat dibuat kesimpulan bahwa: $MU_H \cdot MU_Y = dY/dH = MVPL$, Teori mikro ekonomi perilaku rumahtangga petani dalam model Chayanov adalah memaksimalkan *utility* dengan tiga *constraints* yaitu meliputi: fungsi produksi, tingkat pendapatan minimum dan jumlah hari kerja maksimum yang tersedia.

Pendekatan ekonomi rumahtangga tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1920 oleh Chayanov di Rusia, kemudian Becker (1965) menyusunnya dalam bentuk “*new home economics*”. Dalam ekonomi rumahtangga, alokasi waktu dan konsumsi barang dapat dibeli di pasar, atau dapat juga dihasilkan oleh rumahtangga. Ciri utama yang membedakan perilaku individu dan perilaku rumahtangga sebagai konsumen, adalah bahwa pada perilaku ekonomi rumahtangga, pada saat yang sama anggota rumahtangga juga sebagai produsen sebagaimana suatu perusahaan (Evenson, dalam Rosmiati 2012).

Becker (1965) secara mendasar melihat perilaku konsumsi rumahtangga sebagai proses dalam dua tingkat, yaitu: (1) tingkat pertama, menjelaskan perilaku rumahtangga menghadapi fungsi produksi rumahtangga, dimana waktu dan modal yang tersedia dalam rumahtangga digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi rumahtangga, dan (2) tingkat kedua, menjelaskan proses keputusan pilihan konsumsi, anggota rumah tangga berperilaku sebagaimana perilaku individu konsumen, dimana aksioma perilaku konsumen konvensional dapat diaplikasikan.

Dengan demikian, rumah tangga dalam memaksimalkan kepuasannya, dibatasi oleh kendala produksi, waktu dan pendapatan. Pendapatan seluruhnya dibelanjakan untuk konsumsi (persyaratan *adding up*). Barnum dan Squire (1978) menyatakan bahwa model ekonomi rumah tangga adalah menjembatani ekonomi perusahaan pertanian yang seluruhnya mempekerjakan tenaga yang diupah dan menjual hasilnya ke pasar, dengan pertanian subsisten yang menggunakan hanya tenaga kerja keluarga dan tidak menghasilkan “*marketed surplus*”.

2.1.5 Teori Ekonomi Kelembagaan

Kelembagaan (*intitutions*) semestinya dapat menjadi sumber yang efisien dan membuat kemajuan ekonomi. Namun demikian, sampai saat ini masih belum terdapat kejelasan mengenai makna dan definisi dari kelembagaan. Banyak ekonom yang

mendefinisikan kelembagaan dengan perspektif beraneka macam walaupun dengan tingkat substansi yang sama. Hal ini tentu tidak menjadi persoalan bila fenomena tersebut dianggap memberikan kontribusi terhadap kekayaan dimensi terhadap perkembangan ilmu ini (Yustika, 2006:27). Jika multi ragam definisi tersebut berjalan ke arah yang saling menegaskan, dikhawatirkan yang terjadi bukanlah menuju kepada penambahan kekayaan sudut pandang, melainkan kekaburan terhadap konsep kelembagaan itu sendiri. Teori kelembagaan mengungkap lebih dalam dan mengarah pada aspek struktur sosial yang mempertimbangkan proses dari suatu budaya mencakup bagan, aturan main, norma dan rutinitas yang tidak dapat dipungkiri menjadi pedoman dalam perilaku sosial (Scott, 2004:2). Oleh karena itu, saat ini tugas terberat bagi para ahli ekonomi kelembagaan adalah mencoba merumuskan secara definitif pengertian kelembagaan sehingga dapat memberikan panduan bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengkajinya. Pada bagian ini, akan dikupas makna kelembagaan dari mulai aspek paling fundamental yang mendasari lahirnya teori ekonomi kelembagaan.

Pada aras yang sama Yustika (2006:29) menekankan bahwa kelembagaan merefleksikan sistem nilai dan norma dalam masyarakat; tetapi, nilai dan norma itu bukanlah kelembagaan itu sendiri. Begitu juga diungkapkan Vatn (2006:2) yang menggambarkan kelembagaan sebagai sebuah organisasi yang memandang keduanya sebagai “*rules*”. Sementara itu North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai “*the rules of game*” memandang bahwa dalam pengambilan suatu bentuk norma sosial atau “*legal rule*” yang disebutnya sebagai “*external constrains*” dapat mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan hal terbaik yang dipilihnya secara optimal. Kelembagaan dapat pula dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang dapat diawasi sendiri maupun dimonitori oleh otoritas luar (*external authority*). Lebih lanjut menurut Yustika (2006:26) yang memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia (*humanly devised*) untuk membangun struktur

interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Melalui rangkaian sejarah, kelembagaan dapat meminimalisasi perilaku manusia yang menyimpang telah berhasil menciptakan ketertiban dan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan pertukaran (*exchange*).

Pada konteks ini kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni aturan formal (*formal institutions*), aturan informal (*informal institutions*), dan mekanisme penegakan (*enforcement mechanism*). Aturan formal meliputi konstitusi, statuta, hukum, dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), sistem ekonomi (hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumberdaya, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi). Aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang memengaruhi bentuk persepsi subyektif individu tentang dunia di mana mereka hidup (Yustika 2006:29). Terakhir adalah penegakan, bahwa semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan. Contohnya, suatu negara dapat saja memiliki undang-undang *antitrust* yang mencegah monopoli, namun apabila pemerintah gagal untuk menegakkan regulasi tersebut, maka dunia bisnis mungkin akan tetap berjalan.

Pendapat serupa juga dikemukakan Yeager (1999:9) yang secara ringkas menjelaskan kelembagaan sebagai aturan main (*rules of the game*) dalam masyarakat. Aturan main tersebut mencakup regulasi yang memapankan masyarakat untuk melakukan interaksi. Kelembagaan dapat mengurangi ketidakpastian yang *inherent* dalam interaksi manusia melalui penciptaan pola perilaku, (Pejovich, 1995:30). Kelembagaan efektivitas penegakan hak kepemilikan (*property rights*), kontrak dan jaminan formal, *trademarks*, *limited liability*, regulasi kebangkrutan, organisasi korporasi besar dengan struktur tata kelola yang membatasi persoalan-persoalan *agency*, kontrak yang tidak lengkap dan oportuniste paska-kontrak (*expost opportunism*) (Bardhan, 1996:4). Menurut definisi dan makna yang begitu banyak tersebut, ruang lingkup dari kelembagaan memang sangat luas. Pemaknaan kelembagaan dapat dipilah dalam dua klasifikasi. *Pertama*, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi

antarpelaku ekonomi sehingga mereka dapat melakukan kegiatan transaksi. *Kedua*, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial antarpelakunya.

Sebagai abstraksi, North (1990) dan Yustika (2006:31) mengungkapkan beberapa karakteristik umum dari kelembagaan, yakni:

1. Kelembagaan secara sosial diorganisasi dan didukung (Yustika, 2006:31). Kelembagaan membedakan setiap rintangan-rintangan atas perilaku manusia, misalnya halangan biologis (*biological constraints*) dan rintangan fisik (*physical constraints*).
2. Kelembagaan adalah aturan-aturan formal dan konvensi informal, serta tata perilaku (*codes of behavior*).
3. Kelembagaan secara perlahan-lahan berubah atas kegiatan-kegiatan yang telah dipandu maupun dihalangi.
4. Kelembagaan juga mengatur larangan-larangan (*prohibitions*) dan persyaratan-persyaratan (*conditional permissions*).

Permasalahan dalam ekonomi umumnya muncul akibat adanya kelangkaan sumber daya dan kebutuhan serta keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara itu ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan timbul pilihan. Selanjutnya ekonomi memunculkan konsep baru mengenai pasar, keseimbangan, biaya produksi, optimalisasi manfaat, efisiensi, teori pilihan, teori kesejahteraan dan masalah lain yang berpusat pada asumsi adanya suatu kondisi penghambat (*constrains*) dalam proses pengambilan keputusan.

Pembahasan mengenai kelembagaan atau institusi dalam ilmu ekonomi mulai berkembang sejak dekade 1980-an, pada saat itu kegagalan pembangunan ekonomi pada umumnya disebabkan oleh kegagalan institusi, sehingga para ekonom yang

sudah memahami masalah tersebut berupaya untuk mengkaji peranan institusi dalam pembangunan ekonomi. Cabang baru ilmu ekonomi yang dikenal dengan ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) muncul karena perkembangan tentang kajian peranan institusi di dalam pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh para pakar ekonomi. Perkembangan ekonomi kelembagaan ini selanjutnya lebih menekankan analisisnya pada pengaruh biaya transaksi (*transaction cost*).

Hal tersebut diungkapkan oleh Santosa (2010:18), bahwa untuk menggantikan kegagalan sistem ekonomi aliran Neoklasik, maka sudah seharusnya para pakar ekonomi untuk melihat dan mempelajari aliran ekonomi lainnya yang sesuai dengan perkembangan perekonomian. Salah satu aliran ekonomi yang diperkirakan sangat sesuai dan dapat menggantikan kegagalan aliran ekonomi Neoklasik yang sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi sekarang adalah aliran ekonomi kelembagaan. Reaksi dari ketidakpuasan terhadap aliran Neoklasik yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliran ekonomi Klasik mendorong munculnya aliran ekonomi kelembagaan (*institutional economics*). Sementara itu menurut Hasibuan (2003) inti pokok aliran ekonomi kelembagaan adalah memahami ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah dan hukum. Para ekonom merangkum kesatuan ilmu ekonomi dengan disiplin ilmu yang lain dalam analisis ekonomi, akan tetapi di antara para ekonom masih mempunyai pandangan yang berbeda. Pada garis besarnya mereka tidak sepakat dengan berlakunya pasar bebas atau persaingan bebas dengan azas *laissez-faire* dan motif untuk memperoleh laba maksimal.

Adapun tokoh aliran kelembagaan menurut Landreth dan Colander (1994) terbagi dalam tiga golongan, yaitu tradisional, quasi dan neo. Sementara itu, Yustika (2006) membagi aliran kelembagaan ke dalam ilmu ekonomi kelembagaan lama (*old institutional economics*) dan ilmu ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*). Terkait dengan bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan

manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Hal ini kemudian dihubungkan dengan ilmu ekonomi yang berkembang dalam cabang barunya sehingga muncul ilmu ekonomi institusi baru (*neo institutional economics*) dengan melihat kelembagaan dari sudut biaya transaksi (*transaction costs*) dan tindakan kolektif (*collective action*). Di dalam analisis biaya transaksi termasuk analisis tentang kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi (*property rights*), ketidak-seimbangan akses dan penguasaan informasi (*information asymmetry*) serta tingkah laku opportunistik (*opportunistic behaviour*). Ilmu ekonomi institusi baru ini sering pula disebut sebagai ilmu ekonomi biaya transaksi (*transaction costs economics*) sedangkan yang lain menyebutkannya sebagai paradigma informasi yang tidak sempurna (*imperfect information paradigm*).

Perlu dijelaskan bahwa ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tataran mikro. Ekonomi kelembagaan kemudian berkembang menjadi dua macam yakni ekonomi kelembagaan lama (*old institutional economics*) dan ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*). Ekonomi kelembagaan lama muncul pada awal abad ke-20. Rutherford (1994) memberikan pemaknaan bahwa ekonomi kelembagaan lama ini dibangun dan berkembang di kawasan Amerika Utara, para tokohnya antara lain: Veblen, Commons, Mitchell dan Clarence Ayres.

Ekonomi kelembagaan lama ini muncul untuk merubah pandangan para tokoh ekonomi neoklasik. Para tokoh ekonomi kelembagaan lama mengkritik keras aliran neoklasik dengan alasan antara lain Rutherford (1994):

1. Aliran Neoklasik mengabaikan peran institusi dalam perekonomian, artinya makna penting dari kendala-kendala non anggaran (*nonbudgetary constraints*) mereka mereka anggap tidak berpengaruh terhadap perekonomian.

2. Para tokoh Neoklasik memberikan penekanan yang berlebihan kepada rasionalitas pengambilan keputusan (*rational-maximizing self-seeking behaviour of individuals*).
3. Perhatian dan konsentrasi yang berlebihan terhadap keseimbangan (equilibrium) serta bersifat statis.
4. Tokoh Neoklasik menolak bahwa preferensi seseorang yang dapat berubah atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan.

Hal-hal tersebut mendorong para pakar ekonomi kelembagaan baru untuk menawarkan ekonomi lengkap dengan teori dan institusinya. Ekonomi kelembagaan baru menekankan pentingnya peran institusi dalam perekonomian, akan tetapi keberadaan institusi tersebut masih menggunakan landasan analisis ekonomi neoklasik. Beberapa asumsi ekonomi neoklasik masih digunakan dalam memahami perkembangan perekonomian, tetapi asumsi tentang rasionalitas dan adanya informasi sempurna (sehingga tidak ada biaya transaksi) ditentang oleh ekonomi kelembagaan baru. Menurut ekonomi kelembagaan baru, institusi memiliki peran sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar. Ekonomi kelembagaan baru memiliki beberapa arti penting dalam perekonomian antara lain adalah (Arsyad, 2010):

1. Teori yang terdapat dalam ekonomi kelembagaan baru mampu menjawab bahkan mengungkapkan permasalahan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik dengan dasar landasan ekonomi neoklasik. Salah satu permasalahan yang berhasil dijelaskan ekonomi kelembagaan baru tersebut adalah eksistensi sebuah perusahaan sebagai sebuah organisasi administratif dan keuangan. Ekonomi kelembagaan baru merupakan sebuah paradigma baru dalam mempelajari, memahami, mengkaji atau bahkan menelaah ilmu ekonomi.
2. Sejak dekade 1990-an makna ekonomi kelembagaan baru sangat penting dalam konteks kebijakan ekonomi, karena ekonomi kelembagaan baru berhasil mematahkan dominasi superioritas mekanisme pasar. Ekonomi kelembagaan baru

telah berhasil menempatkan diri sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar (*non-market institutions*). Ekonomi kelembagaan baru telah mengeksplorasi faktor-faktor non-ekonomi, seperti hak kepemilikan, hukum kontrak dan lain sebagainya untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Menurut ekonomi kelembagaan baru, adanya informasi yang tidak sempurna, eksternalitas dan fenomena *free-riders* di dalam barang-barang publik dinilai sebagai sumber utama kegagalan pasar. Hal ini yang menyebabkan kehadiran institusi non-pasar mutlak diperlukan.

Sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada kepentingan pribadi, mekanisme harga dan pasar bebas, seharusnya dipahami dengan hal-hal terkait dengan hak kepemilikan dan penggunaan kekayaan. Ekonomi liberal (klasik maupun neoklasik) tidak membahas tentang hal tersebut. Jika terdapat hak kepemilikan, maka penggunaan kekayaan tersebut diperlakukan sebagai suatu konstanta yang tidak aktif berfungsi menjelaskan kegiatan lokatif. Tentang hak kepemilikan menurut Yustika (2010) bahwa hingga saat ini para pakar ekonomi dan pengambil kebijakan memberikan perhatian yang terbatas. Terdapat perdebatan akan pengakuan status hak kepemilikan antara kaum kapitalis dengan kaum sosialis. Ekonomi kapitalis menganggap bahwa satu-satunya hak kepemilikan yang diakui adalah hak kepemilikan individu, sementara itu kaum sosialis menganggap bahwa hak kepemilikan yang sah adalah hak kepemilikan negara. Penganut sosialis meyakini bahwa hak kepemilikan tidak hanya menyangkut masalah sosial dan kapitalis. Di negara berkembang hak kepemilikan berhubungan dengan hal yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi, demokrasi, politik dan kebebasan ekonomi individu dan persoalan lingkungan (Prasad; 2003). Oleh karena itu nilai-nilai sosial kemasyarakatan, perkembangan politik terkadang menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang.

Kajian tentang ekonomi kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar (Rachbini, 2001).

Hal ini dikarenakan dalam konteks ekonomi, kelembagaan merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi. Kelemahan dan kekuatan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat langsung dari keberadaan institusi ekonomi dan politik yang mendasarinya. Ketika perekonomian hanya didasarkan pada kelembagaan formal, maka dikhawatirkan terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian. Oleh karena itu, saat ini masyarakat perlu mengembangkan ekonomi kelembagaan, sebab baik buruknya sistem ekonomi dan politik di masyarakat sangat tergantung pada kelembagaan yang mbingkainya.

Munculnya ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*) menjadi perhatian khusus para ekonom. Ide tentang ekonomi kelembagaan baru muncul melalui berbagai kajian para tokoh ekonomi yang diawali sekitar tahun 1930-an. Beragam pemikiran yang mereka kemukakan pada saat itu berbeda antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Beragam pemikiran dan hasil perdebatan para ekonom tersebut kemudian akhirnya memberikan pemaknaan yang sama tentang ekonomi kelembagaan baru (Yustika, 2006;39). Ekonomi kelembagaan baru secara garis besar merupakan upaya untuk menjawab permasalahan yang tidak mampu dipecahkan ekonomi kelembagaan lama sekaligus sebagai upaya pengembangan ide ekonomi neoklasik (*neoclassical economics*).

Antithesa untuk ideologi Keynes yang dianggap sampai saat ini masih menjadi dominan mempengaruhi perekonomian di dunia adalah sebagai dampak dari perkembangan yang sangat pesat dalam pemikiran ilmu ekonomi. Aliran ekonomi kelembagaan merupakan aliran pemikiran ekonomi yang lahir dari rasa tidak puas terhadap pemikiran Adam Smith. Salah satu contoh kegagalan aliran klasik dan neo klasik adalah masalah depresi yang terjadi sekitar tahun 1930-an dinilai tidak dapat di selesaikan oleh resep dari klasik dan neo klasik di Indonesia aliran ini belum menjadi ideologi dominan, pembelajaran mengenai pemikiran ekonomi lebih banyak mengarah pada *new classic* dan *Keynesian*. Para penganut ekonomi kelembagaan baru memberikan pendekatan yang berbeda dalam melihat penyebab kesejahteraan suatu negara. Aliran klasik berpandangan bahwa kesejahteraan suatu negara dilihat

dari indikator banyaknya modal yang dimiliki suatu negara, perdagangan internasional yang bebas dan membuat divisi terhadap para pekerja. Dengan kata lain kesejahteraan suatu negara sangat ditentukan dari banyaknya sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas. Kenyataannya tidak semua negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik lantas mencapai kesejahteraan. Selanjutnya pada aras yang berbeda Yeager (1999) mengemukakan beberapa negara seperti Polandia, Rusia dan Korea Selatan yang memiliki tingkat pendidikan yang baik justru tertinggal oleh Jepang, Jerman dan Kanada. Beberapa indikator kesejahteraan suatu negara belum mampu dirasakan oleh semua masyarakat sehingga menurut aliran ekonomi kelembagaan baru ada persoalan kelembagaan yang membuat kesejahteraan suatu negara belum tercapai sampai saat ini.

Pada aras yang berbeda, aliran ekonomi kelembagaan baru menggunakan asumsi neo klasik tentang kelangkaan dan kompetisi dalam persaingan sempurna tetapi menolak perilaku rasional manusia. Selain itu para pengikut ekonomi kelembagaan baru melakukan kajian mendalam tentang faktor non ekonomi yang membuat *market failure*. Menurut ekonomi kelembagaan baru kegagalan pasar disebabkan karena aktivitas ekonomi diserahkan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan lembaga pemerintah sehingga pengalaman 1930-an memberikan pelajaran bahwa mekanisme kelembagaan dibutuhkan untuk menghindari kegagalan pasar. Kegagalan kelembagaan tersebut menurut Bardhan (1989) merujuk kepada struktur kontrak dan hukum, serta regulasi dari penegakan pihak ketiga (*rules of third party enforcement*) yang lemah, padahal semua itu harus diperkuat untuk menjalankan transaksi pasar (Yustika, 2006). Pada satu titik tertentu akan terjadi kegagalan pasar jika semua aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Gagalnya hukum Say yang berakibat over produksi karena tidak diikuti dengan permintaan membuat pengangguran besar-besaran karena para produsen mengalami kerugian akibat over produksi.

2.1.6 Konsep Pembangunan Ekonomi: Perspektif Gender dan Ekonomi Keluarga

Dua teori pembangunan yang pernah mewarnai Indonesia diantaranya adalah teori Harrod-Domar, yang meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tabungan dan investasi serta teori Rostow, tentang lima tahap pembangunan. Akibatnya, muncul paradigma pembangunan yang diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat dibidang ekonomi (Budiman, 2000). Hasilnya, sebagian masyarakat semakin tidak berdaya. Di mana hasil pembangunan hanya dapat merubah kehidupan kelompok masyarakat elit lokal, regional maupun nasional menjadi semakin baik. Akan tetapi, sebagian besar perempuan belum merasakan hasil pembangunan, bahkan kelompok masyarakat tersebut menjadi korban dari kegiatan pembangunan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pembangunan yang belum terdistribusi secara fungsional. Prinsip keadilan pun belum ditegakkan sebagai pondasi dalam menjalankan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya untuk melibatkan seluruh masyarakat sebagai aktor penggerak pembangunan, sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh akses terhadap sumberdaya serta menerima manfaat dari hasil pembangunan secara adil.

Berangkat dari kegagalan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, perencanaan pembangunan merealisasikan gagasan pembangunan masyarakat (*putting people the first*). Asumsi yang dibangun dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat melihat komunitas sebagai unit kerja. Semua kegiatan pembangunan didasarkan pada prakarsa lokal, sumber daya lokal dan kepemimpinan lokal. Orientasi pembangunan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi tidak terabaikan, tetapi masyarakat diberi kebebasan berinisiatif dan berpartisipasi. Oleh karena itu perlu kiranya menerapkan konsep pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Mengingat, berbagai pelaksanaan pembangunan di Indonesia belum terintegrasi serta masih terkesan parsial. Tujuan yang hendak dicapai adalah peningkatan produktivitas perekonomian masyarakat, memperbaiki kualitas

hidup masyarakat, serta memperkuat kemandirian masyarakat. Pada aras ini perlu diciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Keberhasilan pembangunan bukan hanya berdasar pada distribusi ekonomi, tetapi lebih dilihat dari keadilan struktural, sosial maupun individual. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasuanto (2005:6) bahwa keadilan sosial bukan sekedar masalah distribusi ekonomi saja, melainkan jauh lebih luas, mencakup keseluruhan dimensi moral dalam penataan politik, ekonomi, dan semua aspek kemasyarakatan. Bahkan, Rawls (2006;3) menjelaskan bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi. Meskipun keadilan bersifat abstrak, tetapi memiliki tujuan yang jelas yaitu memberikan dasar bagi kerjasama sosial masyarakat. Hal ini seiring dengan perbedaan kepentingan dan panutan nilai hidup.

Titik tekan teori keadilan yang dikembangkan oleh Rawls pada dasarnya hendak mengatasi dua hal: 1) *utilitarianisme*, dan 2) menyelesaikan *kontraversi* mengenai dilema antara kemerdekaan (*liberty*) dan kesamaan (*equality*) yang selama ini dianggap tidak mungkin disatukan. Dalam konteks pembangunan yang berperspektif keadilan gender diperlukan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta menjamin kesepakatan yang sama bagi masyarakat untuk mengakses sumberdaya yang ada supaya peran perempuan dan laki-laki dalam pembangunan dijalankan secara fungsional maupun proporsional, sehingga terjadi struktur gender yang berkeadilan.

Berbagai proses dan pelaksanaan pembangunan cenderung bias terhadap laki-laki, serta mengabaikan peran perempuan. Akibatnya perempuan memiliki akses yang cukup rendah dibandingkan laki-laki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Minimnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan akibat struktur sosial dan pengaruh institusi masyarakat maupun negara berdampak langsung pada kemampuan perempuan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan, sehingga manfaat dari hasil pembangunan pun belum diterima secara adil dan fungsional oleh perempuan.

Bertolak dari pemikiran di atas maka, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat hasil pembangunan bagi laki-laki maupun perempuan dapat dilihat dari kebijakan yang telah dirumuskan dalam kegiatan pembangunan. Mengingat, bahwa norma sosial berpotensi membentuk kewenangan atas kepemilikan sumberdaya berdasarkan jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan ungkapan Irianto (2004:62) bahwa perlunya perhatian terhadap masalah akses perempuan dan laki-laki kepada penguasaan dan pengelolaan sumberdaya, karena kesetaraan dan keadilan gender merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia. Selanjutnya perlu adanya langkah aktif yang merupakan tindakan konkret untuk memperbaiki bentuk diskriminasi gender dalam rumah tangga dan masyarakat.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur perlu menekankan prinsip keadilan. Di mana laki-laki dan perempuan mendapatkan kewenangan atas sumberdaya produktif secara proporsional berdasarkan pada kesetaraan hak, kesempatan selaku penerima, maupun pemanfaat hasil pembangunan. Hal itu merupakan langkah strategis dalam memberikan hak dasar yang lebih adil kepada laki-laki dan perempuan serta menghindari ketimpangan dalam masyarakat. Sehingga konsep yang disebut sebagai pengarusutamaan gender itu harus dilakukan.

Fakih (1996:35) menegaskan, bahwa ketidakadilan atau ketimpangan gender disebabkan karena perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat secara biologis (*nature*) tetapi lebih dilihat dari kepribadian yang ditentukan masyarakat (*nurture*), sehingga secara situasional perempuan dianggap sebagai makhluk lemah dan kurang mampu memenuhi kebutuhannya, laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih mampu. Di bawah ini merupakan ulasan para pakar yang menggali akar historis dan struktural dari ketidakadilan gender sebagai berikut:

- Pertama*, adanya dikotomi maskulin/ feminim peranan manusia sebagai akibat dari determinisme biologis, seringkali mengakibatkan marginalisasi wanita;
- Kedua*, adanya dikotomi peran publik/ peran domestik yang berakar dari syndrome bahwa peran wanita adalah di rumah pada gilirannya melestarikan pembagian antara fungsi produktif dan fungsi reproduktif antara pria dan wanita;

Ketiga, adanya konsep beban kerja ganda yang melestarikan wawasan bahwa tugas wanita terutama adalah di rumah sebagai ibu rumah tangga, cenderung menghalangi proses aktualisasi potensi wanita secara utuh; dan

Keempat, yaitu adanya syndrome subordinasi dan peran marginal wanita telah melestarikan wawasan bahwa peran dan fungsi wanita dalam masyarakat adalah bersifat sekunder (Tjokrowinoto, 2004:59).

Dalam konteks ini teori feminis berupaya mengkaji adanya ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Fakih (2006:145), bahwa sebagai sekumpulan pemikiran, teori feminis berangkat dari kesadaran, asumsi, dan kepedulian terhadap ketidakadilan, ketimpangan, penindasan terhadap kaum perempuan, serta merupakan gerakan untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi. Oleh sebab itulah analisis gender digunakan untuk menemukan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender dalam proses pembangunan menuju tatanan masyarakat yang lebih dinamis.

Paparan di atas menggambarkan, bahwa paradigma sosial budaya menghasilkan pelabelan sosial pada laki-laki maupun perempuan dan menyebabkan ketimpangan gender. Walaupun demikian paradigma tersebut dapat diubah melalui gerakan sosial menuju masyarakat yang lebih swatata. Struktur masyarakat yang selama ini timpang dan membelenggu masyarakat perlu diperbaiki menjadi tatanan masyarakat yang lebih adil. Untuk itu kreteria utama atas kewenangan bukan berdasarkan pada jenis kelamin melainkan diukur dari produktifitas kerja dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Telah dijelaskan pada bagian awal, bahwa ketidakadilan gender merupakan akar penyebab kemiskinan dan menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Namun, secara kebetulan perempuan menjadi “korban utama” kemiskinan. Mengingat pembangunan berlangsung di dalam lingkungan yang terbentuk dari adat istiadat, norma sosial, serta struktur formal maupun struktur sosial masyarakat. Akan tetapi secara kebetulan perempuan ditempatkan pada posisi tersubordinat, dimana gerak mereka dibatasi oleh norma masyarakat. Dibandingkan laki-laki, perempuan lebih sedikit memiliki kekuasaan atas sumberdaya produktif. Akibatnya, kemampuan

perempuan untuk mempengaruhi keputusan dalam mengakses sumber kehidupannya pun terbatas.

Selain itu ketidakadilan gender dalam pembangunan membatasi kemampuan perempuan untuk memanfaatkan hasil pembangunan, sehingga menyebabkan perempuan semakin terpuruk. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi keputusan rumah tangga. Hal itu memberikan dampak yang cukup besar terhadap investasi anak dan kesejahteraan rumah tangga. Artinya, kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan analisa kuantitatif. Akan tetapi analisa kualitatif akan lebih mampu memberikan gambaran yang representatif dan akurat.

Namun, disisi lain realitas sosial menunjukkan bahwa terdapat kekuatan tersembunyi yang dimiliki perempuan. Di mana perempuan memiliki peran sebagai penyangga ekonomi keluarga yang cukup signifikan (Darmawan dan Kartika dalam Sunartiningsih, 2004:144). Untuk itu perlu kecermatan bahwa terdapat signifikan peran perempuan maupun laki-laki dalam menanggulangi kemiskinan. Mengingat, kemiskinan dan ketidakadilan gender saling mempengaruhi secara dialektis.

Struktur dan norma sosial merupakan akar masalah terjadinya ketidakadilan gender. Oleh sebab itu, untuk mencapai kesetaraan gender, strategi pembangunan harus mengubah norma sosial menjadi pranata yang lebih adil dan berprinsip pada kesetaraan hak maupun kesempatan. Pemolaan ulang norma sosial berdasarkan keadilan gender yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam program pembangunan perlu dikuatkan atas kesepakatan bersama. Selain itu penguatan kelembagaan dapat berfungsi untuk mengatasi proses fasilitasi perguliran bantuan modal guna menjaga kelestarian program pembangunan. Hal ini senada dengan pernyataan Sulistiyani (2004:77), bahwa program pemberdayaan *feasible* untuk dilestarikan jika didukung oleh organisasi pengelola yang memiliki kedudukan dan status hukum yang kuat, aturan main yang baik, dan pengelola yang memiliki kemampuan manajerial yang memadai dan terdapat dana operasional yang memadai pula. Selain itu, legalitas lembaga pengelola program pemberdayaan menjadi kebutuhan penting dan berfungsi menjaga keberlanjutan kepengurusan

kegiatan pembangunan dan kelestarian dana yang telah digulirkan kepada masyarakat sebagai bantuan modal usaha.

Lain halnya dengan Mahardika (2006:78) yang tidak melihat penguatan kelembagaan dari kelestarian dana, tetapi lebih melihat dari efektifitas kelembagaan untuk meningkatkan nilai tawar masyarakat. Menurutnya salah satu faktor yang memastikan perubahan sosial akan berjalan pada rel yang benar adalah kekuatan organisasi rakyat yang dipadu oleh kepemimpinan dan garis politik yang memihak pada rakyat. Kekuatan yang terhimpun dalam sebuah lembaga akan memperkuat nilai tawar masyarakat, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat disalurkan dengan cepat dan tepat. Selain itu kelembagaan masyarakat juga mempengaruhi sumberdaya yang dapat diakses oleh laki-laki maupun perempuan.

Terdapat dua aspek yang melingkupi kelembagaan masyarakat, antara lain: *pertama* adalah norma, yaitu hal-hal yang lebih bersifat abstrak dalam dimensi kelembagaan. Dimana kekuatan norma dihimpun dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini Sugiyanto (2002:27) mengatakan, bahwa suatu kelembagaan terbentuk akibat dari berbagai aktifitas manusia yang selalu diulang-ulang dalam rangka memenuhi kebutuhan kelompok.

Kedua, aspek struktural. Di mana kelembagaan telah memiliki wujud (organisasi). Pada tahap ini kekuatan norma telah diwujudkan secara konkrit berbentuk aturan yang mengikat. Untuk itu, program pemberdayaan memerlukan format organisasi yang mampu menyampaikan informasi secara cepat, tepat dan mampu mengartikulasikan secara cerdas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat (Amien, 2005:219). Pentingnya organisasi, didasari oleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat berada pada kondisi tidak berdaya, sehingga perlu wahana untuk melindungi sekaligus meningkatkan kapasitas "*bargaining*" masyarakat lemah. Paparan diatas menegaskan bahwa kelembagaan merupakan titik strategis dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat. Terutama menjaga keberlanjutan dana yang bergulir di masyarakat dan menyalurkan aspirasi yang selama ini dibelenggu oleh budaya.

Selain penguatan lembaga seperti diungkapkan alenia di atas, pendanaan merupakan unsur yang krusial untuk menjaga kelestarian program pemberdayaan. Walaupun merupakan masalah klasik, akan tetapi juga merupakan faktor utama yang harus mendapat perhatian serius. Untuk itu, bantuan dana diberikan secara bergulir sebagai modal usaha. Agar masyarakat dapat mengelola dana bersama-sama. Sebagaimana dikatakan oleh Sulistiyani (2004:75), bahwa selain mengubah kondisi yang timpang dalam kehidupan masyarakat, pemberdayaan juga memberi kesempatan kelompok miskin untuk mengelola dana yang berasal dari pemerintah maupun dari sumber lainnya sebagai penopang pelaksanaan pembangunan. Menurutnya kondisi inilah yang membedakan antara partisipasi dengan pemberdayaan masyarakat.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perguliran dana adalah, proses pemberian bantuan modal tidak menyebabkan masyarakat tergantung. Akan tetapi dapat menjadi alternatif pemecahan masalah terkait aspek permodalan yang sulit diakses masyarakat lemah. Untuk itu, perlu fase-fase pengelolaan ke arah tercapainya penguatan usaha ekonomi produktif. Mengingat *revolving fund* merupakan tajuk program. Selain sebagai stimulus modal, bantuan modal juga dapat menjadi indikator penentu keberlanjutan program pembangunan yang dikembangkan masyarakat secara bergulir, dengan berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Sulistiyani (2004:160) bahwa implementasi program pemberdayaan dinilai berhasil apabila mampu mencapai fase-fase sebagai berikut: 1) Fase penyerapan. Dimana kapasitas dan efisiensi pokmas dalam menyerap dana melalui ekonomi produktif, dengan melihat aspek diversifikasi usaha maupun segi potensi setempat. 2) Fase pengembangan, mencakup dua hal yaitu pengembangan usaha dan pengembangan modal bergulir. 3) Fase perguliran, yaitu jangka waktu yang diperlukan oleh pokmas untuk dapat mandiri, sehingga dana dapat dialihkan kepada pokmas yang telah masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*). 4) Fase pelestarian, yaitu kemampuan organisasi pelaksana lokal dalam manajemen, memonitor dan mengevaluasi program pemberdayaan yang telah berjalan.

Bantuan dana dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Untuk itu perlu konsep ekonomi kerakyatan yang direalisasikan dalam program pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mubyanto dalam Rintuh dan Miar (2005:4) bahwa, sistem ekonomi rakyat adalah system ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Artinya sistem perekonomian dilakukan rakyat tanpa modal besar, dikelola dengan cara swadaya, bersifat mandiri sesuai dengan kearifan lokal masyarakat, serta dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan dapat dihapus dengan cara memberi ruang gerak yang adil dan proporsional antara laki-laki dan perempuan melalui peningkatan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi dapat memperbaiki kualitas kaum miskin. Upaya ini dilakukan dengan pemikiran bahwa, akses dan pengendalian pendapatan sangat terkait dengan otonomi maupun kewenangan untuk mengelola sumberdaya. Sebagaimana dikatakan Friedmann dalam Zubaidi (2007: 283) bahwa “*The one who brings home the bacon also has authority, greater attributions, and greater freedom of action*”. Selain itu, pembangunan ekonomi menciptakan intensif dan peluang yang dapat menghapus pemilahan gender, sebab peran ekonomi memungkinkan perempuan berpartisipasi pada pasar ekonomi (tidak dikala resesi ekonomi saja) dan laki-laki dapat berbagi peran dalam urusan domestik. Dikatakan juga oleh Mikkelsen (2003:204) bahwa untuk memahami kemiskinan mempunyai dimensi gender, maka diperlukan upaya untuk membahas sektor informal dan sektor ekonomi yang tidak dibayar dimana wanita secara tradisional memegang peran utama.

Membangun ekonomi merupakan salah satu konduktor yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat. Perempuan akan mendapat peluang berpartisipasi setara dengan laki-laki melalui peran ekonomi. Dengan demikian peningkatan penghasilan laki-laki maupun perempuan secara langsung memberikan peluang dalam peningkatan kesejahteraan dirinya maupun keluarga. Mengingat dalam sistem ekonomi terdapat perangkat aturan yang mempengaruhi keputusan konsumsi, investasi, pekerjaan dan reproduktif.

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu melakukan proses interaksi dengan orang lain. Oleh sebab itu program pemberdayaan pun dilakukan secara kolektif terhadap sekelompok masyarakat. Pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara individual. Sehingga peran perempuan akan sangat penting untuk dikembangkan, meskipun pelabelan yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan akibat konstruksi sosial budaya, telah melanggengkan ketidakadilan gender.

Kesuksesan program pengentasan kemiskinan ditentukan oleh keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan secara bersama-sama. Karena tujuan manusia berkelompok adalah mencapai tujuan bersama. Sehingga, perlu adanya upaya dalam rangka mengidentifikasi kondisi kelompok dari aspek kepemimpinan maupun kohesivitas kelompok pada kegiatan pemberdayaan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan dan melepaskan laki-laki maupun perempuan dari jerat kemiskinan akibat stigma negatif masyarakat.

2.2 Konsep Perempuan (Ibu Rumah Tangga) dan Ekonomi Keluarga

Status adalah jenjang atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau dari satu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran diartikan sebagai suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi atau tugas seseorang. Artinya tindakan status dan peran merupakan dua hal yang saling berkaitan, sehingga ketika orang telah berperan sesuai dengan statusnya maka hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Status menunjuk pada siapa orangnya, sedangkan peran menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang itu.

Pernyataan Corner yang di kutip Mandayanti (2012) menegaskan bahwa hampir di sebagian besar negara menunjukkan bahwa kaum perempuan mempunyai status yang lebih rendah dan kesempatan yang lebih sedikit dari pada laki-laki di hampir semua aspek ekonomi maupun dalam kegiatan sosial. Bahkan sebagian besar penulis feminis menegaskan bahwa secara umum diseluruh dunia kedudukan pria lebih tinggi dari perempuan. Ihromi (2004) memaparkan alasan proposisi bahwa

subordinasi perempuan terhadap laki-laki adalah gejala universal, penyebabnya bukanlah karena sifat biologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki, akan tetapi karena faktor sosial kebudayaan. Artinya adalah kedudukan lebih rendah itu merupakan nilai-nilai yang di tentukan dalam sistem budaya. Status dan peran perempuan dan laki-laki tidak dapat direkayasa melainkan terbentuk karena proses dinamika sosial kemasyarakatan.

Kedudukan maupun status perempuan relatif lebih rendah dari pada kaum laki-laki, pengalaman dibanyak tempat menunjukkan bahwa kaum perempuan memegang peranan penting dalam menjaga maupun mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya. Pada dasarnya status perempuan berdasarkan konsep dapat di jabarkan ke dalam dua tingkat yaitu pada tingkat mikro adalah status perempuan dalam rumah tangga dan tingkat makro adalah status perempuan di masyarakat. Lebih jauh, indikator status perempuan relatif terhadap laki-laki dalam hal memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi maupun produksi, termasuk juga wewenang untuk membuat keputusan mengenai ekonomi rumah tangga. Seorang perempuan dimaksudkan dengan indikator dari status perempuan dalam rumah tangga harus menggambarkan bagaimana kedudukan perempuan relatif terhadap laki-laki dalam hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya sosial (seperti pengetahuan, hak dan kekuasaan) maupun materi (penghasilan, tanah dan makanan). Suatu indikator yang dapat tindakan konvensional dalam menunjukkan status perempuan adalah pendidikan dan pekerjaan. Akses perempuan terhadap sumber daya sosial dapat diukur dari keterlibatan perempuan atau partisipasinya dalam bidang pendidikan sementara akses perempuan terhadap sumber daya materi diindikasikan dengan kegiatannya dalam bidang pekerjaan maupun ekonomi.

Bagi masyarakat Indonesia fenomena perempuan bekerja di luar rumah oleh banyak pihak dianggap sebagai sesuatu yang relatif baru. Kendati dewasa ini fenomena semacam itu berubah menjadi sesuatu yang biasa, namun peran perempuan tidak dinilai cukup sukses bila keberhasilan membangun karir tidak dibarengi

kesuksesan mengelola rumah tangga. Nilai dalam masyarakat Indonesia dewasa ini berbaur antara nilai-nilai tradisional dan modern. Peran pekerjaan dan keluarga bagi laki-laki dan perempuan sedikit berbeda, laki-laki biasanya berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perempuan lebih ke peran keluarga.

Saat ini telah terjadi pergeseran peran dalam keluarga, banyak perempuan dalam keluarga berperan ganda, peran ganda perempuan yang ideal menuntut tugas seorang ibu rumah tangga (orang tua) sekaligus perempuan (wanita) karir. Keseimbangan dalam bentuk peran ganda ini harus diakui merupakan kendala utama bagi perempuan yang bekerja. Banyak alasan perempuan bekerja, selain karena tuntutan akan kebutuhan kehidupan juga karena peningkatan taraf pendidikan kaum perempuan. Peranan ibu rumah tangga dalam keluarga memegang peranan sangat penting. Tuntutan kemandirian ekonomi dalam keluarga mendorong ibu rumah tangga untuk berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

2.2.1 Perempuan (Ibu Rumah Tangga) dalam Konsep Kemandirian Ekonomi

Perempuan perlu kemandirian ekonomi guna menghindari kekerasan, kemandirian secara ekonomi dibutuhkan agar perempuan tidak terus tergantung pada laki-laki baik dalam status orang tua tunggal maupun menjadi istri siri (Elvina; 2013). Pembagian peran di rumah tangga pada umumnya menempatkan laki-laki berada di wilayah publik (mencari nafkah), sementara perempuan berada di wilayah domestik (mengelola rumah tangga dan mengurus anak). Situasi ini merupakan konstruksi sosial yang telah berjalan konstan dan jarang dipertanyakan atau digugat oleh banyak orang. Budaya keluarga yang berlaku umum di negara Indonesia menempatkan seorang laki-laki sebagai penanggungjawab pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu seorang perempuan dalam keluarga selain bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga dan mengurus anak sebagian perempuan juga mempunyai tugas ganda.

Sulaksono (2012) mengemukakan bahwa disadari atau tidak, pembagian peran tersebut dapat melahirkan ketidakseimbangan status ekonomi, sehingga membentuk kecenderungan laki-laki sebagai pemberi dan perempuan sebagai penerima. Lebih jauh, ketidakseimbangan pembagian peran ini kadang dapat menjadi pemicu lahirnya perselisihan yang tak jarang berakhir pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tidak menutup kemungkinan diakibatkan tuntutan-tuntutan ekonomi istri terhadap suami seringkali mengarah pada situasi pertengkaran dan kekerasan. Konstruksi pembagian peran dalam rumah tangga ini secara legal diikat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 (ayat 3), yaitu “suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Penempatan posisi tersebut sebenarnya dapat menjadi justifikasi pembatasan peran perempuan, baik secara struktural maupun kultural di masyarakat.

Peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat semakin lama semakin meningkat diberbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan juga politik. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam setiap bidang sehingga semakin banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan perekonomian. Terkait dengan peran perempuan dalam perekonomian informal lapangan pekerjaan juga banyak tersedia bagi perempuan. Perempuan yang dimasa lajangnya sudah bekerja nampaknya akan terus bekerja meskipun sudah menikah Sihotang (2011). Mereka sebagai ibu rumah tangga terus bekerja dengan berbagai motivasi dan alasan seperti kebutuhan aktualisasi diri dan perlunya membantu ekonomi rumah tangga.

Sebagian perempuan menyatakan persamaan hak sebagai alasan mengapa mereka bekerja. Kerangka emansipasi perempuan telah dijadikan sebagian istri bekerja menganggap bahwa peranan mereka dalam pembangunan bangsa dan negara tidaklah optimal kalau hanya sebagai ibu rumah. Secara umum alasan perempuan bekerja adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Keadaan perekonomian yang semakin tidak menentu, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pendapatan keluarga yang cenderung tidak meningkat akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Pentingnya arti pekerjaan sebagai

sumber penghasilan bagi keluarga membuat istri bekerja memberikan persepsi yang positif terhadap pekerjaannya. Oleh karenanya, istri bekerja cenderung memahami liku-liku pekerjaannya.

2.2.2 Perempuan (Ibu Rumah Tangga) Bekerja

Bekerja merupakan aktivitas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Motivasi merupakan proses pemberian dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Adanya motivasi kerja disertai dengan tersedianya kesempatan kerja di sektor informal selanjutnya mendorong seseorang untuk menentukan keputusan kerja yang merupakan suatu keputusan yang mendasar tentang bagaimana menghabiskan waktu, misalnya dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau bekerja. Pada umumnya motivasi kerja kebanyakan tenaga kerja perempuan adalah membantu kehidupan keluarga. Akan tetapi, motivasi itu juga mempunyai makna khusus karena memungkinkan memiliki otonomi keuangan, agar tidak selalu bergantung pada pendapatan suami.

Peranan perempuan dalam keluarga membawa perubahan pada alokasi pendapatan keluarga, di mana adanya peran ganda perempuan yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di sektor formal maupun di sektor informal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Syahrudin dalam Mandayanti (2012;43) mengatakan bahwa keputusan seorang ibu untuk masuk tenaga kerja atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memberikan untuk mengambil keputusan secara bebas, faktor-faktor tersebut antara lain tersedianya kesempatan kerja, jumlah anak yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, usia serta keadaan sosial budaya. Keterlibatan perempuan dalam meningkatkan pendapatan, baik di sektor formal maupun di sektor informal hendaknya, tidak mengurangi tugas-tugas kaum perempuan dalam rumah

tangga dan masyarakat. Perempuan dalam melakukan peran gandanya di keluarga menghadapi tugas yang tidak ringan. Oleh karena itu peran ganda tersebut tetap dipertahankan agar dapat meningkatkan harkat dan martabat perempuan itu sendiri serta keluarganya.

Kedudukan perempuan dalam rumah tangga memiliki peran ganda. Selain berperan sebagai istri, perempuan juga berperan sebagai ibu rumah tangga, artinya perempuan yang mengatur berbagai macam urusan rumah tangga. Motivasi perempuan untuk bekerja disebabkan beberapa faktor diantaranya; suami tidak bekerja, pendapatan rumah tangga rendah sedangkan jumlah tanggungan keluarga cukup tinggi, mengisi waktu luang, ingin mencari uang sendiri dan ingin mencari pengalaman (Dewi, 2012). Keluarga dengan tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya bergantung pada penghasilan suami, mereka harus berpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Disamping alasan untuk menambah penghasilan suami perempuan juga tertarik bekerja di sektor informal sebagai pedagang karena ingin mempunyai penghasilan sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada suami. Dengan masuk ke sektor informal sebagai pedagang, maka seorang perempuan ibu rumah tangga dapat mengatur waktunya untuk berdagang dan juga untuk keluarganya.

Pendapat yang sama dikemukakan Artini dan Handayani (2009:10) bahwa umumnya perempuan termotivasi bekerja untuk membantu kehidupan keluarga dan umumnya bekerja di sektor informal. Hal ini dilakukan agar dapat membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga. Pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan upah dan atau imbalan (Undang-Undang Ketenagakerjaan, 2003). Selain itu, Pudjianto dan Mukhlis (2006) mengemukakan alasan lain bahwa faktor yang dapat mendorong perempuan bekerja di sektor informal adalah tersediannya lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, salah satu kegiatan usaha sektor informal yang banyak dilakukan adalah usaha dagang. Kesulitan para perempuan untuk masuk ke sektor

formal diakibatkan kebanyakan mereka adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga sangat sulit untuk dapat diterima di sektor formal.

Pada aras yang sama Mandayanti (2012:43) mengungkapkan bahwa beberapa motivasi perempuan bekerja pada sektor informal adalah karena suami tidak bekerja, pendapatan rumah tangga kurang, mengisi waktu luang, ingin mencari uang sendiri dan ingin mencari pengalaman. Beberapa faktor yang memungkinkan perempuan-perempuan Indonesia bergerak leluasa di bidang usaha perdagangan antara lain faktor sosial terdiri atas sub faktor-faktor lingkungan dan faktor adat-istiadat, faktor psikologis serta faktor ekonomis. Faktor lingkungan karena masyarakat di lingkungannya sebagian besar bekerja sebagai pedagang sehingga mendorong seseorang untuk mengikuti usaha mereka. Di samping itu lingkungan tempat tinggal yang berdekatan dengan pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, lembaga pendidikan dan fasilitas umum seperti rumah sakit dan terminal juga mendorong masyarakat untuk menekuni usaha ini. faktor adat istiadat sangat dipengaruhi oleh tradisi dikeluarga seseorang untuk bekerja sebagai pedagang, jika dalam keluarga seseorang tersebut memang mempunyai jiwa berdagang kemungkinan besar anggota keluarga yang lain juga ingin berdagang. Faktor ekonomi tentunya menjadi faktor utama karena hasil dari usaha berdagang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

2.3 Konsepsi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) sebenarnya memiliki arti yang sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Yang menjadikan berbeda jika LKMM merupakan bentukan pemerintah daerah Kabupaten Jember, dengan modal yang dijalankan adalah uang hibah dari pemerintah daerah, sedangkan LKM adalah arti secara umum yang dimiliki setiap perbankan atau lembaga keuangan umum. Dalam berjalannya waktu, *microfinance* banyak dikaitkan dari sudut kelembagaan yang dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola kebijakan (Syaifullah, 2013). Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi

masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Khususnya aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank (UU No. 1 Tahun 2013). Lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan seperti LKMM telah banyak berkembang di Indonesia. Keberadaannya telah banyak membantu kepada masyarakat khususnya masyarakat-masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Perkembangan lembaga ini dalam masyarakat mampu menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro.

Definisi dan konsepsi tentang lembaga keuangan mikro memiliki ketidakseragaman pemikiran pakar, meski pada dasarnya definisi-definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu merujuk keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial (Arsyad, 2008). Di bukunya *microfinance handbook* yang diterbitkan oleh Bank Dunia, Ledgerwood (dalam Arsyad, 2008) menyatakan bahwa istilah keuangan mikro merujuk pada penyediaan jasa-jasa keuangan biasanya berupa simpanan dan kredit kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, penjual jasa, (penata rambut, penarik becak).

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan

ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Lembaga keuangan dapat di kelompokkan dalam tiga jenis yakni; lembaga keuangan formal, lembaga keuangan semi formal dan lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan dikatakan formal jika lembaga tersebut secara operasional diatur dalam Undang-Undang perbankan dan disupervisi oleh bank sentral. Lembaga keuangan semi-formal adalah lembaga keuangan yang tidak diatur dalam Undang-undang, tetapi disupervisi dan diregulasi oleh agen pemerintah maupun bank sentral. LKM beroperasi di luar regulasi dan supervisi lembaga pemerintah. LKM bukan sekedar menyediakan uang (*cash*) untuk keperluan transaksi, tetapi kadang-kadang menyediakan pinjaman dalam bentuk barang (*in-kind*) (Yustika, 2006). Karakter yang fleksibel, membuat LKM memiliki daya tahan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan, karena LKM ini bersifat sangat fleksibel dalam artian memiliki hubungan personal antara kreditor dan debitor yang hampir tidak membutuhkan persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Tidak ada kontrak maupun persyaratan sejumlah agunan seperti pada lembaga keuangan formal.

Lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam yang ada dalam masyarakat pada skala mikro mempunyai bentuk yang bermacam-macam yang dikelompokkan menjadi dua (Mashudi, 2003) yaitu; 1) LKM bank terdiri dari BRI Unit, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Danamon simpan pinjam yang saat ini mulai masuk ke masyarakat pedesaan, 2) LKM bukan bank yang terdiri dari; lembaga keuangan formal diantaranya adalah koperasi simpan pinjam dan lembaga non formal antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok swadaya masyarakat (unit ekonomi desa). Keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut kemudian berkembang seiring dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang baru seperti; lembaga keuangan mikro masyarakat, koperasi wanita dan lain sebagainya. Dibentuknya lembaga-lembaga keuangan mikro masyarakat tersebut

seiring dengan tujuan dan upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin khususnya perempuan.

Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya Bank Umum. Ciri penting yang membedakan antara lembaga keuangan formal dan semi formal adalah pada tipe kesepakatan yang dibuat dalam bentuk sistem kontrak (*contract system*) antara masyarakat peminjam (debitur) dan lembaga keuangan (kreditur). Kontrak tersebut berisi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, misalnya persyaratan agunan (*collateral*), model pembayaran (*repayment*), dan sanksi (*punishment*) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat. Sebaliknya, lembaga keuangan informal bersifat sangat fleksibel, hubungan antara kreditor dan debitor seringkali personal, dan hampir tidak ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Mekanisme pemberian kredit sama sekali tidak menggunakan sistem kontrak, karena tidak ada persyaratan agunan maupun sanksi. Karakteristik lembaga keuangan informal pada umumnya lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Menurut Kasryno (1984:33), kelembagaan kredit informal sangat berkembang dalam masyarakat perdesaan akibat belum terjangkaunya pelayanan kredit dari lembaga keuangan formal (bank) bagi sebagian sebagian besar masyarakat perdesaan dan golongan masyarakat menengah ke bawah, terutama petani kecil, buruh tani dan pedagang kecil yang selalu memerlukan kredit dengan pelayanan yang terjangkau oleh mereka.

Lembaga Keuangan Mikro sebagai sebuah institusi sudah membuktikan dirinya sebagai institusi yang menopang kehidupan usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah umumnya. Bahkan pada situasi-situasi sulitpun LKM telah menjadi bagian dari strategi survive usaha-usaha mikro, kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Studi-studi dampak krisis yang dilakukan

jurnal Akatiga dan beberapa lembaga lain memperlihatkan bahwa pada masa puncak krisis, ketika keuangan formal tidak berperan, usaha-usaha mikro dan kecil masih dapat bertahan karena dukungan institusi keuangan mikro. Salah satunya ditunjukkan oleh data Primahendra (2001) yang memperlihatkan bahwa ada 78,60 persen industri rumah tangga dan 39,79 persen industri kecil memilih atau terpaksa mengakses kredit dari sumber lain selain bank dan koperasi.

Sebagai sebuah institusi, lembaga keuangan mikro memiliki ciri dan dinamika yang spesifik. Lembaga muncul, tumbuh, dan berkembang fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang membutuhkannya. Pengetahuan dan pemahaman LKM yang sangat baik terhadap kelompok/komunitas sasarannya menjadi salah satu faktor yang membuat mereka dapat bertahan sampai dengan saat ini. Faktor-faktor lain sebagai pendorong dan penghambat peran institusi keuangan mikro dalam aktivitas ekonomi mikro diharapkan dapat menjadi bahan untuk menjaga institusi keuangan mikro dari berbagai perhatian berupa kebijakan dan non-kebijakan yang akan menghambat atau bahkan mematikan institusi keuangan mikro itu sendiri.

Pemahaman terkait konteks aktivitas keuangan mikro, institusi dipahami sebagai norma, sistem, dan tingkah laku yang ada pada pelaku-pelaku yang memiliki kepentingan dengan aktivitas keuangan mikro. Pelaku-pelaku tersebut mempertahankan norma dan aturan di dalamnya untuk kepentingan keberlanjutan institusi, termasuk kepentingannya. Pengertian institusi ini yang lebih dominan mengawali kemunculan institusi keuangan mikro di Indonesia, khususnya pada masa sebelum kemerdekaan. Saat itu, hampir tidak ada lembaga keuangan formal yang dikenal masyarakat. Keberadaan institusi keuangan pada saat itu dikenal masyarakat dan keberlanjutannya juga dipelihara masyarakat. Dengan kata lain institusi keuangan mikro dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat tanpa intervensi pihak luar. Kebanyakan institusi keuangan mikro dibangun dalam konteks pemenuhan kebutuhan-kebutuhan cepat, mendesak, dan income generating untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok sasarannya.

Institusi keuangan mikro memiliki dimensi pemerataan yang tumbuh dari bawah dan mengandalkan kekuatan sendiri. Pada sisi tertentu institusi keuangan mikro dipandang juga sebagai bagian dari basis penguatan masyarakat di tingkat lokal yang sering kali tidak dapat terlihat potensinya oleh kekuatan sistem ekonomi formal yang lebih besar (makro). Penguatan yang dilakukan institusi keuangan mikro di tingkat lokal juga seringkali dicirikan dengan proses tatap muka cukup intensif-saling mengenal, saling percaya, kepentingan atau kebutuhan yang relatif sama yang memunculkan hubungan timbal balik di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Hubungan tersebut dipercaya dapat menjadi kemampuan potensial untuk melakukan tindakan bersama (kolektif) demi kepentingan bersama (kolegial) (Primahendra, 2001).

Pada perkembangan selanjutnya sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat, institusi keuangan mengalami pergeseran peranan dan format atau bentuk. Meskipun di tingkat fakta sulit membedakan secara tegas pergeseran atau perubahan format yang terjadi. Pada akhirnya penggunaan istilah institusi dan lembaga seringkali bergantian. Institusi keuangan mikro berkembang dengan berbagai variasi diri. Institusi keuangan berkembang ke arah format yang lebih formal dalam bentuk lembaga atau organisasi keuangan, di dalamnya berkembang proses pengorganisasian dari nilai-nilai bersama yang kemudian dibakukan sebagai aturan bersama. Konteks ini menjelaskan bahwa kelompok sasaran atau anggota baru mengikuti aturan main cenderung lebih formal yang ada tanpa memiliki peluang untuk mempengaruhi aturan main.

Berdasarkan hasil penelitian yang dirangkum dalam buku Ekonomi Rakyat, variasi lembaga keuangan mikro yang muncul dari format informal sampai format yang sangat formal di antaranya adalah *revolving fund*, Karya Usaha Mandiri (KUM), koperasi, Baitul Maal Wal Tamwil (BMT), Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan juga LKMM atau sering disebut Bank Gakin. Tercatat bahwa dorongan perubahan format LKM dari informal menjadi formal dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal di antaranya kebijakan organisasi/lembaga untuk

menyesuaikan diri dengan luasan cakupan/jangkauan kelompok sasaran yang semakin luas. Sementara faktor eksternal berupa dorongan dari peraturan pemerintah tertentu yang mengharuskan perubahan format. Perubahan format ini kemudian menciptakan dinamika tersendiri pada keberadaan LKM selanjutnya.

Keberadaan *microfinance* di banyak negara, utamanya di negara-negara berkembang memiliki peran dan dampak begitu besar dalam mendorong perubahan ekonomi masyarakat. Hal ini didasari oleh kemampuan *microfinance* yang mereproduksi kemanfaatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan terjadinya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai keberadaan dan efektifitas lembaga keuangan mikro telah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wijono (2005), Wardoyo & Prabowo (2006), Sukarno dan Damayanti (2007), Indrianti (2011) dan Harmar (2007). Dalam beberapa penelitian itu dapat ditarik menjadi sebuah garis besar, akan pentingnya ketegasan dalam pengambilan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah guna menurunkan angka kemiskinan didaerahnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Harmar (2007) dapat diketahui bahwa kegiatan simpan pinjam perempuan menjadi model baru pemberdayaan. Di mana kelompok perempuan pedesaan belajar mengelola modal atau keuangan bersama dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Kegiatan simpan pinjam dilakukan secara bergulir. Hasilnya tingkat kesejahteraan dapat meningkat. Namun dalam program ini pemerintah secara tegas memberikan pengawalan, sehingga implementasi program itu berjalan baik.

Penelitian lain dilakukan oleh Sukarno dan Damayanti (2012) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Gakin sebagai suatu lembaga pembiayaan sudah sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan, nilai yang diperoleh

selalu meningkat atau mengalami perubahan positif dari periode ke periode. Nilai rasio Bank Gakin juga telah mampu memenuhi standar kinerja lembaga keuangan mikro yang dikeluarkan oleh IFAD. Bank Gakin sebagai lembaga pembiayaan mikro telah mampu mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.

Berdasarkan perkembangan jumlah kantor cabang, jumlah peminjam, dan jumlah total pinjaman mulai Januari hingga Desember 2007 selalu menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini sebagai akibat dari bunga yang ditawarkan Bank Gakin sangat ringan dan tidak memberatkan masyarakat miskin. Selain itu, syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman juga sangat mudah serta pelayanannya yang memuaskan. Bank Gakin telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta keberadaan Bank Gakin sangat diperlukan bagi masyarakat. Bank Gakin juga mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Sebagian besar anggota Bank Gakin merasa sangat terbantu dengan adanya Bank Gakin, karena sejak adanya Bank Gakin memudahkan masyarakat miskin untuk mendapatkan pinjaman modal untuk usaha. Kebutuhan pembiayaan masyarakat miskin terhadap modal usaha dapat terpenuhi. Berikut ini adalah tabel hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1, Hasil Penelitian Sebelumnya

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL
1	Wardoyo dan Prabowo (2006)	Kinerja LKM dalam upaya untuk penguatan UMKM di wilayah Jabodetabek	Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mendorong peran LKM belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang maksimal bagi perkembangan UMKM
2	Sukarno dan Damayanti (2012)	Bank Gakin: Telaah Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Di Jember	Keberadaan Bank Gakin (LKMM) sangat membantu masyarakat miskin. Dengan syarat dan prosedur pinjaman yang mudah masyarakat dapat memperoleh modal untuk

			usaha sehingga kehidupan-nya lebih baik.
3	Indrianti (2011)	Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Program Dana Bergulir Gardu Taskin di desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk	Nilai kepatuhan perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki dalam mengelola keuangan, sehingga modal usaha yang disalurkan kepada perempuan dan laki-laki akan memiliki hasil yang berbeda.
4	Harmar (2007)	Meningkatkan Kemandirian Perempuan Melalui Proses Pembelajaran Dalam Hal Pola Pikir, Wawasan Maupun Tindakan Konkrit Untuk Membantu Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga	Kegiatan simpan pinjam perempuan menjadi model baru pemberdayaan. Di mana kelompok perempuan pedesaan belajar mengelola modal atau keuangan bersama dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Kegiatan simpan pinjam dilakukan secara bergulir. Hasilnya tingkat kesejahteraan dapat meningkat.
5	Asadul <i>et.al.</i> (2015)	<i>Does microfinance change informal lending in village economies? Evidence from Bangladesh</i>	pinjaman mikro yang dilakukan masyarakat dengan sistem tanggung renteng memang dapat mengurangi pinjaman kepada rentenir di Bangladesh. Namun pinjaman dengan sistem itu ternyata selama dua dekade yaitu dari tahun 1987 hingga 2008 tidak mampu memunculkan sektor usaha baru.
NO	PENELITI	JUDUL	HASIL
6	Togba (2012)	<i>Microfinance and households access to credit: Evidence from Côte d'Ivoire.</i>	Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa faktor geografis dimana para rumah tangga ini hidup, jenis pekerjaan utama dan juga besaran kredit mikro sangat mempengaruhi keberhasilan dari adanya sistem keuangan mikro itu. Wilayah pertanian dengan kondisi alam pedesaan maka tidak dapat dipaksakan untuk mengubah para ibu rumahtangga menjadikan wirausahawati. Mereka akan lebih banyak membantu suami berkebun dan berladang, yang memang sudah menjadi bagian dari kesehariannya sejak kecil. Sehingga kredit mikro yang harus disalurkan

			adalah kredit pertanian dengan jumlah yang besar dan bunga yang variatif dengan pembayaran disesuaikan dengan musim panen. Sementara daerah perkotaan masih memungkinkan para ibu rumah tangga mengembangkan jiwa wirausaha guna mendukung ekonomi keluarga.
7	Wijesiri et.al. (2014)	<i>Efficiency of microfinance institutions in Sri Lanka: a two-stage double bootstrap DEA approach</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak LKM di Sri Lanka mendapatkan kritik inefisiensi keuangan dan sosial dari masyarakat. Ada tiga penentu signifikan pada efisiensi keuangan yaitu usia peminjam, jenis institusi dan modal.
8	Anderson, et.al. (2002)	<i>Microcredit, Social Capital, and Common Pool Resources</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa kredit mikro dengan sistem tanggung renteng mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan bisa mengedukasi mereka untuk menjadi pengusaha. Sistem ini juga bisa menjadi perekat komunikasi yang akan membuat modal sosial masyarakat akan terjaga.
NO	PENELITI	JUDUL	HASIL
9	Hani, et.al. (2012)	<i>Patterns of Indonesian Women Entrepreneurship</i>	Sebuah survei dikembangkan dan dikelola dengan sampel 102 pengusaha wanita Indonesia. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini dapat dimengerti tentang pola perempuan pengusaha di Indonesia dilihat dari berbagai aspek, seperti jenis utama dari bisnis mereka, kendala utama dan faktor utama pendukungnya. Akibat lainnya adalah kewirausahaan perempuan Indonesia dapat dibagi menjadi empat kelompok dengan karakteristik yang berbeda

10	Okten dan Osili (2004)	<i>Social Networks and Credit Access in Indonesia</i>	Jaringan keluarga dan masyarakat mempengaruhi akses individu ke lembaga kredit. Jaringan keluarga dan jaringan masyarakat memiliki dampak yang besar pada kesadaran pengembalian kredit lembaga keuangan mikro. Menariknya, bangun jaringan antar keluarga itu banyak didominasi karena komunikasi ibu rumah tangganya.
11	Wijono (2005)	Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan	Perkembangan LKM ternyata searah dengan perkembangan UKM sehingga dapat dinyatakan bahwa LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional.

Penelitian Wijono (2005) bertujuan menguraikan peranan LKM dalam menunjang kegiatan UKM, walaupun porsinya sebagai alternatif pembiayaan masih lebih kecil dibandingkan lembaga keuangan formal. Namun hal ini menarik untuk dikaji sebab perkembangan LKM ternyata searah dengan perkembangan UKM sehingga dapat dinyatakan bahwa LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional. Pada aras yang sama studi dilakukan oleh Wardoyo dan Prabowo (2006), tengah menganalisis kinerja LKM dalam upaya untuk penguatan UMKM di wilayah Jabodetabek yang meliputi beberapa variabel, seperti: pencapaian hasil target grup, permodalan, capacity building dan permasalahannya. Dengan analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan hasil yang kurang maksimal bagi perkembangan UMKM. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang relevan dengan laporan keuangan yang ada pada LKM. Rasio keuangan ini berdasarkan usulan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* pada tahun 2000, yang terdiri dari rasio-

rasio kelestarian keuangan pilihan dan indikator-indikator jangkauan. Selain itu, peneliti juga mencoba menggunakan data primer.

Sementara itu penelitian keuangan inklusif berbasis gender yang lain dilakukan oleh Indrianti (2011). Penelitian tentang implementasi pengarusutamaan gender dalam program gardu taskin di desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tersebut telah mengungkapkan bahwa kepatuhan perempuan lebih tinggi dari pada kaum laki-laki. Perempuan lebih menggunakan bantuan pinjaman bergulir untuk kepentingan produktif, sementara laki-laki akan membelanjakan hasil pinjaman untuk keperluan konsumtif seperti untuk membeli rokok dan pergi ke undangan pernikahan.

Penelitian Asadul *et.al* (2015) menyatakan bahwa pinjaman mikro yang dilakukan masyarakat dengan sistem tanggung renteng memang dapat mengurangi pinjaman kepada rentenir. Namun pinjaman dengan sistem itu ternyata selama dua dekade yaitu dari tahun 1987 hingga 2008 tidak mampu memunculkan sektor usaha baru. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Togba (2012). Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa faktor geografis dimana para rumah tangga ini hidup, jenis pekerjaan utama dan juga besaran kredit mikro sangat mempengaruhi keberhasilan dari adanya sistem keuangan mikro itu. Wilayah pertanian dengan kondisi alam pedesaan maka tidak dapat dipaksakan untuk mengubah para ibu rumahtangga menjadikan wirausahawati. Mereka akan lebih banyak membantu suami berkebun dan berladang, yang memang sudah menjadi bagian dari kesehariannya sejak kecil. Sehingga kredit mikro yang harus disalurkan adalah kredit pertanian dengan jumlah yang besar dan bunga yang variatif dengan pembayaran disesuaikan dengan musim panen. Sementara daerah perkotaan masih memungkinkan para ibu rumahtangga mengembangkan jiwa wirausaha guna mendukung ekonomi keluarga.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis atas kondisi yang akan diteliti. Sugiyono (2013:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran dapat meyakinkan ilmuwan, adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun proses berpikir yang membuahkan kesimpulan. Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar objek yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara objek penelitian.

Sementara itu Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research*, 1992 dalam Sugiyono (2013:93) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sugiyono (2013) menjelaskan proses penyusunan kerangka berpikir sebagai berikut: 1) menetapkan variabel yang diteliti; 2) membaca buku dan hasil penelitian; 3) mendeskripsikan teori dan hasil penelitian; 4) analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian; 5) analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian; 6) sintesa kesimpulan; dan 7) kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah pemahaman yang paling mendasar yang mendukung pemahaman selanjutnya. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan Gambar 2.4 tersebut dapat dijelaskan bahwa, dari kondisi eksistensi ekonomi rumah tangga maka akan menimbulkan aktivitas ekonomi skala rumah tangga dan juga bermunculannya lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Aktivitas ekonomi skala rumah tangga itu nanti akan berdampak pada preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro yang ada dimasyarakat, sehingga akan terjadi penyesuaian atas persaingan lembaga keuangan. Beberapa unsur yang mesti akan dilakukan perubahan adalah sistem administrasi, besaran bunga maupun pelayanan dari lembaga keuangan itu. Dari situlah terjadi perubahan pola kelembagaan pada lembaga keuangan mikro yang ada dimasyarakat. Preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro dan perubahan pola kelembagaan pada lembaga keuangan mikro masyarakat itupun saling berhubungan. Kedua unsur menyebabkan terjadinya dinamika pendapatan rumah tangga. Dapat saja pendapatan rumah tangga menjadi menurun setelah meminjam uang atau menjadi naik. Berangkat dari persoalan tersebut maka dapat diketahui konstruksi model preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro masyarakat.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab 3 ini akan diuraikan secara rinci mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro terhadap dinamika pendapatan, studi kasus di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Secara garis besar pembahasan metodologi penelitian ini meliputi pembahasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, desain penelitian, teknik analisa data dan batasan penelitian. Sehingga dengan kajian yang runtut berdasarkan metodologi yang sesuai ini akan menjadikan penelitian semakin mudah dilaksanakan.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu menentukan daerah penelitian secara sengaja karena telah mengetahui ciri-ciri populasinya. Lokasi yang ditetapkan adalah di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Adapun alasan pemilihan lokasi ini, karena peneliti mengetahui populasi yang ada di wilayah ini. Alasan yang kedua, Kecamatan Sumbersari merupakan kecamatan yang memiliki jumlah LKM banyak, dan didukung sebagian masyarakatnya adalah masyarakat kota sehingga menarik untuk diketahui pilihan-pilihan atas lembaga keuangan yang dipinjamnya, sehingga membuat kelembagaan-kelembagaan yang dinamis.

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2014 pada saat turunnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12 tahun 2014 tentang izin usaha dan kelembagaan LKM, hingga bulan Desember 2014 dimana akan ditetapkannya Undang-undang LKM yang mengharuskan semua LKM berbadan hukum. Sehingga dengan kurun waktu 8 bulan itu, penelitian ini memiliki limitasi waktu yang jelas.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Pada

pendekatan kualitatif, Lofland dalam Moleong (2000:157) memaparkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data verbal yang merupakan informasi informan tentang preferensi perempuan pada LKM, serta perubahan pola kelembagaan LKM di Kecamatan Sumbersari.

Data sekunder yang pakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa catatan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember berupa laporan pembukuan koperasi, LKMM dan lembaga keuangan terkait. Data jumlah koperasi dan jumlah LKMM serta kepengurusan LKMM di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi adalah wawancara, FGD, observasi partisipatoris dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaannya disesuaikan dengan pemilihan informan atau subjek penelitian yaitu dengan *snowballing sample*. Metode FGD diterapkan kepada kelompok penerima pinjaman dengan sistem tanggung renteng, yang direkomendasikan oleh informan kunci. Adapun uraian secara singkat teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.3.1. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000:186), menyebutkan bahwa wawancara adalah suatu percakapan secara tatap muka (bertemu langsung dengan yang diwawancarai). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh :

- a. Rekonstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan, dan sebagainya;

- b. Rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu;
- c. Proyeksi keadaan tersebut diharapkan terjadi pada masa yang akan datang dan verifikasi, pengecekan, dan pengembangan informasi yang didapat sebelumnya.

Wawancara dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur atau pertanyaan-pertanyaan yang berurutan. Materi yang dikemukakan dalam wawancara terstruktur tersebut merupakan materi yang lengkap, terencana dan dirancang dengan baik melalui tahapan:

1. Menentukan siapa yang diwawancarai,
2. Mempersiapkan wawancara,
3. Pendahuluan,
4. Melakukan wawancara dan menjaga agar produktif, dan
5. Menghentikan wawancara.

Agar wawancara dapat berhasil dengan baik, peneliti (pewawancara) harus mengikuti aturan-aturan dan kesopanan sebagaimana yang dianut oleh pihak yang diwawancarai, disamping itu pewawancara harus meninggalkan kesan baik dalam pelaksanaan wawancaranya.

3.3.2 Diskusi Kelompok Terarah /*Focus Group Discussion*

Kreuger dalam Moleong (2000) mendefinisikan kelompok fokus sebagai diskusi yang dirancang dengan baik untuk memperoleh persepsi dalam bidang perhatiannya pada lingkungan yang permisif dan yang tidak menekan-nekan. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Dalam

penelitian ini, FGD dilakukan untuk mendukung data hasil wawancara sebelumnya. Bungin (2003:138) menjelaskan ada dua tahapan utama FGD, yaitu :

- a. Tahap Diskusi, dengan melibatkan berbagai anggota FGD yang diperoleh berdasarkan kemampuan dan kompetensi formal serta kompetensi penguasaan masalah FGD.
- b. Tahap Analisis hasil FGD, pada tahap ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap analisis mikro dan tahap analisis makro. Pada tahap analisis mikro, FGD memiliki langkah-langkah analisis sebagai berikut *pertama*; melakukan *coding* terhadap sikap, pendapat peserta yang memiliki kesamaan, *kedua*; menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteks yang berbeda. *ketiga*; menentukan persamaan istilah yang digunakan, *keempat*; melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta FGD berdasarkan alur diskusi, *kelima*; mencari hubungan di antara masing-masing kategorisasi yang ada untuk menentukan bentuk bangunan hasil diskusi atau sikap dan pendapat kelompok terhadap masalah yang didiskusikan (fokus diskusi).

Pada tahap analisis makro, peneliti tidak saja dapat menemukan hubungan antar masing-masing kategorisasi namun juga dapat mengabstraksikan hubungan-hubungan pada tingkat yang lebih substansial. Pihak yang terlibat dalam FGD adalah kelompok penerima kredit dengan sistem tanggung renteng yang berada di kecamatan Sumpalsari.

3.3.3 Observasi

Disamping wawancara dan FGD, peneliti ini juga melakukan metode observasi. Nawawi dan Martini (1994) berpendapat bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian. Untuk melakukan observasi, peneliti dapat menempatkan diri sebagai non partisipan. Selain itu peneliti juga melakukan dengan terus terang (*overt*). Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami

proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan hasil wawancara.

3.3.4 Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa arsip surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik ini memberikan keuntungan dari penggunaan data dari bahan-bahan yang telah tersedia dan siap dipakai. Dokumentasi digunakan untuk mengacu setiap tulisan atau selain rekaman yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, naskah pidato, editorial, catatan kasus, skrip, televisi, foto-foto, sejarah kesehatan dan catatan lain yang dianggap perlu.

Alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah, seperti yang diungkapkan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000: 161), yaitu (1) dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; (2) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; (3) sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks; (4) relatif murah dan mudah diperoleh; (5) tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi; (6) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

3.4 Desain Penelitian

Dalam ungkapan Lincoln dan Guba (1985: 208), kecenderungan rancangan penelitian yang terus-menerus mengalami penyesuaian berdasarkan interaksi antara peneliti dengan konteks ini disebut rancangan membaruh (emergent design). Apalagi dalam penelitian kualitatif yang memiliki model desain yang berbeda dengan penelitian kuantitatif karena memiliki paradigma, proses, metode dan tujuan berbeda. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan desain penelitian dalam tiga

tahap utama yaitu pra penelitian, pelaksanaan penelitian dan pasca penelitian seperti gambar berikut ini:



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahap pra penelitian, peneliti akan melakukan kegiatan perencanaan dengan menyusun rancangan awal penelitian, observasi lapangan guna mengetahui tipologi masyarakat, serta menyiapkan kebutuhan teknis penelitian seperti draf wawancara, alat dokumentasi serta beberapa keperluan lainnya. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian, peneliti sudah berinteraksi dengan subjek penelitian di lapangan. Melakukan kegiatan wawancara, serta melakukan diskusi dengan subjek. Dalam tahap ini, peneliti juga melakukan analisis data atas sumber data yang diwawancarainya, sehingga subjek atau sumber data primer dalam penelitian adalah orang yang tepat. Tidak lupa juga dilakukan croscek atas jawaban subjek tersebut, dengan teknik triangguasi.

Setelah data terkumpul, peneliti selanjutnya memasuki tahap ketiga yaitu tahap pasca penelitian. Disini peneliti diharuskan melakukan analisis data guna menemukan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dalam analisis data ini, peneliti menggunakan metode *Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)* sebagaimana ditulis oleh Smith (2009: 79-107). Dalam teknik *Interpretative Phenomenological Analysis* ini, peneliti akan melakukan beberapa tahap analisis yang diantaranya adalah: 1) *Reading and re-reading*; 2) *Initial noting*; 3) *Developing Emergent themes*; 4) *Searching for connections across emergent themes*; 5) *Moving the next cases*; and 6) *Looking for patterns across cases*. Sedangkan tahap akhir adalah membuat laporan atas temuan dilapangan tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data Kualitatif

Prinsip utama dalam analisis data kualitatif adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interprestasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Kegiatan analisis membutuhkan ketekunan, ketelitian, kesabaran, dan kreativitas yang tinggi dari peneliti supaya mampu menafsirkan dan

menginterpretasikan data secara baik sehingga mampu memberikan makna pada setiap fenomena atau data yang ada. Kegiatan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah data, menata dan menemukan apa yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang preferensi perempuan pada LKM terhadap dinamika pendapatan rumah tangga di Kecamatan Sumbersari

Data dari respon atas bermunculannya LKM yang diteliti dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, diantaranya observasi dan *interview*, baik *interview* mendalam (*in-depth interview*). *In depth* dalam penelitian fenomenologi bermakna mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan satu pemahaman yang mendetail tentang fenomena sosial yang diteliti. *In-depth* juga bermakna menuju pada sesuatu yang mendalam guna mendapatkan *sense* dari yang nampaknya *straight-forward* secara aktual secara potensial lebih *complicated*. Pada sisi lain peneliti juga harus memformulasikan kebenaran peristiwa/ kejadian dengan pewawancara mendalam. ataupun *interview*. Data yang diperoleh dengan *in-depth interview* dapat dianalisis dengan *Interpretative Phenomenological Analysis* sebagaimana ditulis oleh Smith (2009:79-107). Tahap-tahap *Interpretative Phenomenological Analysis* yang dilaksanakan sebagai berikut: 1) *Reading and re-reading*; 2) *Initial noting*; 3) *Developing Emergent themes*; 4) *Searching for connections across emergent themes*; 5) *Moving the next cases*; and 6) *Looking for patterns across cases*. Masing-masing tahap analisis diuraikan sebagai berikut:

1. *Reading and Re-reading*.

Smith (2009) menjelaskan bahwa dengan membaca dan membaca kembali, peneliti dapat menenggelamkan diri dalam data yang original. Bentuk kegiatan tahap ini adalah menuliskan transkrip *interview* dari rekaman audio ke dalam transkrip dalam bentuk tulisan. Rekaman audio yang digunakan oleh peneliti dipandang lebih membantu pendengaran peneliti dari pada transkrip dalam bentuk tulisan. Imaginasi kata-kata dari partisipan ketika dibaca dan dibaca kembali oleh peneliti dari transkrip akan membantu analisis yang lebih komplit.

Tahap ini di laksanakan untuk memberikan keyakinan bahwa partisipan penelitian benar-benar menjadi fokus analisis. Peneliti memulai proses ini dengan anggapan bahwa setiap kata-kata partisipan sangat penting untuk masuk dalam fase analisis dan data berupa kata-kata itu diperlakukan secara aktif. Proses membaca kembali juga memudahkan penilaian mengenai bagaimana hubungan dan kepercayaan yang dibangun antar *interview* dan kemudian memunculkan letak-letak dari bagian-bagian yang kaya dan lebih detail atau sebenarnya kontradiksi.

2. *Initial Noting*

Analisis tahap awal ini sangat mendetail dan mungkin menghabiskan waktu. Tahap ini menguji isi/konten dari kata, kalimat dan bahasa yang digunakan partisipan dalam level eksploratori. Moeryadi (2009) menjelaskan bahwa analisis ini menjaga kelangsungan pemikiran yang terbuka (*open mind*) dan mencatat segala sesuatu yang menarik dalam transkrip. Proses ini menumbuhkan dan membuat sikap yang lebih familier terhadap transkrip data. Selain itu tahap ini juga memulai mengidentifikasi secara spesifik cara-cara partisipan mengatakan tentang sesuatu, memahami dan memikirkan mengenai isu-isu. Tahap 1 dan 2 ini melebur, dalam praktiknya dimulai dengan membuat catatan pada transkrip. Peneliti memulai aktifitas dengan membaca, kemudian membuat catatan eksploratori atau catatan umum yang dapat ditambahkan dengan membaca berikutnya. Moeryadi (2009) menjelaskan bahwa analisis ini hampir sama dengan analisis tekstual bebas. Di sini tidak ada aturan apakah dikomentari atau tanpa persyaratan seperti membagi teks kedalam unit-unit makna dan memberikan komentar-komentar pada masing-masing unit. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan seperangkat catatan dan komentar yang komprehensif dan mendetail mengenai data. Beberapa bagian dari *interview* mengandung data penelitian lebih banyak dari pada yang lain dan akan lebih banyak makna dan komentar yang diberikan. Jadi pada tahap ini peneliti mulai

memberikan komentar dengan menduga pada apa yang ada pada teks. Deskripsi yang peneliti kembangkan melalui *initial notes* ini menjadi deskripsi inti dari komentar-komentar yang jelas merupakan fokus dari fenomenologi dan sangat dekat dengan makna eksplisit partisipan. Dalam hal ini termasuk melihat bahasa yang mereka gunakan, memikirkan konteks dari ketertarikan mereka (dalam dunia kehidupan mereka), dan mengidentifikasi konsep-konsep abstrak yang dapat membantu peneliti membuat kesadaran adanya pola-pola makna dalam keterangan partisipan.

Senada dengan itu Hajaroh (tanpa tahun) menjelaskan bahwa data yang asli (*original*) dari transkrip diberikan komentar-komentar dengan menggunakan ilustrasi komentar eksploratori. Komentar eksploratori dilaksanakan untuk memperoleh intisari. Komentar eksploratori meliputi komentar deskriptif (*descriptive comment*), komentar bahasa (*linguistic comment*) dan komentar konseptual (*conceptual comment*) yang dilakukan secara simultan. Komentar deskriptif difokuskan pada penggambaran isi (*content*) dari apa yang dikatakan oleh partisipan dan subjek dari perkataan dalam transkrip. Komentar bahasa difokuskan pada catatan eksploratori yang memperhatikan pada penggunaan bahasa yang spesifik oleh partisipan. Peneliti fokus pada isi dan makna dari bahasa yang disampaikan. Komentar konseptual ini lebih *interpretative* difokuskan pada level yang konseptual. Dalam pelaksanaannya peneliti akan menggunakan catatan untuk melakukan analisis.

Hajaroh (tanpa tahun) juga menjelaskan bahwa setelah memberikan komentar eksploratori, peneliti melakukan dekonstruksi (*deconstruction*). Ini membantu peneliti untuk mengembangkan strategi dekontekstualisasi yang membawa peneliti pada fokus yang lebih detail dari setiap kata dan makna dari partisipan penelitian. De-kontekstualisasi membantu mengembangkan penilaian yang secara alamiah diberikan pada laporan-laporan partisipan dan dapat menekankan pentingnya konteks dalam *interview* sebagai keseluruhan, dan membantu untuk melihat interrelationship (saling hubungan) antar satu pengalaman dengan

pengalaman lain. Setelah dekonstruksi peneliti melakukan tinjauan umum terhadap tulisan catatan awal (*overview of writing initial notes*). Langkah ini dilaksanakan dengan memberikan catatan-catatan eksploratori yang dapat digunakan selama mengungkap data dengan cara: 1) Peneliti memulai dari transkrip, menggarisbawahi teks-teks yang kelihatan penting. Pada saat setiap bagian teks digarisbawahi berusaha juga untuk menuliskan dalam margin keterangan-keterangan mengapa sesuatu itu dipikirkan dan digarisbawahi dan karena itu sesuatu itu dianggap penting; 2) Mengasosiasi secara bebas teks-teks dari partisipan, menuliskan apapun yang muncul dalam pemikiran ketika membaca kalimat-kalimat dan kata-kata tertentu. Ini adalah proses yang mengalir dengan teks-teks secara detail, mengungkap perbedaan pendekatan dari makna yang muncul dan dengan giat menganalisis pada level yang *interpretative*.

3. *Developing Emergent Themes* (Mengembangkan kemunculan tema-tema)

Meskipun transkrip *interview* merupakan tempat pusat data, akan tetapi data itu akan menjadi lebih jelas dengan diberikannya komentar eksploratori (*exploratory commenting*) secara komprehensif. Dengan komentar eksploratori tersebut maka pada seperangkat data muncul atau tumbuh secara substansial. Moeryadi (2009) menjelaskan bahwa untuk memunculkan tema-tema peneliti mengatur perubahan data dengan menganalisis secara simultan, berusaha mengurangi volume yang detail dari data yang berupa transkrip dan catatan awal yang masih ruwet (*complexity*) untuk di mapping kesalinghubungannya (*interrelationship*), hubungan (*connection*) dan pola-pola antar catatan eksploratori. Pada tahap ini analisis terutama pada catatan awal lebih yang dari sekedar transkrip. Komentar eksploratori yang dilakukan secara komprehensif sangat mendekati pada simpulan dari transkrip yang asli. Analisis komentar-komentar eksploratori untuk mengidentifikasi munculnya tema-tema termasuk untuk memfokuskan sehingga sebagian besar transkrip menjadi jelas. Proses mengidentifikasi munculnya tema-tema termasuk kemungkinan peneliti mengobrak-abrik kembali alur narasi dari

interview jika peneliti pada narasi awal tidak merasa comfortable. Untuk itu peneliti melakukan reorganisasi data pengalaman partisipan. Proses ini menurut Smith (2009) juga merepresentasikan lingkaran hermeneutik. Keaslian *interview* secara keseluruhan menjadi seperangkat dari bagian yang dianalisis, tetapi secara bersama-sama menjadi keseluruhan yang baru yang merupakan akhir dari analisis dalam melukiskan suatu peristiwa dengan terperinci. Untuk memunculkan tema-tema dari komentar eksploratori menggunakan tabel pencatatan sebagai berikut:

4. *Searching for connection a cross emergent themes*

Moeryadi (2009) menjelaskan bahwa partisipan penelitian memegang peran penting semenjak mengumpulkan data dan membuat komentar eksploratori. Atau dengan kata lain pengumpulan data dan pembuatan komentar eksploratori dilakukan dengan berorientasi pada partisipan. Mencari hubungan antar tema-tema yang muncul dilakukan setelah peneliti menetapkan seperangkat tema-tema dalam transkrip dan tema-tema telah diurutkan secara kronologis. Hubungan antar tema-tema ini dikembangkan dalam bentuk grafik atau gambar dan memikirkan tema-tema yang bersesuaian satu sama lain. Level analisis ini tidak ada ketentuan resmi yang berlaku. Peneliti didorong untuk mengeksplora dan mengenalkan sesuatu yang baru dari hasil penelitiannya dalam term pengorganisasian analisis. Tidak semua tema yang muncul harus digabungkan dalam tahap analisis ini, beberapa tema mungkin akan dibuang. Analisis ini tergantung pada keseluruhan dari pertanyaan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Mencari makna dari sketsa tema-tema yang muncul dan saling bersesuaian dan menghasilkan struktur yang memberikan pada peneliti hal-hal yang penting dari semua data dan aspek-aspek yang menarik dan penting dari keterangan-keterangan partisipan. Hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi yang mungkin muncul dalam *Interpretative Phenomenology Analysis* selama

proses analisis meliputi: *Abstraction, Subsumtion, Polarization, Contextualization, Numeration, dan Function.*

5. *Moving the next cases*

Tahap analisis 1- 4 dilakukan pada setiap satu kasus/partisipan. Jika satu partisipan selesai dan dituliskan hasil analisisnya maka tahap selanjutnya berpindah pada kasus atau partisipan berikutnya hingga selesai semua kasus. Langkah ini dilakukan pada semua transkrip partisipan, dengan cara mengulang proses yang sama.

6. *Looking for patterns across cases*

Tahap akhir merupakan tahap keenam dalam analisis ini adalah mencari pola-pola yang muncul antar kasus atau partisipan. Apakah hubungan yang terjadi antar kasus, dan bagaimana tema-tema yang ditemukan dalam kasus-kasus yang lain memandu peneliti melakukan penggambaran dan pelabelan kembali pada tema-tema. Pada tahap ini dibuat master tabel dari tema-tema untuk satu kasus atau kelompok kasus dalam penelitian.

3.6 Batasan Penelitian

Pertama, penelitian ini ingin mengungkap secara mendalam tentang preferensi ibu rumah tangga dalam memilih lembaga keuangan untuk dimintai modal usaha. Karena meskipun banyak LKM dengan bunga murah, namun dalam observasi awal peneliti, masih diketahui ibu rumahtangga yang memiliki usaha ternyata banyak yang memilih LKM dengan bunga tinggi. Bahkan ada juga yang meninggalkan LKM dan memilih meminjam di bank konvensional. Hal itu merupakan pilihan-pilihan yang akan menimbulkan dinamika pendapatan rumah tangga mereka.

Kedua, penelitian ini juga akan mengungkap secara mendalam atas perubahan pola kelembagaan LKM di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember atas preferensi ibu rumah tangga dalam menentukan LKM yang disukainya tersebut. Karena dengan adanya preferensi nasabah, maka LKM akan menyesuaikan diri supaya tetap diminati oleh para nasabah utamanya ibu rumah tangga ini.

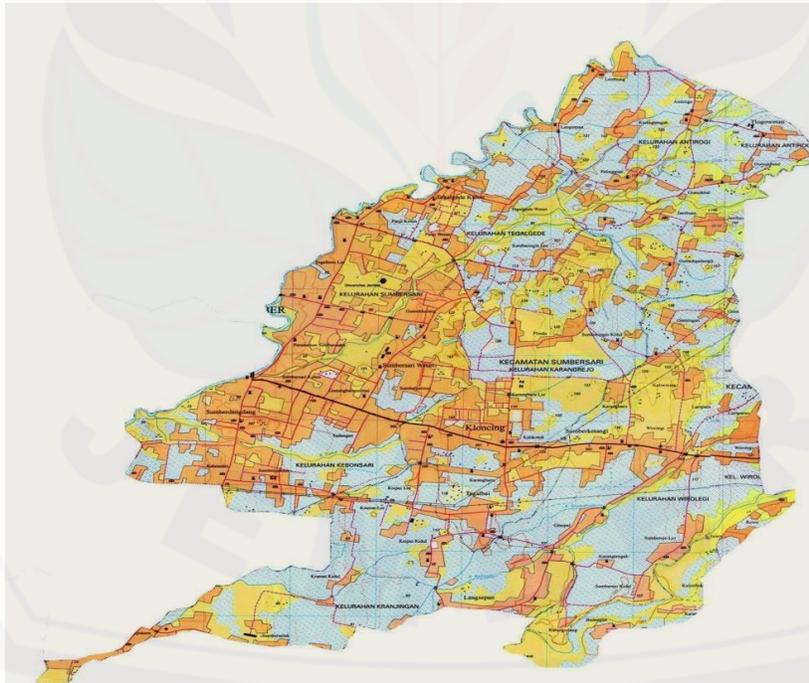
Ketiga, penelitian ini juga akan mengungkap dan membandingkan kesejahteraan keluarga sebelum dan sesudah ikut LKM, karena itu akan menjadi data bahwa ada pengaruh atau tidak ada pengaruhnya ikut LKM. Sehingga penelitian ini pada akhirnya akan mengetahui konstruksi model baru dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui lembaga keuangan yang inklusif.

BAB 4. HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Lembaga Keuangan Mikro dan Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Summersari

4.1.1 Profil Lembaga Keuangan Mikro di Kecamatan Summersari

Kecamatan Summersari merupakan kecamatan kota di wilayah Kabupaten Jember. Di kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 120 ribu orang ini, lembaga keuangan mikro banyak tumbuh subur. Utamanya adalah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi, BPR, lembaga bentukan pemerintah seperti PNPM dan Bank Gakin serta perbankan umum. Jumlah koperasi di Summersari tergolong banyak yaitu 28 koperasi di 7 kelurahan yang ada. Dominasi dari 28 koperasi itu adalah koperasi simpan pinjam yang ada 21 koperasi. Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam ini secara umum adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota.



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Summersari (Sumber: <http://arkeyes88.blogspot.com>)

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-undang No 25 tahun 1992). Kegiatan dari sisi pasiva, koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan penghimpunan dana baik dari anggota ataupun masyarakat umum. Bentuk penghimpunan dana ini dapat berupa tabungan atau simpanan sedangkan dari masyarakat dapat berbentuk pinjaman modal usaha. Sedangkan kegiatan dari sisi aktiva adalah melakukan upaya untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil penghimpunan dana yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Dilihat secara rincinya, kegiatan koperasi yang ada di sumbersari adalah sebagai berikut:

1. Koperasi simpan pinjam dituntut mampu melayani penyimpanan dan juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.
2. Koperasi simpan pinjam juga menyalurkan dana yang terkumpul dari anggota yang dimasa datang akan diterima kembali secara bertahap.

Di kedua kegiatan di atas, harus dikelola sedemikian rupa agar kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berjalan dengan seimbang.

Peraturan Menteri (Permen) Koperasi No 19 tahun 2008 menjelaskan bahwa dana yang dihimpun oleh koperasi simpan pinjam dimasukkan kedalam hutang atau ekuitas atau kekayaan bersih. Jika dilihat dari sumbernya, dana yang berbentuk hutang berasal dari tabungan kemudian simpanan berjangka atau pinjaman yang diterima koperasi simpan pinjam. Sedangkan yang bersumber dari kekayaan bersih, diantaranya berasal dari sumber simpanan wajib anggota dan simpanan sukarela, serta cadangan umum di tahun berjalan. Simpanan menurut PP tahun 1995 adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP/USP. Sementara itu, ada jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib (bagi KSP).

Tidak hanya koperasi, Bank Perkreditan Rakyat juga tumbuh subur di kecamatan ini. Ada beberapa BPR yang beroperasi di setiap kelurahan seperti BPR Semesta dan juga BPR Jember Lestari, meskipun kantor mereka tidak berada di wilayah itu. Kedua BPR ini menerapkan sistem yang sama, yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan besaran tertentu dan bunga tertentu, yang disesuaikan dengan agunan yang ada. BPR sesuai UU Perbankan merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Kredit merupakan sumber pendapatan utama bagi BPR guna kesinambungan usahanya, sehingga BPR harus senantiasa menjaga kualitas kreditnya. Untuk itu, dalam pemberian kredit, BPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat agar kualitas kredit yang diberikan senantiasa lancar. Apabila BPR tidak mampu menjaga kualitas kreditnya dengan baik maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja BPR khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan menjadi terganggu.

Model pemasaran dari beberapa BPR yang ada di wilayah penelitian ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perbankan umum seperti Danamon, BTPN SP, BRI dan juga bank mikro yang lain. Yaitu memberikan kredit kepada nasabah dengan agunan berupa barang tertentu yang bernilai lebih. Kebijakan dalam pemberian kredit mencakup kebijakan mengenai pemberian kredit yang sehat, penilaian agunan, pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan atau debitur besar, kredit yang mengandung risiko tinggi serta kredit yang perlu dihindari. Dalam kebijakan pemberian kredit yang sehat, kurang lebih meliputi, 1 prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat termasuk memiliki prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, prosedur pengawasan kredit. 2 kredit yang perlu mendapat perhatian khusus. 3 prosedur penanganan kredit bermasalah yang terdiri dari penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. 4 penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPR yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit. Sedangkan kebijakan penilaian agunan, paling kurang meliputi prosedur dan tata cara penilaian

agunan dari aspek legalitas dan ekonomis yang mencakup dokumen kepemilikan agunan, pengikatan agunan, penetapan nilai taksasi agunan, dan penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah kredit yang akan diberikan, dengan memperhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu kredit.

BPR maupun bank umum dalam melakukan pemasaran juga mencakup kepuasan atas kebutuhan dan keinginan konsumen. Tugas dari segala jenis bisnis adalah penyerahan nilai pelanggan untuk mendapatkan laba. Dalam ekonomi hiperkompetitif, dengan semakin banyak pembeli rasional yang berhadapan dengan banyak sekali pilihan, sebuah perusahaan dapat menang hanya dengan menyetel dengan baik proses penyerahan nilai serta memilih, menyediakan dan mengomunikasikan nilai superior.

Pandangan tradisional tentang pemasaran adalah perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Dalam pandangan ini, pemasaran mengambil tempat paruh kedua dalam proses. Perusahaan yang menganut pandangan ini akan memiliki peluang untuk berhasil jika terjadi kekurangan barang dimana konsumen tidak rewel tentang mutu, fitur, atau gaya misalnya, pada barang-barang kebutuhan pokok dalam pasar yang sedang berkembang. Hal ini yang dulu dilakukan oleh BPR maupun bank umum.

Lain halnya dengan koperasi simpan pinjam, maupun BPR dan Bank Umum, sistem yang diterapkan dalam PNPM yang disetiap kelurahan didirikan kantornya telah memakai sistem tanggung renteng sesama anggota kelompok. Hal itu sama dengan Bank Gakin, hanya saja PNPM tidak mengalokasikan untuk kebutuhan sosial, karena yang memegang kendali adalah petugas PNPM ditingkat kelurahan. Sedangkan bank gakin agak berbeda, meskipun sesama pengguna sistem tanggung renteng, namun sistem koperasi seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela juga diterapkan. Bahkan jasa sebesar 5 persen dari hasil kreditnya dialokasikan untuk pendidikan, sosial dan juga sebagian masuk kas guna pengembangan.

Bank Gakin sebenarnya adalah lembaga keuangan mikro masyarakat (LKMM) yang digarap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jember. Nama 'gakin' pun adalah akronim dari keluarga Indonesia. Tapi dalam perkembangannya,

masyarakat miskin sendiri yang menyebut itu Bank Gakin, Bank Keluarga Orang Miskin. Menurut NWS Bank Gakin telah menjadi *trade mark* untuk meyakinkan publik bahwa institusi itu spesifik melayani bisnis keluarga miskin. Orang-orang sendiri yang ngasih nama itu. Karena selama ini tidak ada bank yang mau mendekati orang miskin.

Bank Gakin pertama didirikan pada bulan Oktober 2005. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember Mirfano, hal itu terilhami Grameen Bank yang diinisiasi Muhammad Yunus, ekonom Bangladesh. “Saya merasa Grameen Bank layak diaplikasikan di sini. Selama ini ada ketidakadilan ekonomi. Ada bank untuk orang mampu, tapi tidak ada bank untuk orang miskin,” katanya. Padahal seharusnya bank tidak memandang warga miskin sebagai nasabah potensial, dalam hal menabung dan kredit. Untuk menabung, warga miskin punya terlalu sedikit uang. Untuk meminjam uang untuk usaha, warga miskin tak punya agunan. Sementara sistem perbankan menerapkan kehati-hatian dalam mengucurkan kredit.

Ketidakmauan bank mendekati warga miskin ini membuat kondisi perekonomian warga miskin tak beranjak membaik. Betapa tidak, untuk membuka usaha, warga miskin harus meminjam pada rentenir. Hidup mereka terjerat hutang berbunga tinggi. “Bunga rente 30 persen seminggu selama 10 minggu, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan usaha,” kata Mirfano.

Sebagai awal, tahun 2005, Dinas Koperasi mendirikan dua unit Bank Gakin di daerah miskin di kecamatan Patrang. Mulanya, Diskop membuat survey di antara 200 warga di daerah tersebut tentang tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya di sana. Tokoh masyarakat inilah yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola Bank Gakin. “Awalnya Diskop mencari 50 orang untuk angkatan pertama. Yang dicari memang masyarakat yang dapat dipercaya,” kata NWS yang menjadi salah satu yang dipercaya itu.

Para orang pilihan ini lantas dilatih seputar manajemen keuangan dan administrasi. Ada yang bertugas sebagai koordinator, juru buku, juru tagih, kasir, analis kredit, dan pengawas. Pelatihan berlangsung selama dua bulan, hingga mereka

dapat membuat neraca. Mereka mengajak warga miskin di daerah sekitar untuk berhimpun dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri dari lima orang perempuan. Perempuan menjadi pilihan karena memiliki nilai strategis. Keluarga miskin jika ingin berdaya, maka suami dan istri harus sama-sama bekerja. “Kemiskinan terjadi karena perempuan tak berdaya,” kata Mirfano. Setelah beres, institusi LKMM ‘Bank Gakin’ dinotariskan dan diberi modal hibah Rp 25 juta oleh Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2005. Dari modal ini, bank memberikan pinjaman kepada para keluarga miskin yang menjadi anggota.

Nominal pinjaman beragam, mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta, tanpa agunan. Rata-rata digunakan untuk pengembangan usaha kecil seperti membuka usaha penjualan sayur-mayur dan bakso. Pengembalian pinjaman dilakukan setiap pekan selama 10 pekan dengan bunga setengah persen dengan sistem tanggung renteng. Jika satu anggota tidak mengembalikan pinjaman, maka empat anggota lainnya menanggung beban pengembalian itu. Mereka juga baru boleh meminjam uang lagi, jika pinjaman sebelumnya telah dikembalikan.

Sistem seperti ini cukup ampuh untuk menekan kredit macet. “Non Performing Loan saat ini di bawah lima persen,” kata Mirfano. Dia mencontohkan dari perputaran uang Rp 915 juta di Bank Gakin Wonosari Kaliwates, yang macet 0,22 persen. Minimnya kredit macet ini dikarenakan sistem yang diterapkan Bank Gakin mengandalkan sanksi sosial. Seorang warga yang menjadi anggota kelompok dapat dikucilkan, jika nakal. Mereka bahkan dapat dikeluarkan dari kelompok. “Padahal, Bank Gakin ini sudah menjadi kebutuhan, daripada mereka pinjam ke ‘bank harian’ (rentenir),” kata NWS.

Bank Gakin berkembang pesat. Saat ini 524 Bank Gakin berdiri di 31 kecamatan. Tercatat, sejak Oktober 2005 hingga Juli 2014, omzetnya mencapai Rp 28,14 miliar. Bantuan awal dalam bentuk hibah dilakukan hanya pada tahun pertama dan kedua. Tahun 2007, bantuan dipinjamkan dari Bank Jatim oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan nominal Rp 25 juta – 35 juta untuk masing-masing 18 Bank Gakin. Tahun 2008 pinjaman Rp 20 juta masing-masing untuk tiga Bank Gakin.

Mereka mengembalikan ke Bank Jatim selama dua tahun dengan bunga dua persen setahun. Selain membantu sektor permodalan, Bank Gakin juga menumbuhkan budaya menabung di kalangan masyarakat miskin.

NWS mengatakan, awalnya tidak ada anggota kelompok yang menabung. Namun perlahan tapi pasti, warga miskin mulai menabung dan tak sekadar pinjam uang. Warga miskin senang menabung di Bank Gakin, karena dapat menyimpan uang dengan nominal kecil, seperti Rp 2.000 atau Rp 5.000 per pekan. “Kalau tabungan atau angsuran dari anggota kelompok mencapai Rp 5 juta – 10 juta atau kita (pengurus) mau pergi meninggalkan rumah agak lama, kita simpan di Bank Jatim agar aman,” kata NWS.

Selain menumbuhkan budaya menabung, menurut Mirfano, Bank Gakin juga meningkatkan pendapatan, meningkatkan modal sosial, meningkatkan kemandirian dan kreativitas. Sebanyak 12 Bank Gakin sudah dapat membiayai 37 posyandu dengan memberi bantuan Rp 30 ribu – 50 ribu per bulan di desa tempat Bank Gakin tersebut. Lebih penting lagi, Bank Gakin mengurangi praktik rentenir di kalangan keluarga miskin. Namun hal ini bukannya tanpa risiko. Pengurus Bank Gakin acap menjadi sasaran permusuhan dan kecemburuan dari para lintah darat. NWS mengatakan, fitnah menghampirinya namun, dia dan kawan-kawannya jalan terus.

Ada rentenir yang mencoba memanfaatkan Bank Gakin. Ia meminjam uang dari Bank Gakin dalam jumlah besar. “Bukan untuk modal usaha, tapi untuk dikembangkan. Kita tahu, dan kita tidak pinjami,” kata NWS. Saat ini Bank Gakin yang dikelola NWS berkembang pesat, dan banyak anggota yang menginginkan nominal pinjaman ditingkatkan menjadi Rp 2 juta, namun belum ada kesepakatan. Yang terang, eksistensi Bank Gakin mulai menarik minat bank konvensional. Menurut NWS, Bank Jatim berminat menawarkan tambahan nominal pinjaman kepada Bank Gakin. Namun, pengurus memutuskan tidak bekerjasama dulu dengan bank umum. “Modal yang kami miliki sudah cukup, belum perlu ada tambahan dari bank,” kata NWS.

Jumlah lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Summersari tergolong banyak. Kecamatan kota yang memiliki 7 kelurahan ini memiliki 74 lembaga keuangan yang kebanyakan berada di daerah Kampus Tegal Boto. Berikut adalah data jumlah lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Summersari.

Tabel 4.1 Jumlah LKM di Kecamatan Summersari

No	Jenis LKM	Jumlah	Uraian
1	Koperasi	28 unit	21 unit koperasi simpan pinjam 7 unit koperasi serba usaha
2	Perbankan Umum	6 unit	BRI, BNI, Bank Mandiri, BTPN, BTN, Bank Jatim
3	BPR	1 unit	BPR Semesta
4	LKM Bentuk Pemerintah	37 unit	30 unit Bank Gakin 7 unit PNPM
5	Pegadaian	2 unit	Cabang Jember dan Kantor Kas Jalan Karimata

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Jember (2013), diolah.

Terlihat dari tabel tersebut, LKM bentuk pemerintah seperti Bank Gakin dan PNPM jumlahnya mendominasi dari LKM yang ada di Kecamatan Summersari. Dari 74 LKM yang ada 37 diantaranya adalah LKM bentuk pemerintah. Sedangkan yang terbanyak kedua adalah koperasi dengan jumlah 28 unit, yang terdiri dari koperasi simpan pinjam sebanyak 21 unit dan koperasi serba usaha sebanyak 7 unit.

4.1.2 Motif Ekonomi Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Summersari Bekerja di Sektor Informal

Banyaknya sektor usaha informal yang ditekuni oleh ibu rumah tangga, tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Terkadang mereka melakukan usaha itu karena adanya himpitan kebutuhan rumah tangga mereka, yang tidak cukup hanya mengandalkan gaji suami. Ada juga yang terpaksa melakukan pekerjaan disektor informal, karena usaha itu yang mereka dapat. Mereka tidak

mampu masuk dalam lembaga formal, karena tidak memiliki ijazah yang layak, sehingga alternatif terakhirnya adalah bekerja disektor informal tersebut. Pada aras yang sama diungkapkan oleh Alisjahbana (2006:3-9), bahwa beberapa faktor yang menyebabkan atau melatarbelakangi seseorang (ibu rumah tangga) memilih sektor informal sebagai aktivitas pekerjaan adalah untuk menggantungkan hidup. Faktor tersebut menggambarkan motif sekaligus kondisi sosial ekonomi para perempuan pekerja sektor informal.

Dalam uraian yang dipaparkan oleh Alisjahbana (2006:3-9), faktor-faktor tersebut adalah pertama, tidak adanya pekerjaan lain. Segala keterbatasan yang dimiliki oleh para ibu rumah tangga memaksa mereka untuk memilih satu-satunya pilihan yang ada adalah bekerja di sektor informal. Sebagian informan yang diwawancarai, menyatakan bahwa mereka terjun di sektor informal bukan karena tertarik, melainkan karena keadaan terpaksa demi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan ini merupakan satu-satunya pekerjaan yang dapat untuk memperoleh penghasilan, sehingga dilakukannya. Seperti diungkapkan oleh NWS bahwa semenjak ditinggal oleh sang suami karena meninggal dunia, dia terpaksa melakukan pekerjaan sebagai penjahit, guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Gimana lagi dek, kalau dulu ada suami bebannya masih ringan, saya hanya melatih senam para manula saja. Sekarang suami sudah tidak ada, ya semua kebutuhan saya dan anak-anak saya yang harus mencarikan sendiri. Tetapi saya semangat saja menjalaninya, sambil dibuat hiburan”.

Kerentanan masyarakat untuk jatuh miskin menjadi dorongan utama kepada mereka untuk melakukan pekerjaan yang dapat menopang kehidupannya. Sehingga dengan keadaan seperti ini pekerjaan disektor informal menjadi salah satu dewa penolong ditengah ketiadaan lapangan pekerjaan.

Kedua, mereka ingin mendapat rezeki halal. Hal itu dilakukan oleh mereka karena mereka tidak mau melakukan pekerjaan haram atau tidak patut, misalnya meminta-minta, menipu, atau mencuri, lebih baik mereka bekerja sebagai pekerja informal. Menurut golongan masyarakat miskin perkotaan, gengsi tampaknya tidak

lagi dihiraukan. Ketika tidak ada lagi sumber pendapatan yang dapat diandalkan, maka masuk ke sektor ini adalah pilihan yang rasional. Profesi ini bagi mereka adalah sumber mencari rezeki secara halal sesuai dengan ketentuan agama, norma hukum, dan tata tertib masyarakat.

Ketiga, sebagai bentuk kemandirian ekonomi. Menjadi pekerja sektor informal sangat fleksibel dalam pengelolaan usahanya. Mereka tidak terikat waktu dan aturan yang ketat seperti halnya di perusahaan. Sektor informal sebagai tempat mengais rezeki, di mana mereka dapat mengatur pekerjaannya sendiri. Keuntungan yang diperoleh bersifat langsung dan dapat dinikmati segera, mereka dapat mengambil keputusan dengan cepat untuk mengembangkan usahanya. Hasil atau keuntungan tidak dapat dinikmati segera, jika mereka bekerja di pabrik atau perusahaan. Syahrudin (dalam Mandayanti, 2012;43) mengatakan bahwa keputusan seorang ibu untuk masuk tenaga kerja atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memberikan untuk mengambil keputusan secara bebas, faktor-faktor tersebut antara lain tersedianya kesempatan kerja, jumlah anak yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, usia serta keadaan sosial budaya. Keterlibatan perempuan dalam meningkatkan pendapatan, baik di sektor formal maupun di sektor informal hendaknya, tidak mengurangi tugas-tugas kaum perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Perempuan dalam melakukan peran gandanya di keluarga menghadapi tugas yang tidak ringan. Oleh karena itu peran ganda tersebut tetap dipertahankan agar dapat meningkatkan harkat dan martabat perempuan itu sendiri serta keluarganya.

Keempat, pendidikan rendah dan modal kecil. Banyak orang yang memilih menjadi pekerja sektor informal karena tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga siapapun dapat masuk kesana. Sektor informal mempunyai karakteristik usaha yang relatif tidak memerlukan modal besar, keterampilan tinggi, relatif mudah dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat beresiko kecil. Hal ini menunjukkan bahwa semangat usaha dan daya tahan yang tinggi yang diperlukan bagi

siapapun yang ingin masuk ke sektor informal merupakan motif utama mengapa para perempuan tetap bertahan.

Tabel 4.2 Motivasi Perempuan Terjun ke Sektor Informal

No	Motivasi Menekuni Sektor Informal	Kesesuaian dengan Teori
1	Membantu suami mendapatkan <i>income</i>	Sesuai
2	Tidak memiliki pekerjaan lain	Sesuai
3	Ingin mendapat rezeki halal	Sesuai
4	Tidak ingin terikat waktu	Sesuai
5	Pendidikan rendah dan modal kecil	Sesuai

Sumber: Data primer diolah (2014)

Tabel 4.2 tersebut membuktikan bahwa pendapat yang diungkapkan oleh Alisjahbana (2006:3-9) selaras dengan hasil penelitian ini. Dimana ada beberapa motivasi yang mendorong kaum ibu untuk menekuni sektor informal.

Seperti yang dikatakan bu SR di Jalan Kalimantan, dia terpaksa menjadi penjual nasi pecel karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Ditambah lagi dia tidak pernah mendapatkan pendidikan yang memadai karena hanya lulusan SMP saja. Sehingga menekuni sektor informal ini menjadi langkah terbaik yang dilakukannya, meskipun usianya masih 26 tahun, yang memungkinkan untuk bekerja disektor formal. “Ya bagaimana lagi mas, saya hanya lulusan SMP, masa mau jadi pegawai kantor. Jualan nasi saja yang modalnya tidak terlalu besar sambil bantu suami nyari uang sekolah anak” ungkapnya.

Ungkapan yang sama datang dari bu YY di jalan Jawa 6, dia mengaku usaha jualan gorengan yang dia tekuni tidaklah memerlukan modal yang besar. Hanya modal awal saja untuk beli alat penggorengan dan etalase yang membutuhkan uang banyak, namun itupun masih terjangkau olehnya karena dapat mengakses keuangan dari PNPM di kelurahan Summersari.

“Kalau saya dari dulu ya dapatnya hanya berjualan gorengan mas, mau usaha yang lain tidak kuat dengan modalnya mas. Apalagi mencari tempatnya juga sudah tidak gampang sekarang ini. Kalau berjualan kayak gini kan hanya berat di depan saja, selanjutnya tidak membutuhkan modal besar, karena hanya untuk belanja bahan gorengan saja”.

Pekerjaan itu mereka lakukan dengan analisis pembiayaan yang kecil namun dapat menghasilkan dan menambah pendapatan keluarga. Hal itu menjadi pilihan ditengah ketiadaan sumber dana.

Sementara itu Dewi (2012) menegaskan bahwa motivasi perempuan untuk bekerja disebabkan beberapa faktor diantaranya; suami tidak bekerja, pendapatan rumah tangga rendah sedangkan jumlah tanggungan keluarga cukup tinggi, mengisi waktu luang, ingin mencari uang sendiri dan ingin mencari pengalaman. Keluarga dengan tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya bergantung pada penghasilan suami, mereka harus berpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain alasan untuk menambah penghasilan suami, perempuan juga tertarik bekerja di sektor informal sebagai pedagang karena ingin mempunyai penghasilan sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada suami. Masuknya mereka ke sektor informal sebagai pedagang, maka dapat mengatur waktunya untuk berdagang dan juga untuk keluarganya.



Gambar 4.2. Usaha Yang Ditekuni Ibu Rumah Tangga (Sumber: Dokumentasi)

Keterbatasan modal usaha ternyata bukan menjadi sebuah kendala bagi para kaum perempuan untuk mengembangkan potensinya. Kemauan yang kuat supaya mandiri dalam persoalan ekonomi jauh menjadi pendorong mereka untuk lebih kreatif dan juga tekun menjalani usaha. Apalagi ada yang memfasilitasi mereka untuk melakukan usaha produktif tersebut. Fakih (1996:35) mengatakan, bahwa ketidakadilan atau ketimpangan gender disebabkan karena perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat secara biologis (*nature*) tetapi lebih dilihat dari kepribadian yang ditentukan masyarakat (*nurture*), sehingga secara situasional perempuan dianggap sebagai makhluk lemah dan kurang mampu memenuhi kebutuhannya, laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih mampu. Dengan berjalannya usaha yang dibangun oleh ibu rumah tangga itu, pandangan itu akhirnya terkikis.

Dalam konteks ini teori feminis berupaya mengkaji dan menjawab semua persoalan terkait adanya ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Fakih (2006:145), bahwa sebagai sekumpulan pemikiran, teori feminis berangkat dari kesadaran, asumsi, dan kepedulian terhadap ketidakadilan, ketimpangan, penindasan terhadap kaum perempuan, serta merupakan gerakan untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi. Oleh sebab itulah analisis gender digunakan untuk menemukan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender dalam proses pembangunan menuju tatanan masyarakat yang lebih dinamis.

Peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat memang semakin lama semakin meningkat diberbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan juga politik. Saat ini perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam setiap bidang sehingga semakin banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan perekonomian. Terkait dengan peran perempuan dalam perekonomian informal lapangan pekerjaan juga banyak tersedia bagi perempuan. Perempuan yang dimasa lajangnya sudah bekerja nampaknya akan terus bekerja meskipun sudah menikah Sihotang (2011). Mereka sebagai ibu rumah tangga terus bekerja dengan berbagai motivasi dan alasan seperti kebutuhan aktualisasi diri dan perlunya membantu ekonomi rumah tangga. Seperti yang diungkapkan bu EL berikut ini.

“Selain menjual LPG ke rumah-rumah warga, saya juga menyuplai beberapa jenis lauk makanan jadi yang dijajakan di beberapa outlet dipinggir jalan mas. Ada 4 outlet yang saya setori, yaitu di jalan Karimata, Kalimantan, KH Sidiq dan di Kreongan. Saya mulai tidur setelah belanja di pasar tanjung jam 23.00 wib, selanjutnya jam 2.00 wib saya sudah bangun untuk membuat beberapa sayuran dan lauk yang akan di suplai ke outlet lauk makanan tersebut”.

Bu EL merasa dengan bekerja seperti itu, dia dapat membantu ekonomi rumah tangganya. Sebagian perempuan menyatakan persamaan hak sebagai alasan mengapa mereka bekerja. Kerangka emansipasi perempuan telah dijadikan sebagian istri bekerja menganggap bahwa peranan mereka dalam pembangunan bangsa dan negara tidaklah optimal kalau hanya sebagai ibu rumah. Secara umum alasan perempuan bekerja adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Keadaan perekonomian yang semakin tidak menentu, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pendapatan keluarga yang cenderung tidak meningkat akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Pentingnya arti pekerjaan sebagai sumber penghasilan bagi keluarga membuat istri bekerja memberikan persepsi yang positif terhadap pekerjaannya. Oleh karenanya, istri bekerja cenderung memahami liku-liku pekerjaannya.

Hal itu akhirnya selaras dengan teori bahwa peranan perempuan dalam keluarga membawa perubahan pada alokasi pendapatan keluarga, di mana adanya peran ganda perempuan yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di sektor formal maupun di sektor informal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Syahrudin (dalam Mandayanti, 2012;43) menegaskan bahwa keputusan seorang ibu untuk masuk tenaga kerja atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memberikan untuk mengambil keputusan secara bebas, faktor-faktor tersebut antara lain tersedianya kesempatan kerja, jumlah anak yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, usia serta keadaan sosial budaya. Keterlibatan perempuan dalam meningkatkan pendapatan, baik di sektor formal maupun di sektor informal hendaknya, tidak mengurangi tugas-tugas kaum perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Perempuan dalam melakukan peran gandanya di keluarga menghadapi tugas yang

tidak ringan. Oleh karena itu peran ganda tersebut tetap dipertahankan agar dapat meningkatkan harkat dan martabat perempuan itu sendiri serta keluarganya.

Kedudukan perempuan dalam rumah tangga memiliki peran ganda. Selain berperan sebagai istri, perempuan juga berperan sebagai ibu rumah tangga, artinya perempuan yang mengatur berbagai macam urusan rumah tangga. Motivasi perempuan untuk bekerja disebabkan beberapa faktor diantaranya; suami tidak bekerja, pendapatan rumah tangga rendah sedangkan jumlah tanggungan keluarga cukup tinggi, mengisi waktu luang, ingin mencari uang sendiri dan ingin mencari pengalaman (Dewi, 2012). Keluarga dengan tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya bergantung pada penghasilan suami, mereka harus berpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Disamping alasan untuk menambah penghasilan suami perempuan juga tertarik bekerja di sektor informal sebagai pedagang karena ingin mempunyai penghasilan sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada suami. Dengan masuk ke sektor informal sebagai pedagang, maka seorang perempuan ibu rumah tangga dapat mengatur waktunya untuk berdagang dan juga untuk keluarganya. Hal itu dikuatkan oleh pendapat Jowett (2003) bahwa individu dan rumah tangga lebih mengandalkan pada sistem keuangan informal dibanding sistem keuangan formal. Walaupun kebijakan publik yang didesain dengan baik dapat memperkuat dan memperluas kapasitas rumah tangga untuk bereaksi secara independen melalui mekanisme informal.

4.2 Tolak Ukur Preferensi Ekonomi Ibu Rumah Tangga dan Perubahan Pola Kelembagaan LKM

4.2.1 Tolak Ukur Preferensi Ekonomi Ibu Rumah Tangga dalam Memilih LKM

Pilihan para ibu rumah tangga untuk memilih salah satu lembaga keuangan mikro, entah itu koperasi, bank perkreditan rakyat, bank umum, maupun lembaga keuangan buatan pemerintah sangatlah rasional. Banyak sekali pertimbangan yang mereka lakukan diantaranya adalah besaran tingkat bunga, kecepatan pencairan uang,

maupun kemudahan dalam persyaratan pengajuan kredit tersebut. Erol dan El-Bdour (1989) dalam studi yang dilakukan di Jordan menunjukkan bahwa masyarakat sebetulnya lebih berorientasi pada profit daripada yang lain atau agama sekalipun. Dengan kata lain, motivasi agama bukan merupakan faktor dominan yang dipertimbangkan untuk memilih bank syari'ah atau BPR syari'ah, tetapi motivasi yang kuat adalah berdasarkan pada motif *profit oriented*. Hal ini menunjukkan gahwa besaran suku bunga atau jasa mempengaruhi seseorang untuk memutuskan mengambil kredit disalah satu lembaga keuangan. Hal ini juga diperkuat teori preferensi bahwa preferensi konsumen merupakan suatu tindakan konsumen dalam memilih suatu barang atau jasa sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Preferensi dapat terbentuk melalui pola pikir konsumen yang didasari oleh beberapa alasan, antara lain pengalaman yang diperolehnya, dan juga kepercayaan turun-temurun (Simamora, 2004:87). Seperti yang diungkapkan oleh bu NR berikut ini:

“Kalau saya selalu meminjam uang ke BRI mas, karena sudah 5 tahun saya melakukan pinjaman dan dipermudah oleh BRI. Awalnya saya diberi pinjaman 2 juta, meningkat menjadi 3 juta, terus 5 juta dan sekarang sudah dapat dipinjami 10 juta. Saya sudah percaya sama BRI mas,” ungkapnya.

Faktor kepercayaan terhadap perbankan itulah yang akhirnya membuat nasabah tidak akan berpaling ke bank lain dalam hal meminjam uang. Hal ini senada dengan kajian yang dilakukan oleh BI di Sulawesi Selatan tahun 2013 (<http://ekbis.sindonews.com>) bahwa proses aplikasi mudah menjadi faktor yang dominan mempengaruhi nasabah mengambil kredit. Kemudahan itu dapat tercipta karena nasabah tidak hanya satu atau dua kali meminjam uang di bank tersebut. Bahkan nasabah sampai memercayakan agunanya tidak pernah diambil dari bank yang bersangkutan. Hal itu ditunjukkan bahwa selama 5 tahun itu, bu NR tidak pernah mengambil BPKB motornya di BRI. Untuk bunga yang harus dibayarkan oleh bu NR kepada BRI, adalah sebesar 12,44 persen per tahun. Dengan rincian dari pinjaman sebesar 10 juta, dia membayar angsuran sebesar 937 ribu perbulan selama 12 kali.

“Pinjaman saya 10 juta, setiap bulan saya membayar 937 ribu mas. Kalau saya sendiri harus membayar segitu ya sebenarnya gak kuat, tetapi uang pinjaman dari BRI itu saya pakai dengan adik saya yang berjualan lalapan di depan rumah sakit DKT. Saya memakai 5 juta adik saya memakai 5 juta, sehingga kita kuat membayarnya”.

Ungkapan yang sama juga datang dari bu JK yang berjualan es buah di jalan Kalimantan. Dia bahkan memiliki pinjaman di tiga lembaga keuangan mikro, yaitu di Pegadaian, PNPM dan BRI. Hal itu dilakukan karena dia merasa memerlukan kredit, dan bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan itu dapat dijangkaunya atau tergolong murah.

“Kalau di pegadaian dan PNPM sistemnya sama mas, yaitu dilakukan secara tanggung renteng dengan 5 anggota setiap kelompok. Semisal mendapat pinjaman 3 juta, maka dibagi 600 ribu setiap anggotanya. Nanti sistem pengembaliannya dilakukan secara tanggung renteng, sehingga jika ada satu yang tidak membayar akan menjadi tanggung jawab dari anggota lainnya, dan pembayarannya dilakukan di kantor kelurahan. Sedangkan yang di BRI kita menggunakan agunan BPKB motor, disana saya ngambil pinjaman 2 juta”.

Sama halnya dengan bu NR, bu JK juga tidak pernah mengambil sertifikat rumahnya di BRI unit kampus. Hal itu menunjukkan betapa percayanya nasabah terhadap lembaga keuangan yang dia kenal. Hal ini juga dapat menjadi menurun ke generasi berikutnya di tataran keluarganya. Sehingga adanya dua faktor yang diungkapkan Simamora (2004) yaitu pengalaman yang diperolehnya dimana masyarakat merasakan kepuasan menjadi nasabah dari suatu lembaga keuangan yang diikutinya, karena merasa terpuaskan dengan fasilitas yang tersedia, sehingga dia akan mengikutinya terus menerus. Dan kepercayaan turun-temurun dikarenakan keluarga pendahulunya juga ikut dalam lembaga keuangan yang sama sehingga rekam jejaknya diikuti oleh keturunannya, akan terjadi.

Bu JK dan bu NR juga menceritakan jika dirinya pernah meminjam di bank harian atau Koperasi Simpan Pinjam dulunya. Namun setelah dihitung-hitung bunganya sampai 30 persen lebih, sehingga mereka memutuskan berhenti dari pinjaman di bank harian. Saat ini meskipun ditawarkan hingga puluhan kali, dia tetap

tidak mau melakukan pinjaman lagi di bank harian itu. Tidak berhenti disitu saja, menurut bu NR didaerah tempat tinggalnya yaitu di jalan Kalimantan 10 banyak terjadi bentrokan antara suami dan istri karena setiap saat sang istri ditagih oleh pegawai bank harian itu. Waktunyapun tidak tentu, terkadang saat sang suami sedang istirahat siang, bahkan masih baru datang dari kerja di sore hari.

Sementara itu pendapat Engel *et.al.* (1994) menyatakan bahwa preferensi konsumen dapat diketahui dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai relatif setiap atribut yang terdapat pada suatu produk atau jasa. Ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi variasi dalam perilaku konsumen dan faktor-faktor penentu tersebut yang dapat di bagi menjadi dua faktor utama (Husein, 2005). Pertama, faktor lingkungan, dimana perilaku konsumen di dalam lingkungan yang kompleks akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti budaya, kelas sosial dan pengaruh pribadi. Kedua, faktor psikologis yang mana faktor ini adalah proses pengolahan informasi, pembelajaran dan perubahan sikap atau perilaku yang terdiri dari motivasi dan keterlibatan, persepsi, proses belajar/pengetahuan, kepercayaan, demografi dan sikap.

Seperti yang diungkapkan oleh bu NR bahwa modal awalnya menggunakan uang sendiri, namun untuk menambahi supaya usahanya dapat berjalan dia akhirnya meminjam uang di bank harian. Hal itu terjadi karena lingkungannya melakukan hal yang serupa sehingga ada kegiatan meniru. Namun karena ada informasi yang cukup yang menjadi faktor psikologis maka akhirnya preferensinya berubah ke bank lain.

“Awalnya hanya punya uang sedikit, terus ada tetangga yang berhutang di bank harian, akhirnya saya ikut untuk namabahi modal saya. Sejak itulah saya punya warung kecil-kecilan ini. Kalau sekarang saya ngutangnya gak lagi ke bank harian, tapi karena butuh modal yang besar supaya dapat memperbaiki warung, saya pinjam ke BRI”.

Sama halnya yang dilakukan oleh EL, yang semula meminjam di bank harian karena tetangganya juga melakukan aktifitas serupa, akhirnya berpindah preferensinya ke LKM lain karena adanya informasi yang utuh dari orang lain.

“Dulu setiap waktu harus mengangsur ke bank thitil mas. Ngenes kalau ikut bank thitil mas, setiap saat ditagih kerumah, bunganya besar pula. Tetapi kalau sekarang kita sudah ikut Bank Gakin, yang diurus oleh bu Wayan. Kalau Bank Gakin sistemnya berbeda, dan bunganya tidak besar, sehingga kita lebih enak.

Namun hal itu tidak seperti yang dilakukan oleh bu YL yang terpaksa harus berhutang terus kepada bank harian atau KSP. Pedagang nasi pecel di jalan Jawa ini terpaksa berhutang ke KSP meskipun bunganya sangat tinggi.

”Kalau dihitung bunganya memang sangat tinggi mas, jika berhutang 100 ribu, bayarnya sebesar 13 ribu selama sepuluh kali pembayaran atau sepuluh minggu. Tapi bagaimana lagi, kenalan kita cuma itu mas, mau pinjam ke BRI tidak punya jaminan. BPKB motor sudah dibuat hutang di Adira.

Hal serupa juga dilakukan oleh bu PT, yang terpaksa memakai uang dari bank harian untuk modal kerja. Meskipun dia tidak tahu apa nama KSP yang memberinya pinjaman itu.

“Saya mengakses keuangan di KSP semenjak awal usaha karena pihak bank agak memaksa dan syaratnya tidak terlalu susah. Kalau pinjem 100 ribu dipotong 10 ribu, jadi dapatnya 90 ribu. Terus bayarnya 130 ribu selama 10 kali, atau 13 ribu setiap kali angsuran. Ga tau nama koperasinya. Pokok ditawarkan orangnya yang kesini maksa, awalnya aku takut mau utang-utang terus dia bilang buat ampir-ampiran, dan syaratnya cuma fotocopy KTP”

Senada dengan hal di atas, bu YY yang berjualan nasi dan gorengan di jalan Tidar mengaku bahwa dirinya meminjam di bank harian atau KSP karena terpaksa untuk membiayai usahanya. Saat itu dia sudah akan meminjam kepada tetangga dan saudaranya, namun dari mereka banyak yang tidak dapat meminjami sehingga terpaksa mengambil kredit di bank harian.

“Emang ngambil bank harian buat modal awal buka usaha. Mahal emang, tapi butuh, pinjam ke tetangga gak ada, makanya minjam bank. Kalau gak dapat pinjaman malah saya tidak dapat usaha. Tapi semua itu saya masih menjangkau jumlah angsurannya”.

Dari rincian yang ada, setiap pembukaan pertama meminjam uang di KSP, maka nasabah diharuskan menjadi anggota KSP dengan membayar simpanan pokok sebesar 25 ribu dan simpanan wajib sebesar 5 ribu. Sehingga dari pinjaman sebesar 100 ribu, para peminjam hanya mendapatkan uang 70 ribu saja. Sedangkan mengembalikannya sebesar 130 ribu selama 2,5 bulan atau 10 pekan. Hal inilah yang menjadikan para ibu rumah tangga ini menjadi keberatan. Namun demikian, mereka tidak dapat berkutik ketika dihadapkan pada kebutuhan yang ada. Hal ini menyimpang dari pendapat Ledgerwood (dalam Arsyad, 2008) menyatakan bahwa istilah keuangan mikro merujuk pada penyediaan jasa-jasa keuangan biasanya berupa simpanan dan kredit kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, penjual jasa, (penata rambut, penarik becak).

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro juga sudah dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.



Gambar 4.3 Aktifitas Penagihan Bank Harian KSP di Lapak Sektor Informal (Sumber: Dokumentasi Penelitian)

Berbeda dengan bu YL dan bu PT adalah bu EL dan bu WR, kedua ibu rumah tangga ini lebih memilih untuk ikut aktif dalam Bank Gakin yang digagas oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jember. Kedua ibu rumah tangga ini mengaku jika dengan ikut Bank Gakin mereka telah keluar dari jeratan rentenir bank harian. Hal itu karena jasa atau bunga yang ada di Bank Gakin dirasanya cukup murah, yaitu hanya 5 persen dalam 10 pekan atau 2,5 bulan. Dari anggaran jasa sebesar itupun, tidak hanya dialokasikan untuk penambahan modal Bank Gakin saja, melainkan juga untuk bantuan sosial, bantuan pendidikan dan rekreasi anggota.

“Kalau dulu setiap waktu harus mengangsur ke bank harian (KSP) itu mas, karena kita hutangnya kesitu. Tetapi kalau sekarang kita sudah ikut Bank Gakin, sehingga tidak lagi ikut bank harian. Ngenes kalau ikut bank harian mas, setiap saat ditagih kerumah, bunganya besar pula. Kalau Bank Gakin ini kita dikenai jasa 5 persen dalam 10 pekan, tetapi uang 5 persen dari pinjaman itu akan dialokasikan untuk kegiatan kemasyarakatan, termasuk untuk biaya pendidikan,” ungkap bu EL.

Sementara itu menurut bu WR, pilihannya ikut dalam Bank Gakin merupakan suatu keberuntungan, karena sejak lama dia terjerat dengan rentenir yang memberi bunga pinjaman tinggi.

“Enak ikut Bank Gakin mas, kita memiliki kelompok-kelompok yang anggotanya 5 orang. Dari kelompok itu, semisal kita mendapat pinjaman 1 juta, hanya dipungut simpanan wajib 50 ribu (10 ribu per anggota), dan jasa administrasi penarikan 20 ribu. Sedangkan bunga atas pinjamannya sebesar 5 persen atau seribu per pekan. Sehingga mengangsurnya perpekannya 22 ribu tiap anggota. Atau per anggota harus mengembalikan 220 ribu selama 10 pekan”.

Hal ini berbeda dengan bank harian, yang bunganya mencapai 30 persen dalam 10 pekan, atau 10 kali angsuran. Sedangkan simpanan wajib anggota yang ditetapkan sebesar 10 ribu setiap kali meminjam uang ini akan dikembalikan kepada anggota nantinya.

Bank Gakin sendiri merupakan program pemerintah Jember yang mengadopsi sistem dari Grameen Bank. Program ini dirancang sebagai sebuah strategi

mengurangi kemiskinan. Grameen Bank sendiri dalam bahasa Bengali berarti desa atau kampung. Secara harfiah Grameen Bank berarti bank yang diperuntukkan bagi orang-orang desa yang juga dapat berarti orang-orang miskin, sama dengan Bank Gakin. Sasaran Grameen Bank dan Bank Gakin memang adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank konvensional atau lembaga keuangan komersial lainnya. Lebih spesifik lagi memprioritaskan kelompok perempuan sebagai sasaran pemberian kredit. Perempuan merepresentasikan kelompok marjinal dalam masyarakat miskin. Kelompok perempuan miskin dianggap sebagai sasaran yang efektif karena pendapatan tambahan yang diperoleh perempuan terbukti mampu memperbaiki kehidupan rumah tangga, termasuk kesejahteraan dan kesehatan anak-anak. Selain itu sejumlah studi menunjukkan bahwa perempuan memiliki resiko kredit yang lebih kecil dibandingkan kelompok laki-laki, dan lebih memiliki tanggungjawab dalam mengelola sumberdaya yang terbatas.

Pembentukan Grameen Bank dan juga Bank Gakin memiliki misi yang sama.

Tujuan dan target khusus layanan keuangan mikro dengan metode Grameen Bank:

- a. Memberikan layanan keuangan kepada orang miskin, terutama perempuan;
- b. Mendorong tumbuhnya *self-employment*;
- c. Melepaskan kaum marginal yang tidak beruntung, terutama perempuan, dan mendorong mereka untuk lebih memiliki jaringan dalam format pengorganisasian yang rapi;
- d. Mengurangi eksploitasi terhadap orang miskin dari rentenir;
- e. Memutus lingkaran setan kemiskinan.

Dengan tujuan seperti itu, maka program pengentasan kemiskinan dapat terwujud dengan baik dan sesuai harapan. Hal itu juga yang diharapkan oleh Pemkab Jember dalam membentuk Bank Gakin.

Model layanan keuangan Bank Gakin yang mengadopsi layanan keuangan mikro model Grameen Bank, selain bertujuan membantu masyarakat miskin khususnya perempuan untuk lebih meningkatkan kapasitas usahanya, model Grameen

Bank ini didukung dengan skema layanan yang sangat berpihak dan berempati pada masyarakat miskin karena dibuat sangat sederhana sehingga mudah diakses. Skema layanan tersebut meliputi:

- a. Pinjaman diberikan kepada individu, secara berkelompok (terdiri 5 orang);
- b. Tidak perlu ada agunan dan penjamin;
- c. Tidak perlu ada sanksi hukum, bila tidak mengembalikan;
- d. Tidak perlu datang ke kantor (bank) untuk mendapat pinjaman, petugas yang datang ketempat anggota dalam pertemuan kelompok;
- e. Prosedur dibuat sederhana, tidak ada formulir yang tidak dimengerti oleh anggota;
- f. Ada tabungan wajib.

Dengan skema layanan seperti itu, maka masyarakat miskin yang pendidikannya hanya lulus sekolah dasar tidak akan merasa keberatan. Hal inilah yang kemudian menjadi keunggulan dari program keuangan inklusif yang ditelurkan oleh pemerintah daerah ini.

Sistem keuangan inklusif seperti itu menjadi sesuatu yang berbeda dan mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat miskin baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan skema seperti itu, masyarakat akan semakin memiliki modal sosial, sehingga jika berlaku menyimpang maka masyarakat lain atau lingkungan sosialnya yang akan memberikan sanksi. Biasanya sanksi itu akan lebih berat dan berdampak dalam waktu yang lama. Dari situlah maka kepatuhan akan terbangun. Namun demikian, pemilahan tipologi masyarakat juga harus dipikirkan oleh penyelenggara sistem itu. Karena perbedaan wilayah misalkan antara daerah pertanian dan dekat pantai ternyata memiliki karakter berbeda.

Dalam kenyataan yang terjadi juga banyak terungkap di penelitian ini, ternyata sistem yang dirancang pemerintah daerah tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Contohnya dalam cuplikan wawancara dengan NWS, yang menjadi pengurus disalah satu LKMM Bank Gakin di Kecamatan Summersari ini diketahui bahwa ketua LKMMnya adalah istri seorang polisi yang beralamat di Jalan Padjajaran.

“kalau ketuanya LKMM kita ini berada di Jalan Padjajaran, di dalam perumahan itu. Beliau istri polisi yang juga aktif dalam usaha dikalangan ibu-ibu di wilayah ini. Awalnya saya disuruh menjadi ketua, tetapi saya tidak mau, takut bersinggungan dengan program kelurahan”.

Tidak hanya itu saja, LKMM Bank Gakin yang berada sewilayah dengan NWS, yaitu di Kecamatan Summersari, ternyata dipimpin oleh seorang ibu-ibu yang suaminya bekerja di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Hal ini seharusnya menjadi evaluasi bahwa program itu sudah tidak berorientasi untuk masyarakat miskin lagi namun justru dimanfaatkan oleh orang yang sudah mampu dan dalam taraf hidup berkecukupan.

4.2.2 Perubahan Pola Kelembagaan Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Dunia Usaha

Ketika perekonomian hanya didasarkan pada kelembagaan formal, maka dikhawatirkan terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian. Oleh karena itu, saat ini masyarakat perlu mengembangkan ekonomi kelembagaan, sebab baik buruknya sistem ekonomi dan politik di masyarakat sangat tergantung pada kelembagaan yang menjadi tatanannya. Itulah alasan ekonomi kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar (Rachbini, 2001). Dalam konteks ekonomi, kelembagaan merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi. Kelemahan dan kekuatan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat langsung dari keberadaan institusi ekonomi dan politik yang mendasarinya.

Keberadaan ibu rumah tangga yang memainkan peran sebagai alternatif pencari nafkah keluarga ini, telah menjadi pola kelembagaan baru dalam keluarga, utamanya penganut patriarki. Sehingga dengan peran itu, posisi atau nilai tawar ibu rumah tangga menjadi naik. Mereka tidak hanya sebagai istri yang mengasuh anak dan melayani suami, namun juga menjadi bagian dari tulang punggung keluarga. Norma sosial berpotensi membentuk kewenangan atas kepemilikan sumberdaya berdasarkan jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan ungkapan Irianto (2004;62) bahwa

perlunya perhatian terhadap masalah akses perempuan dan laki-laki kepada penguasaan dan pengelolaan sumberdaya, karena kesetaraan dan keadilan gender merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia. Selain itu perlu adanya langkah aktif yang merupakan tindakan konkret untuk memperbaiki bentuk diskriminasi gender dalam rumah tangga dan masyarakat.

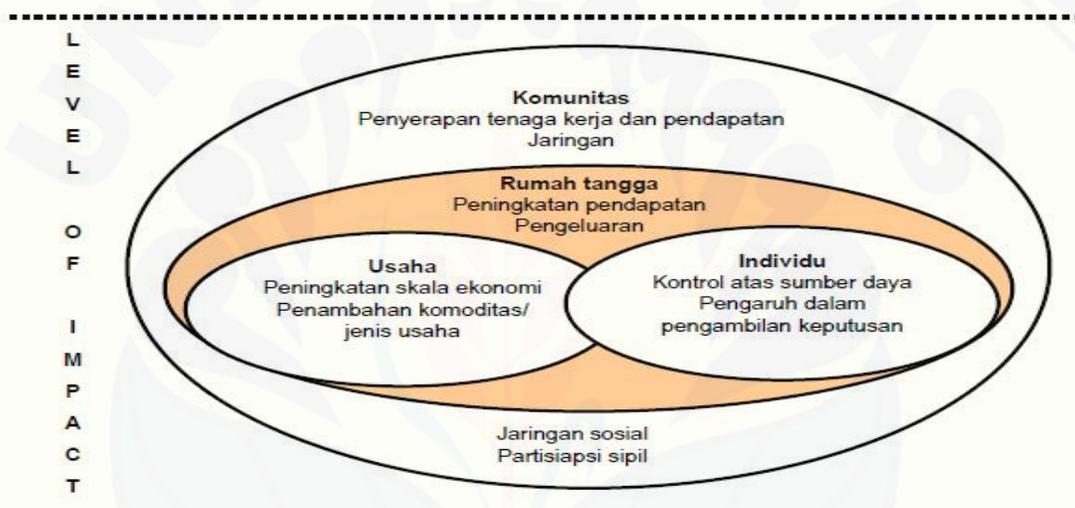
Pola kelembagaan inilah yang oleh para kaum feminis disebut dengan pengarusutamaan gender. Seperti yang diungkapkan oleh bu EL berikut ini:

“Kalau suami saya kerjanya sebagai sopir truk mas, sehingga kadang-kadang mendapat uang, kadang-kadang juga pulang dengan tangan kosong. Makanya saya memberanikan diri untuk ikut berusaha mencari uang juga dengan jualan LPG ini. Kalau sekarang penghasilan saya lebih banyak jika dibandingkan dengan suami,” tuturnya.

Ungkapan senada juga datang dari bu WR yang menyebutkan bahwa posisinya dalam rumah tangga tidak seperti dulu lagi. Sekarang dia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai penjahit. Yang dapat mendapatkan penghasilan sendiri dan tidak hanya bergantung dari usaha suami. Hal inilah yang kemudian dikatakan oleh North (1996) menjadikan sistem kelembagaan sektor informal juga semakin kuat. North (1996) memberikan pandangan bahwa ada 5 (lima) asumsi yang mempengaruhi perubahan suatu kelembagaan yaitu; *Pertama*, interaksi yang berkelanjutan antara kelembagaan dan organisasi dalam situasi ekonomi yang terbatas, oleh sebab itu persaingan merupakan kunci untuk perubahan kelembagaan; *Kedua*, persaingan mendorong organisasi untuk terus menerus berinvestasi dalam keterampilan dan pengetahuan untuk bertahan. Berbagai macam keahlian dan pengetahuan individual dan organisasi akan mengembangkan persepsi tentang peluang, dan karenanya pilihan yang akan menambah perubahan pada organisasi; *Ketiga*, kerangka kerja kelembagaan akan memberikan insentif secara maksimum kepada mereka yang memiliki keterampilan dan pengetahuan; *Keempat*, persepsi dibentuk dari perilaku mental individu; *Kelima*, lingkup ekonomi, yang saling melengkapi dalam menjalin kerjasama dengan kelembagaan lain diharapkan dapat

membuat perubahan kelembagaan yang saling menguntungkan dan saling ketergantungan.

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perempuan miskin yang mendapatkan layanan keuangan mikro diharapkan memberikan berbagai dampak positif. Berdasarkan konsep *AIMS Conceptual Framework* (Sebtad, et.al., 1999), dampak tersebut diukur dari level keluarga, usaha kecil yang dijalankan, level individu, level komunitas, jaringan sosial, dan partisipasi sosial. Secara skematis dampak dari layanan keuangan mikro tersebut dapat digambarkan seperti pada bagan berikut ini.



Gambar 4.4 Dampak Layanan Keuangan Mikro bagi Aktivitas Ekonomi yang Dilakukan oleh Perempuan Miskin (Sumber: Sebtad, et.al., 1999)

Dapat dijelaskan bahwa adanya suatu komunitas usaha maka akan menambah penyerapan tenaga kerja dan pendapatan jaringan. Bahkan membuat jaringan sosial dan partisipasi masyarakat menjadi meningkat. Sehingga dengan peningkatan itu juga berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga sekaligus pengeluaran yang ada. Hal itu terjadi karena adanya peningkatan skala ekonomi penambahan komoditas/ jenis usaha sehingga menjadikan pendapatan atau pengeluaran bertambah. Sedangkan secara individu, keberdayaan perempuan itu membuat mereka memegang kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusannya.

Hal ini akhirnya sejalan dengan yang dikatakan oleh Fakih (2006:145), bahwa sebagai sekumpulan pemikiran, teori feminis berangkat dari kesadaran, asumsi, dan kepedulian terhadap ketidakadilan, ketimpangan, penindasan terhadap kaum perempuan, serta merupakan gerakan untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi. Oleh sebab itulah analisis gender digunakan untuk menemukan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender dalam proses pembangunan menuju tatanan masyarakat yang lebih dinamis.

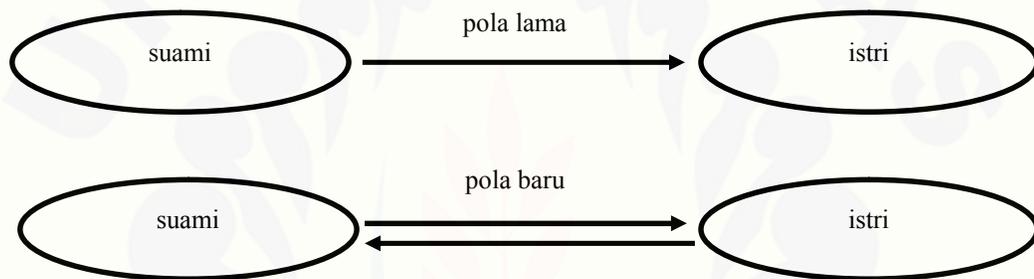
Dalam masyarakat sendiri telah berkembang mekanisme layanan keuangan yang bermanfaat bagi orang miskin, misalnya *rotating savings and credit association* (ROSCA), arisan, pegadaian, dan bank thithil atau layanan keuangan harian yang dikelola sebagaimana layaknya bank oleh perorangan ataupun koperasi. Lembaga serta mekanisme layanan keuangan ini tidak selalu efisien dan menjadi pilihan yang menyenangkan bagi masyarakat miskin. Namun keberadaannya menunjukkan bahwa kebutuhan finansial masyarakat miskin sebenarnya sudah cukup berkembang dalam berbagai variasinya, dari yang bersifat individual sampai kelompok, dari yang sangat ramah dan empati terhadap kesulitan masyarakat miskin sampai yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat miskin. Secara umum tujuan program *microfinance* adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan keluarga akan sekaligus meningkatkan kesejahteraan anak.
2. Program yang ditujukan bagi perempuan miskin merupakan salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Mengaitkan kredit serta tabungan dengan ranah lain akan meningkatkan pula keseluruhan investasi dalam kesehatan, pendidikan, dan lingkungan anak.

Itu juga menjadi acuan atas keberhasilan *microfinance* dalam memberikan akses perkreditan kepada masyarakat. Sehingga pasca menerima pinjaman, masyarakat dapat berusaha dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Perubahan pola kelembagaan rumah tangga terhadap minat wirausaha para kaum ibu-ibu menjadi hal yang baru yang dapat kita tarik menjadi sebuah fakta. Pola kelembagaan yang dinamis ini, menjadi sebuah antitesa terhadap kelembagaan rumah

tangga yang lama, yaitu penganut sistem patriarki. Kebebasan berpendapat dan berusaha kaum perempuan menjadikan mereka lebih berdaya saing dan memiliki ketrampilan yang dapat mengembangkan ekonomi keluarganya. Pola lama dimana seorang istri hanya difungsikan sebagai ibu rumah tangga yang menangani anak, memasak dan melayani suami ternyata sudah beralih. Kesadaran melalui pergaulan dan juga media ternyata telah menjadikan istri lebih berdaya guna. Begitu juga dengan seorang suami yang saat ini lebih demokratis terhadap istrinya. Berikut ini adalah perbandingan pola lama dan pola baru, para ibu rumah tangga yang ada di Kecamatan Sumbersari.



Gambar 4.5 Perbandingan Pola Kelembagaan Rumah Tangga Lama dan Pola Kelembagaan Rumah Tangga Baru (Sumber: Hasil Penelitian)

Dapat dijelaskan bahwa dalam pola kelembagaan rumah tangga yang lama, suami memiliki kewenangan penuh untuk mengatur istri, sehingga ditunjukkan dengan garis instruktif. Sedangkan pada pola kelembagaan rumah tangga yang baru terkait dengan minat wirausaha, antara suami dan istri memiliki hubungan yang saling berhubungan atau saling berinteraksi dan saling membantu.

4.2.3 Perubahan Pola Kelembagaan LKM di Sumbersari

Tidak hanya terjadi pada pelaku sektor informal yaitu ibu rumah tangga, perubahan pola kelembagaan juga terjadi pada lembaga keuangan mikro. Sebagai institusi yang memberikan akses permodalan kepada sektor informal, lembaga ini

akhirnya juga melakukan penyesuaian kelembagaan. Hal itu terjadi baik di lembaga koperasi, BPR, BRI, BTPN mikro, bahkan beberapa program buatan pemerintah daerah seperti PNPM dan juga Bank Gakin. Menurut ekonomi kelembagaan baru kegagalan pasar disebabkan karena aktivitas ekonomi diserahkan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan lembaga pemerintah sehingga pengalaman 1930-an memberikan pelajaran bahwa mekanisme kelembagaan dibutuhkan untuk menghindari kegagalan pasar. Kegagalan kelembagaan tersebut menurut Bardhan (1989) merujuk kepada struktur kontrak dan hukum, serta regulasi dari penegakan pihak ketiga (*rules of third party enforcement*) yang lemah, padahal semua itu harus diperkuat untuk menjalankan transaksi pasar (Yustika, 2006). Atas dasar itulah, pemerintah juga memiliki program hasil dari kebijakan yang juga membantu UMKM, dengan membentuk LKM sendiri.

Patut disadari bahwa kelembagaan tidaklah statis, namun dinamis sesuai dengan interaksi ekonomi yang mempertemukan antar kepentingan. Di luar itu, sifat dinamis dari kelembagaan juga disebabkan oleh berubahnya nilai-nilai dan kultur masyarakat seiring dengan perubahan masa. Dengan begitu, kelembagaan pasti akan berubah sesuai dengan tantangan atau kondisi jaman. Pada titik ini, perubahan kelembagaan memiliki dua dimensi. Pertama, perubahan konfigurasi antarpelaku ekonomi akan memicu terjadinya perubahan kelembagaan (*institutional change*). Dalam pendekatan ini, perubahan kelembagaan dianggap sebagai dampak dari perubahan (kepentingan/konfigurasi) pelaku ekonomi. Kedua, perubahan kelembagaan sengaja didesain untuk memengaruhi (mengatur) kegiatan ekonomi. Pada posisi ini, kelembagaan ditempatkan secara aktif sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi (termasuk aktor-aktor yang terlibat di dalamnya). Dari dua spektrum tersebut, dapat diyakini bahwa perubahan kelembagaan sama pentingnya dengan desain kelembagaan itu sendiri (Yustika, 2006).

Dalam hal kelembagaan lembaga keuangan mikro (*microfinance institution*) teori itu akhirnya berjalan. Jika sebelumnya nasabah yang mencari lembaga keuangan untuk melakukan pinjaman modal, saat ini hubungannya sudah berbeda. Lembaga

keuangan seperti koperasi, BPR dan bank mikro swasta yang menjemput bola, menawari para perempuan pekerja sektor informal ini untuk meminjamkan kreditnya. Bahkan beberapa inovasi produk jasa keuangan di jajakan guna mempengaruhi para nasabah untuk mengambil modal dari lembaga keuangan tertentu itu. Seperti yang dikatakan oleh DN (32) tahun yang menjadi marketing dari *microfinance* Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) bahwa saat ini bank yang butuh nasabah supaya menggunakan uangnya sebagai modal usaha. Hal ini terbalik dengan beberapa tahun lalu dimana nasabah yang butuh bank untuk meminjam modal. Bahkan dengan terminologi yang baru itu, BTPN melakukan pelayanan maksimal yang diantaranya adalah memudahkan para nasabahnya untuk tidak usah kemana-mana jika ingin mengangsur kreditnya. Mereka tinggal memberikan pesan singkat melalui handphone, yang selanjutnya kasir BTPN yang akan datang kepada nasabah.

“Kalau sistem yang lama, setiap peminjam diharuskan untuk mengembalikan atau mengangsur kreditnya ke kantor bank yang dipinjami. Hal ini akan memakan waktu, apalagi jika mereka adalah pada wirausahawan yang setiap saat harus melayani pembeli. Sehingga inovasi pelayanan dari setiap *microfinance* dilakukan salah satunya seperti yang dilakukan oleh BTPN dengan menggunakan kasir pick up”.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh SG karyawan Permodalan Nasional Madani (PT. PNM Persero). Pemuda asal Patrang yang bekerja di PNM area kampus ini mengaku jika banyak pedagang kaki lima di wilayah kampus yang menjadi nasabahnya. Sehingga dengan kesibukan para pedagang ini, maka sistem penagihannya dilakukan oleh pekerja tersendiri yang mendatangi nasabah, setelah dipastikan nasabah itu akan mengangsur tagihannya.

“Kayaknya semua perbankan mikro melakukan hal itu, karena itu bagian dari pelayanan supaya dapat memuaskan nasabah. Jika harus ke kantor bank pemberi kredit, banyak nasabah yang tidak dapat karena keterbatasan waktu, lebih baik dilakukan pick up atau penjemputan atas pembayaran mereka, sehingga resiko menunggak menjadi kecil”.

Sementara itu menurut RK, karyawan KSP Makmur Jaya yang beralamat di Mangli, setiap hari dia memasarkan kredit mikro di sekitar kota Jember sampai di wilayah Summersari. Dia mengaku jika proses kredit dari KSP yang dikelolanya cukup simpel, yaitu hanya membutuhkan foto copy KTP saja, uang langsung dapat dicairkan saat itu juga. Dengan proses yang cepat itu, maka jika ada kebutuhan mendadak dari para ibu rumah tangga yang mau meminjam, maka akan cepat terselesaikan. Jumlah pinjamannya juga bervariasi antara seratus ribu hingga satu juta rupiah.

“Ya setiap hari di daerah sini mas, kalo kantor saya di Mangli dekat lampu merah perempatan Mangli. Kita nawarkan kredit kecil-kecilan saja, kalau ada tempat usahanya gini ini, dapat kita pinjami sampai 1 juta, tetapi kalau tidak ada tempat usahanya ya hanya ratusan ribu saja. Pembayarannya seminggu sekali, sampai 10 kali angsuran ”.

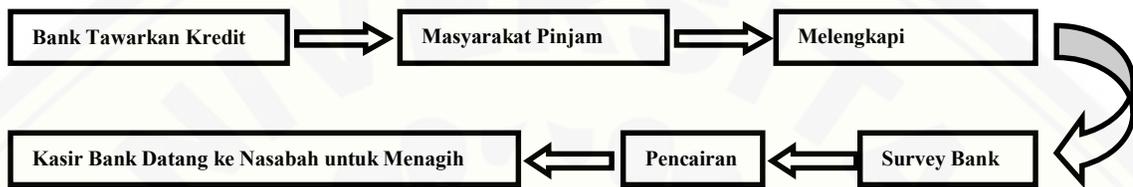
Atas temuan dilapangan tersebut, dapat digambarkan proses peminjaman uang kepada LKM dengan model lama sebagai berikut:



Gambar 4.6 Alur Proses Peminjaman Kredit Model Lama (Sumber: Hasil Penelitian diolah)

Dari gambar 4.6 dapat dipaparkan bahwa, proses peminjaman uang oleh masyarakat dilakukan dengan cara masyarakat mendatangi LKM yang ada di wilayah tersebut. Pasca menerima informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi, maka masyarakat harus menyiapkan persyaratan itu untuk kemudian di survey oleh pihak bank yang bersangkutan. Setelah dikatakan bagus dan layak menerima kredit, pihak bank akan memanggil nasabah itu dan mencairkan sejumlah uang yang dipinjamkan itu. Baru dalam bulan selanjutnya, nasabah akan melakukan pengangsuran ke kantor bank yang dipinjami modal tersebut.

Pola itu akhirnya direvisi oleh berbagai lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Sumbersari. Hal itu terjadi karena dengan pola lama itu, masyarakat yang akan meminjam uang ke LKM masih direpotkan dengan mendatangi LKM yang ada. Faktor kompetisi antar LKM untuk mendapatkan nasabah yang banyak juga menentukan adanya perubahan pola lama itu. Untuk pola baru alur peminjaman modal adalah sebagai berikut:



Gambar 4.7 Alur Proses Peminjaman Kredit Model Baru (Sumber: Hasil Penelitian diolah)

Berbeda dengan gambar 4.6, pada gambar 4.7 dijelaskan bahwa perubahan yang mendasar dari sistem yang berlaku di berbagai bank yang ada di Sumbersari. Dan sistem itu juga menjadi penyebab perubahan pola kelembagaan setiap bank yang ada. Proses kredit dimulai dari penawaran kredit dari pihak perbankan melalui marketing keuangan yang ada, selanjutnya calon nasabah yang tertarik dan akan meminjam uang akan melengkapi berkas persyaratan yang ada, untuk selanjutnya dilakukan survey atau penilaian atas agunan oleh pihak bank. Baru setelah mendapat kelayakan, maka uang dapat dicairkan. Dalam melakukan pengangsuran para nasabah juga tidak akan repot lagi mendatangi kantor bank yang ada, tetapi hanya tinggal memberitahukan melalui telephon, maka kasir akan datang ketempat nasabah.

Aneka macam kemudahan ini menjadi nilai tawar tersendiri dalam proses penawaran jasa keuangan mikro di Sumbersari. Sehingga menjadikan banyak pilihan bagi ibu rumah tangga yang akan meminjam uang kepada lembaga keuangan yang ada. Hal ini juga menjadi suatu hal yang baru yang mempengaruhi kelembagaan bank di berbagai wilayah termasuk di Kecamatan Sumbersari.

Selain lembaga keuangan jenis perbankan, di wilayah Sumbersari juga ada lembaga keuangan dari produk kebijakan seperti PNPM Perkotaan dan juga Bank Gakin. Dalam sistem yang dibangun oleh kedua lembaga itu sangatlah berbeda dengan yang ada di lembaga keuangan jenis perbankan. Program PNPM Perkotaan yang sudah lama dikonsepsi sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat perkotaan telah menjelma menjadi Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang banyak digandrungi oleh masyarakat. Dalam lembaga yang satu ini, konsep awalnya bertumpu pada pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Dari LKM inilah maka akan menyaring masyarakat dengan kategorisasi tertentu yang akan dijadikan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Para anggota KSM merupakan kaum produktif yang dapat dibina untuk mengembangkan potensi diri yang dapat menghasilkan produk tertentu guna menghindari jerat kemiskinan. Sehingga dalam program pendampingan yang dilakukan, juga difasilitasi dengan modal usaha yang diberikan kepada anggota KSM. Pola yang diterapkan adalah dengan tanggung renteng, yaitu anggota KSM yang berjumlah sekitar 5 orang akan menerima pinjaman dari LKM, yang ada di kelurahan dengan jumlah tertentu untuk digunakan sebagai modal usaha, dan akan dikembalikan dengan cara mengangsur oleh seluruh anggota.

Adapun jasa atau bunga yang diberikan atas simpanan itu tergolong rendah yaitu antara 5 persen sampai 10 persen. Alokasi dari jasa itu akan digunakan sebagai tambahan kas, yang nantinya membuat jumlah uang bergulir akan semakin besar. Dan berdampak pada sasaran program yaitu masyarakat miskin yang semakin banyak. Seperti yang diungkapkan oleh anggota LKM Sumbersari, WT berikut ini:

“Kalau sistem yang diterapkan PNPM Perkotaan adalah pinjaman bergulir dengan sistem tanggung renteng. Dimana dalam satu kelompok tidak dapat bertindak sendiri atau menjadi dominasi. Jika ada pinjaman sebesar misalkan 1 juta ya harus dibagi 200 ribu tiap anggota. Itu juga harus dialokasikan untuk modal usaha, sebagai pancingan untuk terlepas dari kemiskinan”.

Pada titik tertentu dapat urai bahwa modal yang diberikan akan menjadi pemicu supaya usaha yang dikelola oleh para ibu itu lancar. Salah satu nasabah PNPM bu SR mengaku jika sudah lama menjadi binaan PNPM Perkotaan. Dia mengaku beruntung

mendapatkan pinjaman dengan bunga yang relatif kecil itu. Bahkan dengan modal dari PNPM itu, dia dapat mendirikan usaha yang dia jalani saat ini.

“Saya ikut juga PNPM, tapi sekarang sudah habis, trus katanya tunggu 4 bulan lagi mau cair mungkin 2 jutaan ini, dan setorannya ringan itu, bunganya juga kecil. Kalo yang di PNPM bayarnya di kelurahan, ada ketuanya, ketuanya ketat itu, waktunya bayar ya harus bayar gitu mas, biar cepet lunas, gak nunggu-nunggu. Kalo gitu kan gak ada yang molor-molor mas, ada ketuanya.”

Secara spasial terdapat preposisi empiris yang dapat dikemukakan terkait perubahan regional. Hasil temuan empiris mencatat bahwa 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbersari memiliki program PNPM yang sama. Berbeda dengan PNPM Perkotaan, Bank Gakin yang merupakan hasil dari kebijakan Pemkab Jember juga menyediakan permodalan kepada para anggotanya yang terdiri dari ibu rumah tangga produktif dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Pemkab Jember membentuk institusi sosial yang dinamakan dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan institusi ekonomi yang disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) “Bank Gakin”. Anggota Bank Gakin secara otomatis menjadi anggota Kelompok Masyarakat. Upaya yang dimulai sejak tahun 2005 dengan membentuk Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) terus dilakukan hingga sekarang.

Misi kelembagaan PUM-RTM bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan membangun usaha mikro. Usaha ini merupakan usaha alternatif atau usaha sampingan bagi rumah tangga miskin. Selain langsung menangani sasaran rumah tangga miskin, PUM-RTM berorientasi pada kesinambungan usaha. Seperti halnya dalam pengembangan usaha lain dan menjamin keberlanjutan. Mekanisme pengembangan usaha PUM-RTM terdiri dari penguatan institusi, penguatan modal usaha dan peningkatan keterampilan. Desain Bank Gakin diinspirasi oleh Grameen Bank di Bangladesh. Selama sembilan tahun sejak 2005, Bank Gakin di Kabupaten Jember telah berkembang menjadi sebanyak 433 kantor cabang, dengan anggota para ibu rumah tangga sejumlah 29.169 orang dengan omset pinjaman sebesar Rp

40.546.123.260. Bank Gakin dapat dikategorikan sebagai institusi informal. Bank Gakin dikelola para sukarelawan dengan insentif yang terbatas. Seperti halnya dengan Grameen Bank, Bank Gakin juga memberi pinjaman secara berkelompok dengan pola tanggung renteng, namun pada Bank Gakin pinjaman diberikan secara bersamaan dengan nilai disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas usaha anggota. Seperti yang diungkapkan oleh subjek penelitian NWS berikut ini:

“Pola kelembagaan Bank Gakin sebenarnya mirip dengan koperasi. Disitu ada simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan pokok Bank Gakin ditetapkan sebesar 50 ribu setiap anggota, simpanan ini dapat diambil lagi jika yang bersangkutan keluar dari Bank Gakin. Sementara simpanan wajib di tetapkan sebesar 10 ribu setiap anggota meminjam uang dari Bank Gakin. Sedangkan simpanan sukarela terbagi menjadi dua, yaitu simpanan pendidikan yang setiap saat dapat di ambil, dan simpanan hari raya yang hanya dapat diambil sebelum hari raya Idul Fitri saja. Proses pinjaman di Bank Gakin dilakukan dengan sistem tanggung renteng sesama anggota pokmas”.

Dalam melakukan aktivitasnya, setiap Bank Gakin akan dipantau oleh petugas pendamping dari Dinas Koperasi dan UMKM Jember. Sehingga pengurus akan diberikan pengetahuan mengenai pembukuan dan juga sistem administrasi yang baik. Harapannya dengan sistem ini maka Bank Gakin akan semakin baik. Namun demikian, mudah dan murah nya sistem peminjaman modal ini, ternyata juga menemui permasalahan. Dari catatan yang dimiliki oleh NWS sebagai Ketua Bank Gakin di Sumpalsari, bahwa dari 40 anggota yang aktif pada saat pendirian, saat ini hanya tinggal 30 saja. Hal itu terjadi karena kurangnya pendampingan dari dinas terkait. Sehingga transformasi informasi dan juga pembinaan usaha tidak berjalan dengan baik.

Bahkan faktor sosial, seperti hubungan personal antar anggota sangat menentukan baik buruknya kelompok tersebut. Sehingga jika ada ketidakcocokan antar anggota kelompok, maka kelompok itu rentan bercerai berai. Faktor lain yang membuat anggota tidak aktif adalah hilangnya modal yang didapat dari pinjaman, seperti yang dikatakan oleh NWS berikut ini:

“Dulu ada juga anggota kita yang rumahnya di belakang kantor kelurahan Kebonsari itu, namanya mbak YN. Dia jualan pracangan sayur. Mendapat pinjaman dari kelompok sebesar 300 ribu. Selang beberapa waktu dibuat modal, hasilnya sama modalnya di curi orang. Dia datang kesini nangis-nangis. Ya akhirnya macet hingga sekarang, dan orangnya berhenti dari Bank Gakin” ungkapnya.

Penataan kelembagaan supaya sebuah organisasi atau institusi keuangan menjadi lebih baik dan lebih inklusif, memang menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Hal itu senada dengan ungkapan Yustika (2006:26) yang memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia (*humanly devised*) untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Melalui rangkaian sejarah, kelembagaan dapat meminimalisasi perilaku manusia yang menyimpang telah berhasil menciptakan ketertiban dan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan pertukaran (*exchange*). Jika penataan kelembagaan tidak dilakukan maka akan terjadi hal negatif yang seperti pada emik tersebut. Hal ini menjadi wajar karena kelembagaan merupakan sesuatu yang inti dari sebuah organisasi. Terbentuknya kelembagaan yang baik, maka akan diikuti oleh modal sosial yang baik.

4.2.4 Proposisi Hasil Temuan Penelitian di Lapangan atas Pola Kelembagaan Ibu Rumah Tangga dalam Preferensi LKM di Kecamatan Sumbersari

Dalam berjalannya waktu, *microfinance* banyak dikaitkan dari sudut kelembagaan yang dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola kebijakan (Syaifullah, 2013). Sementara itu dalam UU No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Khususnya aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, (UU No. 1 Tahun 2013). Atas teori itu, perubahan pola kelembagaan pada rumah tangga dan lembaga keuangan mikro, menjadi fenomena yang saat ini terjadi dimasyarakat. Perubahan pola kelembagaan yang didorong oleh minat wirausaha para kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga ini ternyata telah

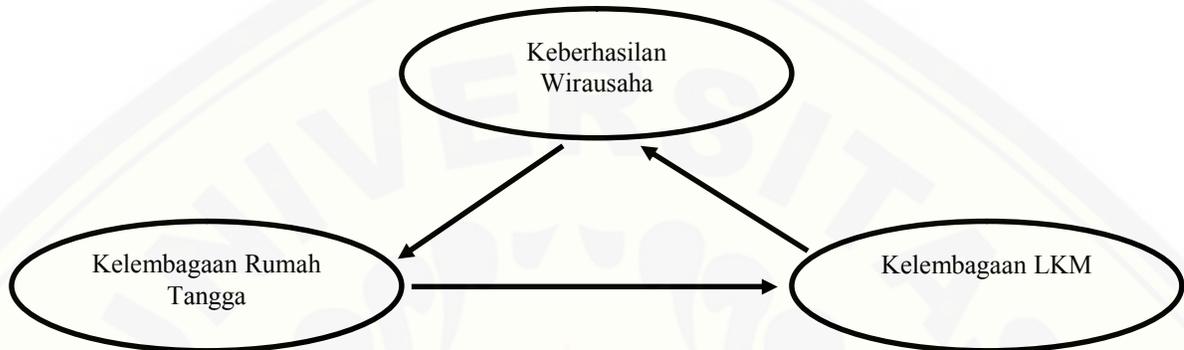
membuat lembaga keuangan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada perubahan paradigma, jika dahulu masyarakat saja yang butuh lembaga keuangan, maka saat ini keduanya saling membutuhkan. Hal ini menjadikan interaksi timbal balik yang menarik antara ibu rumah tangga yang berwirausaha dengan lembaga keuangan.

Adanya pola kelembagaan lama dan pola kelembagaan baru pada lembaga keuangan formal seperti perbankan dan koperasi, adalah penjelmaan dari adaptasi pihak perbankan terhadap kondisi terkini. Model jemput bola, mempermudah administrasi pengambilan kredit serta menawarkan fasilitas simpan pinjam bermacam-macam produk menjadi ciri dari kelembagaan baru lembaga keuangan formal. Sehingga bermunculan banyak marketing yang mendatangi lapak sektor informal untuk menawarkan kredit.

Keberadaan lembaga keuangan nonformal juga mewarnai program kredit di masyarakat. Adanya lembaga peminjam seperti PNPM yang menerapkan sistem tanggung renteng telah menjadi perhatian masyarakat. Begitu juga Bank Gakin yang muncul dengan mengadopsi konsep Grameen Bank, juga menjadi warna baru dalam sistem kelembagaan lembaga keuangan mikro di masyarakat. Ada beberapa evaluasi dari sistem ini yang perlu diperbaiki, yaitu sistem pendampingan yang lebih komprehensif. Hal itu terjadi karena sasaran dari Bank Gakin adalah masyarakat miskin, sehingga mereka memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap kemiskinan dan kerugian usaha. Dengan pendampingan yang baik, maka masyarakat dapat terbantu dari belenggu kemiskinan, serta dapat meningkatkan produktivitasnya.

Atas temuan dilapangan tersebut, maka peneliti mengkategorikan perubahan pola kelembagaan yang terjadi dalam kelembagaan rumah tangga maupun kelembagaan lembaga keuangan merupakan pola dinamis. Dimana dalam faktanya perubahan pola itu adalah hasil penyesuaian diri atas lingkungan yang terlebih dahulu mengalami interaksi menuju kearah yang lebih baik. Jika digambarkan maka, perubahan pola kelembagaan rumah tangga mendorong perubahan pola kelembagaan pada lembaga keuangan. Dan pola kelembagaan lembaga keuangan akan mendorong

terjadinya keberhasilan berwirausaha. Sedangkan keberhasilan berwirausaha akan kembali mendorong perubahan pola kelembagaan rumah tangga dan lembaga keuangan. Dalam skema singkat, pola kelembagaan itu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.8 Hubungan Kelembagaan (Dinamis) antara Rumah Tangga dan Kelembagaan LKM (Sumber: Hasil Penelitian diolah)

Pola kelembagaan yang dinamis ini tak ubahnya seperti sebuah siklus yang saling terkait dan tidak dapat terlepas. Hal itu terjadi karena ada hubungan yang saling menguntungkan dari ketiga unsur itu.

4.3 Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Pasca Meminjam Modal di LKM dan Implikasinya

4.3.1 Pendapatan Rumah Tangga Sebelum Meminjam di LKM

Keputusan para ibu rumah tangga untuk mendirikan usaha sendiri, dan keluar dari hegemoni suaminya, harus mendapatkan perhatian yang lebih. Namun keputusan seperti itu belum tentu berjalan lancar. Karena mereka harus meninggalkan kebiasaan lama yang sudah dijalani sebelumnya. Keputusan menekuni sektor informal dengan harapan menambah pendapatan keluarga itu dirasanya sebagai jalan terbaik dari pada berpangku tangan. Pada tahun 1993 World Bank melaporkan bahwa sektor formal hanya menampung 32 persen dari populasi tenaga kerja, sedangkan sektor informal,

mampu menampung 68 persen. Backer (1989) dalam Sulistiyani (2004) memaparkan bahwa jumlah tenaga kerja sektor informal adalah 70 persen di sub Afrika Sahara, 62 persen di Afrika Utara, 60 persen di Amerika Latin dan 59 persen di Asia. Ini menunjukkan jika sektor ini memang dapat menyerap tenaga kerja termasuk dari para ibu rumah tangga.

Persoalan permodalan yang selama ini sering dikeluhkan juga semakin mudah didapat dengan adanya lembaga keuangan yang setiap hari menawarkan produknya berupa jasa kredit kepada mereka. Hal itu terbukti dengan penelitian ini, bahwa pengakuan para ibu rumah tangga di Kecamatan Sumbersari kebanyakan meminjam modal kepada lembaga keuangan untuk mendirikan usahanya. Seperti yang diungkapkan oleh bu NR bahwa modal awalnya menggunakan uang sendiri, namun untuk menambahi supaya usahanya dapat berjalan dia akhirnya meminjam uang di bank harian.

“Awalnya hanya punya uang sedikit, terus ada tetangga yang berhutang di bank harian, akhirnya saya ikut untuk namabahi modal saya. Sejak itulah saya punya warung kecil-kecilan ini. Kalau sekarang saya ngutangnya gak lagi ke bank harian, tapi karena butuh modal yang besar supaya dapat memperbaiki warung, saya pinjam ke BRI”.

Penuturan itu menjadi bukti bahwa ada peningkatan pendapatan setelah bu NR mendirikan warung nasi dengan modal sebagian dari dia berhutang kepada bank harian. Meskipun setelah usahanya lancar, dia akhirnya mengambil pinjaman yang lebih besar dengan meminjam di BRI.

Namun demikian, tidak semua perempuan ini mengalami seperti yang dialami oleh bu NR, yang mengalami peningkatan pendapatan setelah dipinjami modal oleh lembaga keuangan. Seperti yang dialami oleh bu EL, yang sempat terjerat hutang di bank harian. Setiap saat dia mengeluh karena sebagian dari pendapatannya terkuras untuk mengembalikan tagihan. Padahal sebelum berhutang, dia sudah punya modal yang didapat dari suami yang bekerja sebagai sopir. EL mengaku pendapatannya

malah mengalami penurunan. Namun setelah dia terlepas dari bank harian, dia ikut Bank Gakin dan mulai merasakan pendapatannya jauh lebih besar.

“Dulu setiap waktu harus mengangsur ke bank thitil mas. Ngenes kalau ikut bank thitil mas, setiap saat ditagih kerumah, bunganya besar pula. Tetapi kalau sekarang kita sudah ikut Bank Gakin, yang diurus oleh bu Wayan. Kalau Bank Gakin sistemnya berbeda, dan bunganya tidak besar, sehingga kita lebih enak.

Banyak yang mengeluh atas pinjaman yang dilakukannya ke lembaga keuangan tersebut. Namun relasi saling menguntungkan itu masih berjalan hingga sekarang. Meskipun pinjaman itu dilakukan karena penawaran dari pihak lembaga keuangan terlalu memaksa, tetapi mereka diuntungkan dengan pinjaman itu. Seperti yang dialami oleh bu NB, yang mengaku telah terbantu dengan pinjaman dari bank harian.

“Saya ngambil uang di bank harian buat modal awal buka usaha. Mahal sih mas, tapi butuh, pinjam ke tetangga gak ada, makanya minjam bank. Kalau gak dapat pinjaman malah saya tidak dapat usaha. Tapi semua itu saya masih menjangkau jumlah angsurannya”.

Fenomena inilah yang terjadi di masyarakat utamanya pada ibu rumah tangga yang memiliki usaha sampingan. Sebelum mengenal lembaga keuangan, banyak dari mereka yang tidak memiliki modal untuk mendirikan usaha. Namun ada juga yang sudah memiliki modal, namun masih kurang. Relasi saling menguntungkan itu terjadi menyempang hasil dari hutangannya dipakai untuk usaha produktif. Karena uang itu akan berputar, sehingga dapat digunakan untuk mengembalikan, dan sisanya masuk dalam kategori pendapatan.

Begitu juga yang dialami JK, dia mengaku pada awalnya hanya dimodali suami dengan uang pas-pasan saja. Namun kali ini dia berani berhutang ke bank karena usahanya sudah semakin maju.

“Awalnya dimodali suami, tapi supaya berkembang akhirnya pinjem buat beli alat-alatnya ini mas. Kalau tidak mau pinjam di bank apa ada yang mau memberikan pinjaman mas-mas. Untung ada bank yang mau minjami, sehingga usaha saya menjadi lancar. Tapi setiap bulan ya harus saya sisihkan untuk melunasinya mas”.

Adanya lembaga keuangan ini dirasanya sangat membantu karena dengan meminjam di LKM itu warungnya dapat berkembang dan tidak gulung tikar. Hal ini membuktikan bahwa LKM memberikan manfaat dan menjadi alternatif untuk mengembangkan ekonomi keluarga.

4.3.2 Dinamika Pendapatan Rumah Tangga Pasca Meminjam di LKM

Studi yang dilakukan oleh Todaro (2000), dikatakan bahwa sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya di sektor UKM biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Pada umumnya mereka tidak mempunyai ketrampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja. Oleh sebab itu, produktivitas dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Selain itu, mereka yang berada di sektor tersebut juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti yang dinikmati rekan-rekan mereka di sektor lain.

Dalam konteks institusi dalam hubungannya dengan kinerja ekonomi, studi yang dilakukan oleh Brunt (2007) dalam Yustika (2006) menyatakan bahwa reformasi institusi tertentu hanya sedikit berpengaruh terhadap perekonomian. Dinamika pendapatan rumah tangga pasca meminjam keuangan di lembaga keuangan sangat variatif. Ada yang memang berdampak positif sehingga dengan pinjaman modal itu, seorang ibu rumah tangga menjadi dapat menjalankan usahanya, ada juga yang berdampak negatif, karena dengan pinjaman itu, maka dia sulit mencari keuntungan untuk menambah penghasilan keluarga akibat semua keuntungan itu dialokasikan untuk membayar hutangnya kepada lembaga keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh subjek penelitian berinisial YL berikut ini:

“Kalau tidak punya usaha ya mending gak punya utang di bank mas-mas. Setiap hari jadi pikiran. Tapi kalau ada tempat usaha, dan perlu modal ya harus ambil uang di bank. Kalau untuk usaha pasti lebih menguntungkan uang itu, dan mendapatkan hasil yang lebih”.

Pandangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh HL dimana mendiskripsikan bahwa dengan memiliki pinjaman di KSP dia justru terbebani. Bahkan kehidupannya tak lagi baik jika dibandingkan dengan dahulu sebelum dia kenal dengan lembaga keuangan ini. Dia mengaku kecewa meskipun telah dapat menerima tambahan modal dari bank harian, karena untuk mengembalikan dari pinjaman itu, besarnya hampir dua kali lipat.

“Menghambat sekali ini mas, biasanya uang untuk belanja dapat berlebih, karena pinjaman itu, sekarang uang belanjanya kurang. Sekarang mikirnya hanya kerja mas. Tetapi hasilnya hanya dikasihkan ke orang lain. Pingin menghindar tapi ada saja yang membuat kepingin mengambil lagi”.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan teori Kasmir (2011) yang menyatakan bahwa kredit secara positif dapat meningkatkan pendapatan, karena pemberian kredit dapat menambah modal usaha. Ungkapan menarik bahkan sempat dilontarkan oleh bu NR di Jalan Kalimantan X, bahwa banyak ibu rumah tangga mendekati marketing bank harian karena dia mau meminjam modal. Namun setelah dapat dua atau tiga kali angsuran, bencinya setengah mati melihat pegawai bank harian menagih kerumahnya. Bu NR sendiri merasa lebih baik kehidupannya karena dapat dipinjami oleh BRI dengan bunga yang terjangkau. Dengan pinjaman itu, dia dapat menjalankan usahanya lebih besar lagi. Senada dengan itu pernyataan teoritik dari Mulyono (1987) dan Simorangkir (2005) dalam Kasmir (2011) yang mengatakan bahwa dengan adanya pemberian kredit serta modal yang tinggi akan mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil, karena tingginya tingkat pemberian kredit yang ada akan mampu menambah modal kerja dari suatu usaha sehingga berpengaruh pada pendapatan usahanya. Temuan hasil ini juga didukung temuan empiris oleh Tini

(2008) yang mengatakan bahwa pemberian kredit dan modal berpengaruh positif terhadap penghasilan kotor UKM.

Menurut EL dia sangat terbantu karena ikut dalam Bank Gakin. Dia membandingkan jika dia dulu harus memikirkan cicilan yang lumayan, saat ikut mengambil kredit dari bank harian, saat ini dia merasa lebih ringan. Dia juga mendapatkan jaringan yang lebih luas dalam mengembangkan usahanya, karena dapat mengenal banyak anggota bank gakin di kelurahan yang dia tempati. Sehingga dengan modal sosial yang meningkat itu maka dia juga mengembangkan pemasaran produk yang dia tekuni.

“Kalau dibandingkan dengan dulu saat ikut bank harian ya enak sekarang mas. Kalau di bank harian saya harus membayar 130 ribu atas pinjaman saya yang hanya 100 ribu dan dicairkan hanya 80 ribu. Berarti ada penambahan 50 ribu mas dalam 10 minggu. Bagi kaum ibu yang usaha kecil-kecilan begini ini ya keberatan dengan itu. Kalau sekarang dengan bunga kecil di bank gakin ini kita lebih dapat mendapatkan untukng yang lebih besar” ungkap EL.

Pada aras teoritis dan empiris ada kesamaan paralel dari Munawir (2004) dalam Artini (2009) yang menyatakan bahwa modal mempunyai hubungan terhadap pendapatan, dimana jumlah modal yang dimiliki mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian teoritik dari Tohan (2000) dalam Sihotang (2011) yang menyatakan modal usaha yang tinggi merupakan cara yang paling efisien untuk mempertahankan arus usaha dan mampu mempengaruhi pendapatan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Wiyatmi (2009) yang mengatakan bahwa penggunaan modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan industri kecil.

Konsep pemberdayaan seperti Bank Gakin menjadi trend yang luar biasa setelah keberhasilan dari sistem Grameen Bank di Banglades. Dalam konsep pemberdayaan, memberikan pancing dan kailnya akan lebih bermanfaat dari pada memberikan sebuah ikan kepada masyarakat. (Amien, 2005:183) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi menciptakan intensif dan peluang yang dapat menghapus pemilahan gender, sebab peran ekonomi memungkinkan perempuan berpartisipasi

pada pasar ekonomi (tidak dikala resesi ekonomi saja) dan laki-laki dapat berbagi peran dalam urusan domestik. Pada aras yang sama Mikkelsen (2003:204) menyatakan bahwa untuk memahami kemiskinan mempunyai dimensi gender, maka diperlukan upaya untuk membahas sektor informal dan sektor ekonomi yang tidak dibayar dimana wanita secara tradisional memegang peran utama.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mubyarto dalam Rintuh dan Miar (2005:4) bahwa, sistem ekonomi rakyat adalah system ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Artinya sistem perekonomian dilakukan rakyat tanpa modal besar, dikelola dengan cara swadaya, bersifat mandiri sesuai dengan kearifan lokal masyarakat, serta dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menegaskan bahwa bantuan dana dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Untuk itu perlu konsep ekonomi kerakyatan yang direalisasikan dalam program pembangunan. Kemiskinan dapat dihapus dengan cara memberi ruang gerak yang adil dan proporsional antara laki-laki dan perempuan melalui peningkatan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi dapat memperbaiki kualitas kaum miskin. Upaya ini dilakukan dengan pemikiran bahwa, akses dan pengendalian pendapatan sangat terkait dengan otonomi maupun kewenangan untuk mengelola sumberdaya.

Hal itulah yang harus menjadi kesadaran bersama supaya keterbatasan akses yang dimiliki oleh perempuan dalam mengambil kredit di lembaga keuangan menjadi minim. Perempuan harus mendapatkan informasi yang cukup atas adanya lembaga keuangan yang inklusif, sehingga mereka tidak terperosok pada pinjaman yang diberikan rentenir. Partisipasi gender sebagai model dari konsep pengarusutamaan gender menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga tidak ada skat informasi lagi antar laki-laki dan perempuan, ataupun antar yang kaya dan yang miskin.

Namun demikian, kebijakan pembentukan LKMM Bank Gakin juga seharusnya tidak dimanfaatkan oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan guna individu atau kelompoknya sendiri. Peruntukan LKM yang dimodali oleh pemerintah daerah sebesar Rp 25 juta itu seharusnya untuk masyarakat miskin yang semula telah dilatih berwirausaha melalui PUM RTM.

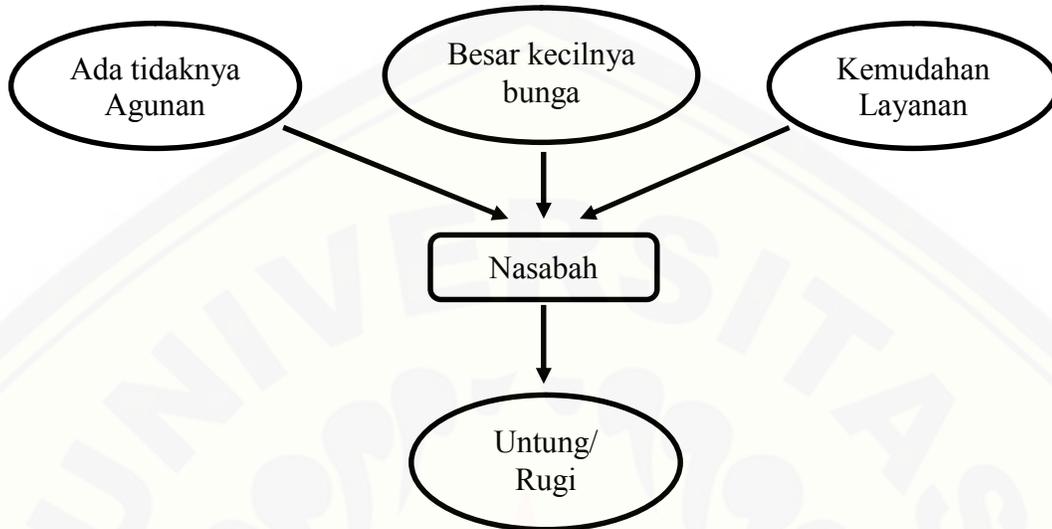
Namun pada kenyataannya banyak yang tidak melalui tahap itu, bahkan istri pejabat juga menjadi bagian dari LKM untuk warga miskin ini. Hal inilah yang akhirnya tidak sesuai dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan.

4.3.3 Proposisi Hasil Temuan atas Dinamika Pendapatan Rumah Tangga dalam Mengakses LKM dan Implikasi yang ditimbulkannya

Terdapat bermacam-macam dinamika yang terbangun atas kredit yang diterima oleh ibu rumah tangga di Kecamatan Sumbersari. Ada yang merasa lebih baik setelah mendapatkan tambahan modal, namun juga ada yang lebih buruk pasca mendapatkan tambahan modal tersebut. Kelembagaan dari lembaga keuangan mikro yang ada sangat mempengaruhi mereka untuk menjadi untung atau merugi atau bahkan cuma impas. Sistem kredit dengan bunga besar, banyak dikeluhkan oleh ibu rumah tangga itu, meskipun pelayanannya baik seperti tanpa agunan dan pencairan secara cepat. Sedangkan pola kelembagaan yang diprogramkan oleh pemerintah seperti bank Gakin masih belum dapat memberikan modal besar, dan terbatas pada orang-orang tertentu saja.

Hal ini harus menjadikan koreksi, supaya akses kredit murah dengan sistem yang lebih baik serta kelembagaan yang kuat karena dilandasi modal sosial, dapat dikembangkan lagi. Meskipun banyak sisi-sisi yang juga harus diperbaiki. Keluhan para ibu rumah tangga atas bunga kredit yang besar, juga harus menjadi koreksi atas sistem keuangan yang dijalankan. Apakah hal itu sesuai aturan ataukah tidak. Berikut adalah gambaran yang dapat disajikan dari hasil penelitian, guna memperjelas adanya beberapa faktor dan imbasnya terhadap nasabah.

Dalam konteks pinjaman kepada lembaga keuangan, ada 3 unsur yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yaitu ada tidaknya agunan sebagai penjamin dalam mengeluarkan kredit, besar kecilnya bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan, serta kemudahan layanan seperti percepatan pencairan dan juga survey yang mudah. Dari ketiga unsur itu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.9 Dinamika Pendapatan yang dialami Nasabah (Sumber: Hasil Penelitian diolah)

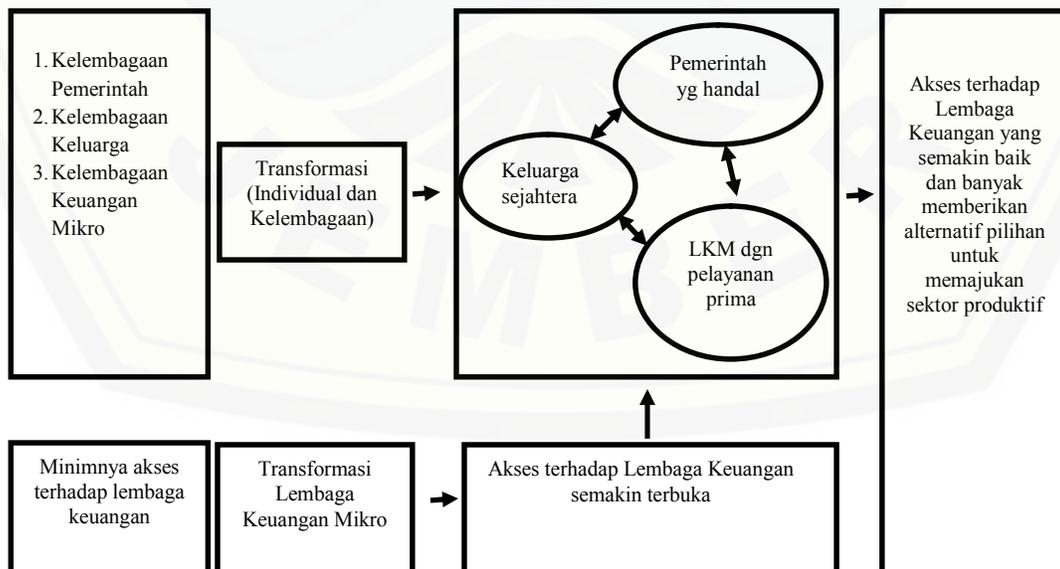
Dari ketiga unsur tersebut, yaitu ada tidaknya agunan sebagai penjamin pinjaman, besar kecilnya bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan, serta kemudahan layanan seperti percepatan pencairan dan juga survey yang mudah, sangat berpengaruh terhadap nasabah akan meminjam uang atau tidak, meskipun besar kecilnya bunga menjadi yang lebih diutamakan oleh para ibu di kecamatan Sumbersari. Hal itu karena ketiga unsur itu akan berimbas kepada pendapatan pasca mengakses lembaga keuangan oleh para ibu rumah tangga itu. Banyaknya ibu rumah tangga yang mengatakan merugi karena meminjam uang, adalah disebabkan oleh besarnya bunga yang diberikan kepada mereka. Hal itu menjadi perhatian para ibu rumah tangga saat ini dalam meminjam uang.

Sedangkan lembaga keuangan yang terbentuk karena kebijakan pemerintah seperti PNPB dan Bank Gakin, lebih terfokus pada modal sosial masyarakat. Kategori bunga sedang dan juga kemudahan dalam pencairan, membuat kedua lembaga ini tetap eksis bahkan semakin besar. Namun demikian jika dalam perjalanan nantinya tidak diikuti dengan pendampingan yang ketat dan baik, maka kedua program ini juga

dapat berhenti keberlangsungannya karena sanksi dari nasabah atau anggota yang tidak membayar hanyalah sanksi sosial dari para anggota lainnya.

4.4 Kontruksi Model Preferensi Ibu Rumah Tangga Terhadap LKM Pilihannya

Kontruksi model preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro sangat membantu dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kelembagaan di sektor keuangan mikro selanjutnya. Hal ini seiring dengan naiknya aktivitas rumah tangga yang didominasi oleh perempuan yang dalam hal ini ibu rumah tangga sebagai penunjang peningkatan pendapatan. Dari penelitian yang sudah dilakukan ini, ternyata menghasilkan kontruksi baru dalam preferensi ibu rumah tangga saat memilih lembaga keuangan yang tepat dalam menunjang usahanya. Kontruksi itu terbangun karena adanya beberapa faktor seperti besarnya bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap nasabahnya, pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dan agunan yang dipersyaratkan oleh pihak lembaga keuangan. Sehingga dengan ketiga faktor itu, maka ada tiga kelembagaan yang perlu dilakukan penataan. Berikut ini, gambar kontruksi model preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro yang berhasil di buat oleh peneliti:



Gambar 4.10 Kontruksi Model Preferensi Ibu Rumah Tangga pada LKM (Sumber: Hasil Penelitian diolah)

Dari gambar 4.10 tersebut dapat dijelaskan bahwa, preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro harus memperhatikan tiga kelembagaan yaitu kelembagaan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kelembagaan keluarga karena ibu rumah tangga adalah bagian dari kelembagaan keluarga dan kelembagaan lembaga keuangan mikro yang melahirkan sistem ekonomi inklusi. Sedangkan saat ini, yang menjadi masalah adalah tumpuan masyarakat atau ibu rumah tangga atas minimnya akses terhadap lembaga keuangan. Dari dua hal itu maka harus ada transformasi individu dan kelembagaan untuk menyikapi persoalan penataan tiga kelembagaan yang ada tersebut. Sedangkan minimnya akses keuangan harus diselesaikan dengan transformasi lembaga keuangan menjadi lembaga yang inklusif sehingga akan berdampak pada akses terhadap keuangan oleh masyarakat menjadi terbuka. Jika akses ini terbuka dan transformasi individu serta kelembagaan terlaksana maka akan membentuk kesejahteraan rumah tangga, terciptanya pemerintah yang handal dan terjadinya sistem keuangan yang baik, inklusif dengan pelayanan prima. Ketiga unsur itu akan saling berhubungan, yang pada akhirnya akses sistem keuangan menjadi lebih tertata dengan baik, dan banyak memberikan alternatif pilihan untuk memajukan sektor produktif.

Perubahan pola kelembagaan yang dinamis terjadi dalam kelembagaan rumah tangga maupun kelembagaan lembaga keuangan. Dalam faktanya perubahan pola itu adalah hasil penyesuaian diri atas lingkungan yang terlebih dahulu mengalami interaksi menuju kearah yang lebih baik. Perubahan pola kelembagaan rumah tangga mendorong perubahan pola kelembagaan pada lembaga keuangan. Dan pola kelembagaan lembaga keuangan akan mendorong terjadinya keberhasilan

berwirausaha, yang muaranya keberhasilan berwirausaha akan kembali mendorong perubahan pola kelembagaan rumah tangga dan lembaga keuangan.

4.5 Limitasi Penelitian

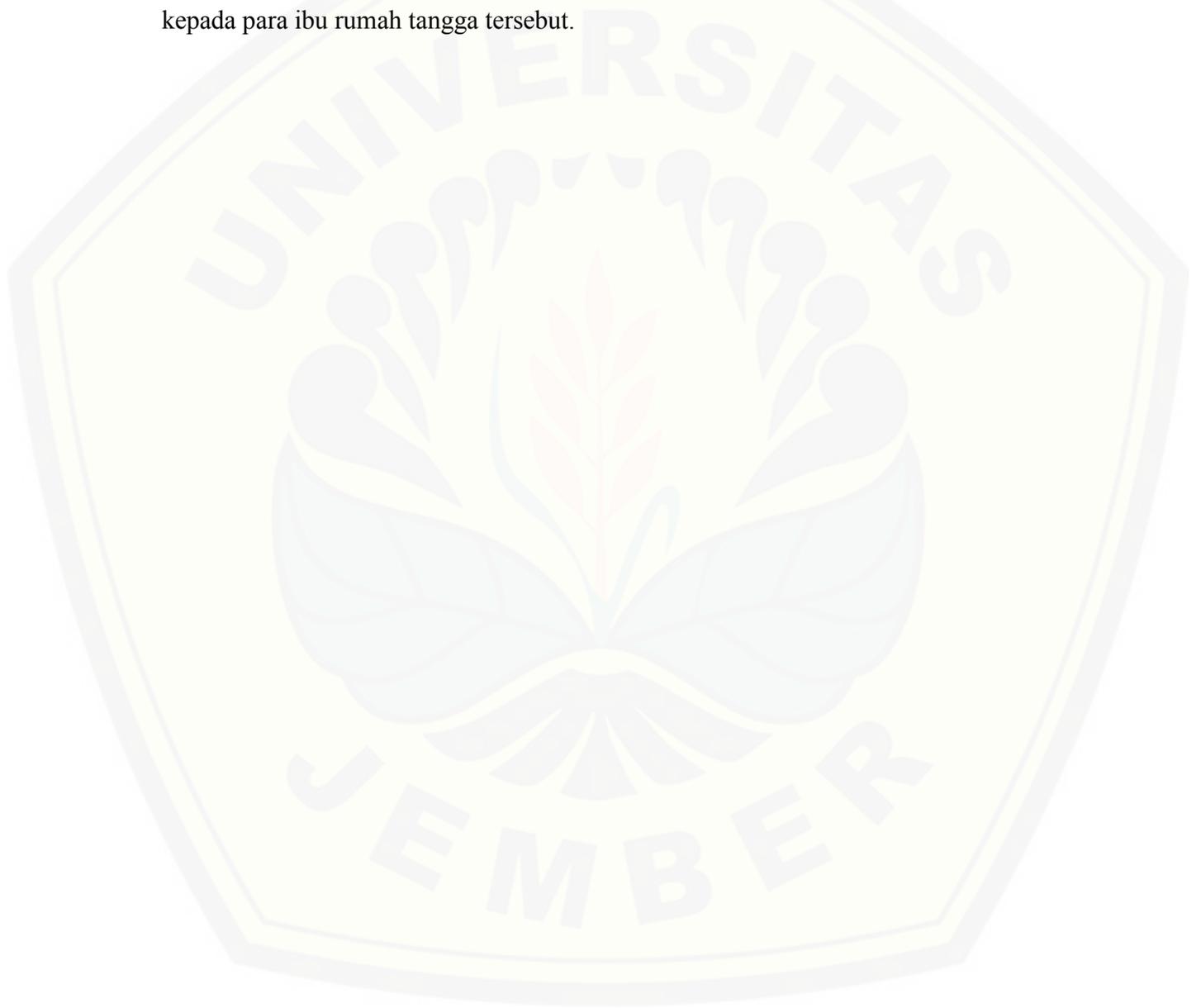
Penelitian tentang preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro terhadap dinamika pendapatan ini merupakan penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember pada tahun 2014. Sehingga penelitian ini memiliki ruang dan waktu tertentu. Hal ini memungkinkan adanya penelitian yang sama namun menghasilkan hasil yang berbeda karena adanya perbedaan tempat penelitian ataupun perbedaan tahun penelitian.

Subyek dari penelitian ini adalah para ibu rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha, yang menghasilkan dan mampu memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarganya. Sehingga tidak semua perempuan yang menjadi subyek dari penelitian ini. Jikapun semua perempuan tidak terkecuali yang akan menjadi subyek dari penelitian yang sama, dapat jadi menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Tetapi penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal guna penelitian selanjutnya dengan topik yang tidak jauh berbeda.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga formal dan lembaga informal. Lembaga formal yang dimaksud adalah seperti perbankan, BPR, pegadaian maupun keperasi yang semuanya dinaungi oleh negara dalam bentuk aturan resmi seperti undang-undang maupun peraturan menteri. Sementara lembaga informal yang dimaksud disini adalah lembaga yang belum mendapatkan naungan tertulis, seperti PNPM dan Bank Gakin. Jika ada subyek lain dari lembaga keuangan yang dimaksud tersebut, masih belum dilakukan kajian lebih lanjut, sehingga dapat dibuat penelitian lanjutan.

Kelembagaan yang diulas dalam penelitian ini adalah kelembagaan keluarga atau rumah tangga dan juga kelembagaan lembaga keuangan. Peneliti tidak sampai

melakukan pembahasan pola kelembagaan lain, seperti kelembagaan masyarakat, kelembagaan pedagang ataupun kelembagaan yang lain. Hal ini karena terkait dengan fokus penelitian yang hanya pada aspek preferensi perempuan secara individu dalam memilih lembaga keuangan, yang berimplikasi kepada keluarga atau rumah tangganya, dan juga kelembagaan lembaga keuangan yang telah memberikan kredit kepada para ibu rumah tangga tersebut.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika peningkatan pendapatan rumah tangga melalui aktivitas produktif semakin memaksa ibu rumah tangga melakukan preferensi pengambilan keputusan untuk memilih lembaga keuangan guna memenuhi modal kerja. Semakin masifnya para ibu rumah tangga menjalankan usaha informalnya, akhirnya berpengaruh terhadap pola kelembagaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan mikro di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Beberapa lembaga keuangan baik itu formal maupun non formal, menerapkan strateginya masing-masing dalam mengikat ibu-ibu rumah tangga ini. Ada yang mempermudah persyaratan kredit, tanpa mengenakan agunan, dan juga mempercepat pencairan. Hal ini didukung oleh minimnya pengetahuan atas lembaga keuangan yang ada oleh ibu rumah tangga. Sehingga tidak semuanya mendapatkan lembaga keuangan yang pas, dan akhirnya berdampak pada pendapatan mereka.

2. Bermunculannya lembaga keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga menjadi warna baru dalam sistem keuangan inklusif saat ini. Dengan pola kelembagaan yang berbeda dan lebih memiliki asas sosial yang tinggi, program seperti PNPM dan Bank Gakin menjadi yang paling diminati oleh masyarakat. Ada sebanyak 30 Bank Gakin di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan anggota lebih dari 1200 orang didalamnya, demikian juga PNPM Perkotaan yang memberikan kredit kepada lebih dari 1000 orang.

Namun atas lembaga-lembaga ini, perlu memiliki strategi pendampingan yang komprehensif dan tangguh. Hal itu karena masyarakat miskin yang mereka bina

adalah masyarakat yang rentan akan kebrangkutan dan kemiskinan. Dalam bank Gakin, pendampingan yang bersifat komprehensif itu belum nampak, dan pendampingan dengan pola memperbaiki sistem administrasi kelompok saja yang dilakukan. Sehingga banyak anggotanya yang juga keluar dari komunitas bank gakin.

3. Dari temuan yang ada, peneliti mengkategorikan perubahan pola kelembagaan yang terjadi dalam kelembagaan rumah tangga maupun kelembagaan lembaga keuangan merupakan pola yang dinamis. Dimana dalam faktanya perubahan pola itu adalah hasil penyesuaian diri atas lingkungan yang terlebih dahulu mengalami interaksi menuju kearah yang lebih baik. Jika digambarkan maka, perubahan pola kelembagaan rumah tangga mendorong perubahan pola kelembagaan pada lembaga keuangan. Dan pola kelembagaan lembaga keuangan akan mendorong terjadinya keberhasilan berwirausaha. Sedangkan keberhasilan berwirausaha akan kembali mendorong perubahan pola kelembagaan rumah tangga dan lembaga keuangan.

Terdapat bermacam-macam dinamika yang terbangun atas kredit yang diterima oleh ibu rumah tangga di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Ada yang merasa lebih baik setelah mendapatkan tambahan modal, namun juga ada yang lebih buruk pasca mendapatkan tambahan modal tersebut. Kelembagaan dari lembaga keuangan mikro yang ada sangat mempengaruhi mereka untuk menjadi untung atau merugi atau bahkan cuma impas. Sistem kredit dengan bunga besar, banyak dikeluhkan oleh ibu rumah tangga itu, meskipun pelayanannya baik seperti tanpa agunan dan pencairan secara cepat. Sedangkan pola kelembagaan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember seperti LKMM Bank Gakin masih belum dapat memberikan modal besar, dan terbatas pada orang-orang tertentu saja, bahkan masih salah sasaran.

Hal ini harus menjadikan koreksi, supaya akses kredit murah dengan sistem yang lebih baik serta kelembagaan yang kuat karena dilandasi modal sosial, dapat

dikembangkan lagi. Meskipun banyak sisi-sisi yang juga harus diperbaiki. Keluhan para ibu rumah tangga atas bunga kredit yang besar, juga harus menjadi koreksi atas sistem keuangan yang dijalankan. Apakah hal itu sesuai aturan ataukah tidak. Sehingga dari itu semua peneliti memberikan sebuah konstruksi atas temuannya.

Konstruksi model preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro sangat membantu dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kelembagaan di sektor keuangan mikro selanjutnya. Hal ini seiring dengan naiknya aktivitas rumah tangga yang didominasi oleh perempuan yang dalam hal ini ibu rumah tangga sebagai penunjang peningkatan pendapatan. Dari penelitian yang sudah dilakukan ini, ternyata menghasilkan konstruksi baru dalam preferensi ibu rumah tangga saat memilih lembaga keuangan yang tepat dalam menunjang usahanya. Konstruksi itu terbangun karena adanya beberapa faktor seperti besarnya bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap nasabahnya, karena besaran bunga itu akan berpengaruh pada besarnya angsuran dan semakin kecilnya pendapatan. Faktor kedua adalah sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Seperti mudahnya pengurusan administrasi dan juga cepatnya pencairan uang kepada nasabah. Faktor yang ketiga adalah ada tidaknya aguna yang dipersyaratkan oleh pihak lembaga keuangan kepada para calon nasabahnya. Hal ini berpengaruh karena masyarakat kecil jarang memiliki barang berharga untuk dijaminkan.

5.2 Saran

Preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro terhadap dinamika pendapatan, studi pada ekonomi rumah tangga di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember memberikan kesimpulan seperti yang diuraikan pada sub bab 5.1 tersebut. Berangkat dari kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran yang bersifat

kontradiktif, solutif dan berusaha memberikan implikasi empiris dan teoritis seperti berikut:

1. Lembaga keuangan seperti KSP, BPR dan juga bank individu harus mulai berbenah jika ingin tetap eksis. Karena dengan bunga yang besar dan agunan yang memadai, maka masyarakat utamanya kaum ibu akan mulai menghindarinya. Hal ini terlihat dari fenomena yang mulai terjadi dimana masyarakat banyak beralih ke lembaga keuangan yang lebih memberikan bunga rendah dan memiliki modal sosial tinggi untuk menghindari agunan.
2. Lembaga keuangan yang merupakan program dari pemerintah daerah Kabupaten Jember dan pemerintah pusat juga harus mendapatkan evaluasi. Sehingga semakin lama semakin membaik. Seperti halnya LKMM Bank Gakin dan PNPM, meskipun memakai sistem tanggung renteng, namun perlu dilakukan pendampingan yang lebih ketat. Hal ini untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa program produktif dapat mengentaskan kemiskinan.
3. Secara garis besar preferensi ibu rumah tangga pada lembaga keuangan mikro harus memperhatikan tiga kelembagaan yaitu kelembagaan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kelembagaan keluarga karena ibu rumah tangga adalah bagian dari kelembagaan keluarga dan kelembagaan lembaga keuangan mikro yang melahirkan sistem ekonomi inklusi. Saat ini, yang menjadi masalah adalah tumpuan masyarakat atau ibu rumah tangga atas minimnya akses terhadap lembaga keuangan. Dari dua hal itu maka harus ada transformasi individu dan kelembagaan untuk menyikapi persoalan penataan tiga kelembagaan yang ada tersebut. Minimnya akses keuangan harus diselesaikan dengan transformasi lembaga keuangan menjadi lembaga yang inklusif sehingga berdampak pada akses terhadap keuangan masyarakat menjadi terbuka. Jika akses ini terbuka dan transformasi individu serta kelembagaan terlaksana maka akan membentuk kesejahteraan rumah tangga, terciptanya pemerintah yang handal dan terjadinya sistem keuangan yang baik, inklusif dengan pelayanan prima. Ketiga unsur itu

akan saling berhubungan, yang pada akhirnya akses sistem keuangan menjadi lebih tertata dengan baik, dan banyak memberikan alternatif pilihan untuk memajukan sektor produktif.



DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal dan Goodell dan Selleck. 2013. *Lending to Women in Microfinance: Influence of Social Trust and National Culture*. Working Paper 13-17.
- Alisjahbana. 2005. *Marjinalisasi Informal Perkotaan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- _____. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Amien. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amin, N. 2005. *The Informal Sectors Role in Urban Environmental Management in International Review for Environmental Strategies Vol. 5, No. 2, pp. 511-530*.
- Anderson dan Locker dan Nugent. 2002. *Microcredit, Social Capital, and Common Pool Resources*. World Development, Volume 30, Issue 1, January 2002, Pages 95-105
- Arsyad, L. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Artini, N.W.P dan Handayani. 2009. *Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga*. Piramida, (5): 9-15.
- Asadul dan Nguyen dan Russell. 2015. *Does microfinance change informal lending in village economies? Evidence from Bangladesh*. Journal of Banking & Finance, Volume 50, January 2015, Pages 141-156.
- Bardhan, P. 1996. *Alternative Approaches to the Theory of Institutions in Economic Development*. Oxford: Clarendon Press.
- Barnum, H.N. dan L. Squire. 1978. *An Econometric Application of the Theory of the Farm-Household*. Journal of Development Economics, (6): 79-102.
- Beck dan Kunt dan Peria. 2008. *"Banking services for everyone? Barriers to bank access and use around the world"*. World Bank Economic Review 22 (No. 3, November) pp. 397-430.

- Budiman, A. 2000. *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chen, S dan Ravallion. 2008. *The developing world is poorer than we thought, but no less successful in the fight against poverty*. World Bank Policy Research Working Paper 4703.
- Dewi, M.P. 2012. *Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan pendapatan Keluarga*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 5 No. 2 Tahun 2012
- Elvina, M. 2013. *Perempuan Perlu Kemandirian Ekonomi Guna Hindari Kekerasan*. <http://antarariau.com/berita/29913/perempuan-perlu-kemandirian-ekonomi-guna-hindari-kekerasan>. [26_03_2014]
- Engel, B dan Miniard. 1994. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Erol, C. dan El-Bdour. 1989. *Attitudes, behavior, and patronage factors of bank customers toward Islamic banks*. International Banking & Marketing Vol. 7, No. 6:31-7.
- Fakih, M. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hajaroh, M. Tanpa tahun. *Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi*. Yogyakarta: Jurnal Studi Universitas Negeri Yogyakarta
- Hani dan Rachmania dan Setyaningsih dan Cahyawati. 2012. *Patterns of Indonesian Women Entrepreneurship*. Procedia Economics and Finance, Volume 4, 2012, Pages 274-285.
- Harmar. 2007. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pengembangan Kecamatan di Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah*. Yogyakarta: Tesis Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada.

- Husen, Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ihromi. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI.
- Irianto, S. 2004. *Keadilan Sosial, Apakah Juga Ditujukan bagi Perempuan dalam Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Jember, Universitas. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Joesron dan Fathorrozi. (2003). *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. (2011). *Kewirausahaan*. (edisi revisi). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kasryno, F. 1984. *Kerangka Analisa Ekonomi Pembangunan Pedesaan, Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kotler, P. 1997. *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Landreth, H dan D.C. Colander. 1994. *History of Economic Thought*. USA: Hughton Miffin Company.
- Lastuti. tanpa tahun, *Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Optimalisasi Fungsi Lembaga Keuangan Mikro dan Modal Ventura*. Bandung: Jurnal Unpad.
- Ledgerwood, J. 1999. *Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective*. Washington DC.: The World Bank.
- Lincoln, Y.S. dan Guba, E.C. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage.
- Mahardika, T. 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Mikkelsen. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manning dan Effendi dan Tadjuddin. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Mandayanti, S. 2012. *Lansia Di Sektor Informal (Studi Aktivitas Ekonomi Perempuan di Pasar Terong Kec. Bontoala Kota Makassar)*. Makasar: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Moeryadi, D. 2009. *Pemikiran Fenomenologi menurut Edmund Husserl*. Yogyakarta: Jurnal Studi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, A.A. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas*. Malang : in-TRANS Publishing dan INSPIRE Indonesia.
- Muzakir, 2010. *Kajian Persepsi Harapan Sektor Informal Terhadap Kebijakan Pemberdayaanusaha Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Unauna*. Palu: Media Litbang Sulteng.
- Nawawi, H dan Martina, 1994, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nicholson, W. 1994. *Teori Ekonomi Mikro: Prinsip dan Pengembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- North, D.C. 1990. Institutions and Transaction-cost Theory of Exchange. Dalam James E. Alt and Kenneth A. Shepsle. *Perspectives on Positive Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Okten dan Osili. 2004. *Social Networks and Credit Access in Indonesia*. World Development, Volume 32, Issue 7, July 2004, Pages 1225-1246.
- Pejovich, S. 1995. *Economic Analysis of Institutions and Systems*. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. The Netherlands.
- Prasad, B.C. (2003). *Institutional Economics and Economic Development: The Theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and the Environment*. International Journal of Social Economics. Vol. 30, No. 6: 741-762.

- Primahendra. (2001). *Strategi dan Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan LKM*. Jakarta: Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan dan Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro.
- Rachbini, D.J. dan A. Hamid. (1994). *Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta: LP3ES
- Rasuanto, B. 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rawls, J. 2006. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rintuh, C dan Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPFE.
- Rosmiati, M. 2012. *Perilaku Ekonomi Rumah tangga Pada Pasar Kredit Perdesaan*. Jurnal Ikopin edisi 30 tahun berdirinya Ikopin, halaman 129-138.
- Rutherford, M. 1994. *Institutions in Economic: The Old and the New Institutionalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Samuelson, P.A. 1994. *Ekonomi, Edisi ke dua belas*. Terjemahan A. Jaka Wasana M. Jakarta: Erlangga.
- Santosa, P.B. 2010. *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik Dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan Dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Scott, J.C. 2004. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Sebstad, N. 1999. *Assesing the impacts of micoenterprise intervensions (a framework for analysis)*. Buletin Internasional PLAN, No. 9, Oktober.
- Sethuraman, S.V. 1985. *Sektor Informal di Negara Berkembang*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Sihotang, M. 2011. *Kontribusi Istri Bekerja Dalam Menambah Pendapatan Keluarga Dan Motivasi Bekerja (Studi Kasus: Pegawai Administrasi Universitas HKBP Nommensen*. Medan: Tesis Managemen SDM Universitas Sumatera Utara.
- Simamora, B. 2002. *Panduan Reset Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Smith, J.A. 2009. *Psikologi Kualitatif* (Panduan praktis metode riset). Terjemahan dari *Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soewartoyo, 2010. *Pekerja Sektor Informal : Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Sookram, S and Patrick K.W. 2008. "Small-Business Participation in The Informal Sector of an Emerging Economy". in *Journal of Development Studies Vol. 44 No. 10* November 2008. pp. 1531-1553.
- Subarsono. 1996. *Toward Managing the In-formal Sector for Urban Economic Development: Government Policy and the Informal Sector*. Thesis, the Flinder University of South Australia, Adelaide.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno dan Damayanti. 2012. *Bank Gakin: Telaah Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Di Jember*. Jember: Prosiding Seminar & Konferensi Nasional Manajemen Bisnis, 26 Mei 2012.
- Sukirno, S. 2005. *Mikro Ekonomi*. Jakarta :PT Raja Grafindo
- Sulaksono, G. 2012. *Kemandirian Ekonomi Perempuan*. <http://gagasan.hukum.wordpress.com/2012/03/01/kemandirian-ekonomi-perempuan>. [26-03-2014].
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Modul- Modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sunartiningsih, A. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Syaifullah, Y. 2013. *Microfinance Analisis Dan Teori*. Malang: Bayu Media.
- Tini. 2008. *Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pada Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Todaro, M.P. dan Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

- Togba, E.L. 2012. *Microfinance and households access to credit: Evidence from Côte d'Ivoire*. Structural Change and Economic Dynamics, Volume 23, Issue 4, December 2012, Pages 473-486.
- Trimelia. 2011. *Peran Perempuan dalam Pemanfaatan Modal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPB Mandiri Perdesaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kelompok Asolihin Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)*. Jember: Universitas Jember.
- Vant, A. 2006. *Institutions*. Departement of Economics and Resource Management Norwegian University of life Sciences. http://www.ecoeco.org/pdf/Institutions_Arild_Vant.pdf [23 Maret 2014].
- Varian, H.R. 2010. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*. New York. London: W. W. Norton & Company.
- Yeager, T.J. 1999. *Institutions, Transition Economies, and Economic Development*. The Political Economy of Global Interdependency. Oxford: Westview Press.
- Yustika, A.E. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2006. *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, & Strategi*. Malang: Bayu Media.
- Wardoyo dan Prabowo, H. 2006. *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah Jabodetabek*. Paper. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Widodo, T. 2005. *Sektor Informal Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP).
- Wijesiri dan Viganò dan Meoli. 2015. *Efficiency of microfinance institutions in Sri Lanka: a two-stage double bootstrap DEA approach*. Economic Modelling Volume 47, June 2014, Pages 74–83.
- Wijono, W.W. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan. Edisi Khusus Desember, pp: 735-751.
- Zamroni, 2004. *Kelembagaan dan Kebocoran Ekonomi di Indonesia: Suatu Tinjauan Ekonomi Makro*. [http://www.katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/download.DatabyId/6080/6081.pdf](http://www.katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/download/DatabyId/6080/6081.pdf). [23 Maret 2014].

Zubaidi dan Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Edisi Pertama). Yogyakarta: Paradigma.



LAMPIRAN A. Contoh Cuplikan Hasil Wawancara Dengan Informan

1. Wawancara dengan informan berinisial SR berusia 59 tahun dan berprofesi sebagai penjual nasi.

Peneliti :Bu, kok barusan ada mas-mas bawa buku tebal. Mirip depkolektor tadi siapa bu?

Informan :Biasa cong, pegawai bank thitil tadi itu. Pas gak punya uang kemarin itu mas, akhirnya pinjam buat nambahi modal.Ya ikut di abang yang mingguan itu mas, gak tau aku cong bang apa, pokoknya abang kesini, kasih pinjem wes. Ada juga itu, yang 1 kelompok 5 orang, ya itu aku ikut juga PNPM, tapi sekarang sudah habis, trus katanya tunggu 4 bulan lagi mau cair mungkin 2 jutaan ini, dan setorannya ringan itu, bunganya juga kecil. Kalo yang di PNPM bayarnya di kelurahan, ada ketuanya, ketuanya ketat itu, waktunya bayar ya harus bayar gitu, biar cepet lunas, gak nunggu-nunggu. Kalo gitu kan gak ada yang molor-molor cong, ada ketuanya. Tapi butuhnya pas sekarang, jadi pinjam dulu ke bank harian.

Peneliti :Sejak kapan bu, kenal sama bank harian gini ini. Gimana terus bayarnya untuk ngelunasinya?

Informan :Barusan kok, kalo dulu-dulu ga pernah ikut, saya dipaksa kok mas.Kalo PNPM udah lama itu mas, dari awal PNPM.Sekitar 5 tahun yang lalu. Bank kayak gini ini mahal mas bayarnya. Pinjemnya 100 ribu, nanti bayarnya setiap minggu 13ribu ke abangnya.Sampe 10minggu.

Peneliti :Lawong ngerti mahal, kenapa kok masih ngambil to bu?

Informan :Gak ada lagi cong, kamu mau ngutang ta...

Peneliti :Hehe ... gak pingin nyari pinjaman yang bunganya rendah ta bu?

Informan :Ya pingin... kalo ada ya yang bunganya rendah, yang cicilannya ringan. Biar gak rugi usahanya.

dan seterusnya

2. Wawancara dengan informan berinisial YY berusia 41 tahun dan berprofesi sebagai penjual nasi.

Peneliti :Gak pernah nyoba cari modal untuk ngembangkan warungnya ta mbak?

Informan :Pernah pinjam di PNPM, kalau ngak 3 kali yan 4 kali untuk modal awal. Tapi saya sudah berhenti sekarang. Banyak saya ditawari

bank harian dek, memang kita cepat terima, tapi bunganya besar, abot ibuk. Apalagi saya dari dulu ya biasanya hanya berjualan gorengan, mau usaha yang lain tidak kuat dengan modalnya. Apalagi mencari tempatnya juga sudah tidak gampang sekarang ini. Kalau berjualan kayak gini kan hanya berat di depan saja, selanjutnya tidak membutuhkan modal besar, karena hanya untuk belanja bahan gorengan saja.

Peneliti :Emange sehari ngeluarkan modal berapa sekarang untuk jualan mbak?

Informan :Sekitar 100 ribu sampai 150 ribu dek. Untuk beli tahu, tempe, tepung, minyak, LPG sama beberapa yang lain.

Peneliti :Dulu sebelum jualan gini, kerja apa sampean mbak?

Informan :Ya dirumah saja, paling nyuci. Adek-adek mahasiswa itu biasanya minta dicucikan. Kalau ke laundry kan agak mahal dek, enak dicuci kesaya.

Peneliti :Berhenti sekarang nyucinya mbak?

Informan :Iya dek, capek. Enakan jualan gini. Sehari bisa untung 30 ribu sampai 50 ribu kalo rame.

dan seterusnya.....

3. Wawancara dengan informan berinisial JK berusia 39 tahun dan berprofesi sebagai penjual es buah.

Peneliti :Mengapa pinjem di BRI mbak, bukan bank lain?

Informan :Kalau di BRI bunganya rendah mas.

Peneliti :Emangnya sudah pernah tahu bunga di bank lain ta mbak..?

Informan :Hutangku ndik mana-mana lo mas, gak hanya di BRI. Di pegadaian juga berhutang. Sekarang pegadaian juga buka layanan kredit tanggung renteng. Kalo dulu malah ndak perlu agunan. Tapi sekarang katanya sudah diberlakukan agunan lagi karena banyak yang gak bayar. Dulu cukup mbentuk kelompok mas, 5 orang kalo di pegadaian dan PNPM sistemnya sama mas, yaitu dilakukan secara tanggung renteng dengan 5 anggota setiap kelompok. Semisal mendapat pinjaman 3 juta, maka dibagi 600 ribu setiap anggotanya. Nanti sistem pengembaliannya dilakukan secara tanggung renteng, sehingga jika ada satu yang tidak membayar akan menjadi tanggung jawab dari anggota lainnya, dan pembayarannya dilakukan di kantor kelurahan. Sedangkan yang di BRI kita menggunakan agunan BPKB motor, disana saya ngambil pinjaman 2 juta.

Peneliti :Buat apa saja itu mbak?

Informan :Buat nambah modal mas.

- Peneliti :Enak mana to mbak, ikut BRI atau PNPM atau Pegadaian?
Informan :Enak ikut yang bunganya murah mas.
Peneliti :Kalau di PNPM ama Pegadaian apa didampingi sama petugasnya mbak?
Informan :Yang penting punya usaha mas. Kan memang tujuannya untuk mengembangkan usaha.
Peneliti :Kalau dulu awal buka warung es ini, modalnya dari mana mbak. Apa pake modal pribadi atau nambah modal dari pinjaman kayak gini?
Informan :Awalnya dimodali suami, tapi supaya berkembang akhirnya pinjem buat beli alat-alatnya ini mas.

dan seterusnya.....

4. Wawancara dengan informan berinisial JK berusia 39 tahun dan berprofesi sebagai penjual nasi.

- Peneliti :Kenapa kok milih minjem di KSP ama Adira mbak?
Informan :Taunya hanya itu mas. Terpaksa pisan, minjem ke KSP dan Bank Adira, semenjak maskumasuk dipenjara. Cara mengembalikannya yang di KSP satu minggu sekali dan jumlah uang yang dipinjam sedikit mas berkisar 100 ribu saja. Tetapi yang di Adira setornya setiap bulan. Apabila telat bayar, didenda 9 ribu perhari.Kalau dihitung bunganya di KSP memang sangat tinggi mas, jika berhutang 100 ribu, bayarnya sebesar 13 ribu selama sepuluh kali pembayaran atau sepuluh minggu. Tapi bagaimana lagi, kenalan kita cuma itu mas, mau pinjam ke BRI tidak punya jaminan. BPKB motor sudah dibuat hutang di Adira.
Peneliti :Untungnya sampean punya usaha mbak. Kalau gak punya gimana terus mbak.
Informan :Kalau tidak punya usaha ya mending gak punya utang di bank mas. Setiap hari jadi pikiran. Tapi kalau ada tempat usaha, dan perlu modal ya harus ambil uang di bank. Kalau untuk usaha pasti lebih menguntungkan uang itu, dan mendapatkan hasil yang lebih.

dan seterusnya.....

5. Wawancara dengan informan berinisial PT berusia 37 tahun dan berprofesi sebagai penjual kopi dan sayur.

- Peneliti :Sekarang jualan sayur juga buk. Cepet kaya ini...
Informan :Oalah mas, duit pinjaman wae. Biar tetangga gak jauh-jauh nyari sayur sama kebutuhan makan.

- Peneliti :Emange ngutang kemana lagi to bu, kok yang diomongkan utang terus?
- Informan :Itu tadi, yang nagih baru pergi. Saya pinjem di KSP semenjak awal usaha karena pihak bank agak memaksa dan syaratnya tidak terlalu susah. Kalau pinjem 100 ribu dipotong 10 ribu, jadi dapatnya 90 ribu. Terus bayarnya 130 ribu selama 10 kali, atau 13 ribu setiap kali angsuran. Ga tau nama koperasinya. Pokok ditawarkan orangnya yang kesini maksa, awalnya aku takut mau utang-utang terus dia bilang buat ampir-ampiran, dan syaratnya cuma fotocopy KTP.
- Peneliti :Emang bapak gak ngasi modal ta buk?
- Informan :Oalah mas, lawong bapak wae kok mikir ngasi modal.
- Peneliti :Trus kalo ditinggal usaha gini, komentarnya bapak gimana bu?
- Informan :Buktinya dengan usaha ini, tambah bisa beli-beli kebutuhan rumah tangga lo mas. Kan yo tambah enak...
- Peneliti :Berapa sih buk untungnya kayak gini ini?
- Informan :Ya namanya orang jualan, kalau sumur kan ada pasang surutnya. Ya lumayan wong cuma jualan kopi ama gorengan. Kadang ga sampe 50 ribu perhari. Nambah jualan sayur itu masih belum kembali modal.

dan seterusnya.....

6. Wawancara dengan informan berinisial NR berusia 37 tahun dan berprofesi sebagai penjual Nasi.

- Peneliti :Masenjenengan kok gak kelihatan sekarang kerja ndik mana mbak?
- Informan :Ikutndik bangunan mas. Sekarang garap rumah di Taman Gading.
- Peneliti :Kok gak ngembangne warung aja to mbak.
- Informan :Warung cukup aku lah mas. Sebelum dapet mase juga wes tak urus sendiri. Biar seperti ini wae gak apa-apa. Yang penting lancar.
- Peneliti :Emange gak kenal bank, sing bisa ngasi bunga rendah untuk ngembangkan usaha ta mbak.
- Informan :Sudah banyak utangnya mas, saya selalu meminjam uang ke BRI mas, karena sudah 5 tahun saya melakukan pinjaman dan dipermudah oleh BRI. Awalnya saya diberi pinjaman 2 juta, meningkat menjadi 3 juta, terus 5 juta dan sekarang sudah bisa dipinjami 10 juta. Saya sudah percaya sama BRI mas,” ungkapnya.Setiap bulan saya membayar 937 ribu mas. Kalau saya sendiri harus membayar segitu ya sebenarnya gak kuat, tetapi uang pinjaman dari BRI itu saya pakai dengan adik saya yang berjualan lalapan di depan rumah sakit DKT. Saya memakai 5 juta adik saya memakai 5 juta, sehingga kita kuat membayarnya”.
- Peneliti :La kok sampai banyak gitu hutangnya mbak?

Informan :Iya mas.
Peneliti :Waktu ndirikan dulu apa juga sudah ngutang mbak?
Informan :Awalnya hanya punya uang sedikit, terus ada tetangga yang berhutang di bank harian, akhirnya saya ikut untuk nambahi modal saya. Sejak itulah saya punya warung kecil-kecilan ini. Kalau sekarang saya ngutangnya gak lagi ke bank harian, tapi karena butuh modal yang besar supaya bisa memperbaiki warung, saya pinjam ke BRI.

dan seterusnya.....

7. Wawancara dengan informan berinisial EL berusia 35 tahun dan berprofesi sebagai penjual LPG.

Peneliti :Jualan apa saja sampean mbak?

Informan :Selain menjual LPG ke rumah-rumah warga, saya juga menyuplai beberapa jenis lauk makanan jadi yang dijual di beberapa outlet dipinggir jalan mas. Ada 4 outlet yang saya setori, yaitu di jalan Karimata, Kalimantan, KH Sidiq dan di Kreongan. Saya mulai tidur setelah belanja di pasar tanjung jam 23.00 wib, selanjutnya jam 2.00 wib saya sudah bangun untuk membuat beberapa sayuran dan lauk yang akan di suplai ke outlet lauk makanan tersebut.

Peneliti :Sebelum ikut Bank Gakin apa pernah minjem modal di bank lain juga?

Informan :Kalau dulu setiap waktu harus mengangsur ke bank harian (KSP) itu mas, karena kita hutangnya kesitu. Tetapi kalau sekarang kita sudah ikut Bank Gakin, sehingga tidak lagi ikut bank harian. Ngenes kalau ikut bank harian mas, setiap saat ditagih kerumah, bunganya besar pula. Kalau Bank Gakin ini kita dikenai jasa 5 % dalam 10 pekan, tetapi uang 5 % dari pinjaman itu akan dialokasikan untuk kegiatan kemasyarakatan, termasuk untuk biaya pendidikan.

Peneliti :Emange masnya kerja ndik mana to mbak, kok kayak hidup sendiri saja?

Informan :Kalau suami saya kerjanya sebagai sopir truk mas, sehingga kadang-kadang mendapat uang, kadang-kadang juga pulang dengan tangan kosong. Makanya saya memberanikan diri untuk ikut berusaha mencari uang juga dengan jualan LPG ini. Kalau sekarang penghasilan saya lebih banyak jika dibandingkan dengan suami,” tuturnya.

Peneliti :Enakkan mana dulu dengan sekarang?

Informan :Kalau dibandingkan dengan dulu saat ikut bank harian ya enak sekarang mas. Kalau di bank harian saya harus membayar 130 ribu atas pinjaman saya yang hanya 100 ribu dan dicairkan hanya 80

ribu. Berarti ada penambahan 50 ribu mas dalam 10 minggu. Bagi kaum ibu yang usaha kecil-kecilan begini ini ya keberatan dengan itu. Kalau sekarang dengan bunga kecil di bank gakin ini kita lebih bisa mendapatkan untukng yang lebih besar.

dan seterusnya.....

8. Wawancara dengan informan berinisial NWS berusia 50 tahun dan berprofesi sebagai penjahit dan ketua Bank Gakin

Peneliti :Sejarahndirikan Bank Gakin ini kayak apa sih bu?

Informan :Awalnya Dinkop mencari 50 orang. Yang dicari memang masyarakat yang bisa dipercaya.

Peneliti :Diajari apa saja setelah masuk di Bank Gakin buk?

Informan :Ya banyak mas, kalau kita punya ide apa saja tentang wirausaha bisa kita aspirasikan. Nanti dinas yang akan merealisasikan. Hampir setiap bulan ada pelatihan untuk menyusun pembukuan usaha dan pembukuan Bank Gakin. Bank Gakin ini sudah menjadi kebutuhan, daripada mereka pinjam ke bank harian. Bahkan sempet ada rentenir yang mencoba memanfaatkan Bank Gakin. Ia meminjam uang dari Bank Gakin dalam jumlah besar. Bukan untuk modal usaha, tapi untuk dikembangkan. Kita tahu, dan kita tidak pinjami.

Peneliti :Kalo bank gakin itu polanya gimana buk?

Informan :Pola kelembagaan Bank Gakin sebenarnya mirip dengan koperasi. Disitu ada simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan pokok Bank Gakin ditetapkan sebesar 50 ribu setiap anggota, simpanan ini bisa diambil lagi jika yang bersangkutan keluar dari Bank Gakin. Sementara simpanan wajib di tetapkan sebesar 10 ribu setiap anggota meminjam uang dari Bank Gakin. Sedangkan simpanan sukarela terbagi menjadi dua, yaitu simpanan pendidikan yang setiap saat bisa di ambil, dan simpanan hari raya yang hanya bisa diambil sebelum hari raya Idul Fitri saja. Proses pinjaman di Bank Gakin dilakukan dengan sistem tanggung renteng sesama anggota pokmas.

Peneliti :Motivasinya masuk Bank Gakin dulunya apa bu?

Informan :Gimana lagi dek, kalau dulu ada suami bebannya masih ringan, saya hanya melatih senam para manula saja. Sekarang suami sudah tidak ada, ya semua kebutuhan saya dan anak-anak saya yang harus mencarikan sendiri. Tetapi saya semangat saja menjalaninya, sambil dibuat hiburan

Peneliti :Kalau suka dukanya menjadi ketua di Bank Gakin apa?

Informan :Harus sabar dek, menghadapi orang susah. Dulu ada juga anggota kita yang rumahnya di belakang kantor kelurahan Kebonsari itu,

namanya mbak YN. Dia jualan pracangan sayur. Mendapat pinjaman dari kelompok sebesar 300 ribu. Selang beberapa waktu dibuat modal, hasilnya sama modalnya di curi orang. Dia datang kesini nangis-nangis. Ya akhirnya macet hingga sekarang, dan orangnya berhenti dari Bank Gakin

dan seterusnya.....

9. Wawancara dengan informan berinisial NB berusia 26 tahun dan berprofesi sebagai penjual nasi

Peneliti :Kenapa memilih bank thitil mbak?

Informan :Saya ngambil uang di bank harian buat modal awal buka usaha.Mahal sih mas, tapi butuh, pinjam ke tetangga gak ada, makanya minjam bank.Kalau gak dapat pinjaman malah saya tidak bisa usaha.Tapi semua itu saya masih menjangkau jumlah angsurannya.

Peneliti :Kenapa pinjem di bank harian mbak, kan sudah tahu lakau bunganya mahal. Kok gak milih bank lain?

Informan :Mudah mas, gak pakek syarat yang rumit. Cuma KTP saja diperlihatkan. Lagian tahunya Cuma itu mas. Mau ngambil di bank yang besar gak punya jaminannya.

Peneliti :Gak dimodalin ama masnya ta mbak?

Informan :Ya, namanya keluarga mas. Kalau suami sepi kerjaan gimana lagi. Saling melengkapi saja sudah bagus. Yang penting bisa nyekolahkan anak.

Peneliti :Gak pernah ikut simpan pinjam programnya pemerintah ta mbak? Kan enak itu mbak, dibantu sama pemerintah.

Informan :Gak pernah tahu mas. Gak pernah ada yang nawarin ke saya. Kalo ada yang nawarin ya mau saja kalau lebih murah dan gak pakai jaminan.

dan seterusnya.....

10. Wawancara dengan informan berinisial WR berusia 40 tahun dan berprofesi sebagai tukang jahit

Peneliti :Sejak kapan ikut bank Gakin bu?

Informan :5 tahun lalu mas. Diajak sama bu NWS untuk ikut, biar bisa kerja lagi kayak dulu.

Peneliti :Memangnya kenapa kok dulu sempat gak kerja bu?

Informan :Njagain penghasilan suami mas. Apalagi habis anak sakit, akhirnya modal untuk menjahit gak ada lagi. Mau ngutang saudara juga

- sudah gak dipercaya. Banyak hutang buat ngobatin anak. Maklum mas, suami hanya pekerja serabutan.
- Peneliti :Gak pernah hutang di bank atau koperasi, buat nyari modal lagi ta bu?
- Informan :Dulu masih ramai jahitan pernah pinjem di koperasi. Di bank thitil itu mas. Tapi setelah itu gak pinjem lagi. Sudah kapok, bunganya besar. Banyak di marahin juga ama suami.
- Peneliti :Kalo dibandingkan dengan sekarang njenengan di Bank Gakin enak mana bu?
- Informan :Enak ikut Bank Gakin mas, kita memiliki kelompok-kelompok yang anggotanya 5 orang. Dari kelompok itu, semisal kita mendapat pinjaman 1 juta, hanya dipungut simpanan wajib 50 ribu (10 ribu per anggota), dan jasa administrasi penarikan 20 ribu. Sedangkan bunga atas pinjamannya sebesar 5 % atau seribu per pekan. Sehingga mengangsurnya perpekannya 22 ribu tiap anggota. Atau per anggota harus mengembalikan 220 ribu selama 10 pekan. Lebih murah mas. Juga lebih enak, soalnya banyak temen bisa berbagi. Petugasnya juga teman kita sendiri.
- Peneliti :Bapak gak marah lagi, njenengan pinjem uang lagi?
- Informan :Sekarang siapa yang dapat uang mas. Semuanya untuk keperluan anak. Gak peduli wes, sing penting bisa usaha lagi.
dan seterusnya.....

11. Wawancara dengan informan berinisial RK berusia 25 tahun dan berprofesi sebagai Marketing KSP Makmur Jaya

- Peneliti :Bagaimana cara anda mencari nasabah?
- Informan :Ya tawar menawar, sama kayak sales gitu. Kalau kayak gini kancuma bawa uang, tawarin siapa yang mau ngambil.
- Peneliti :Seandainya pinjemnya 100 ribu berapa terus kembalinya?
- Informan :Misalnya pinjemnya 100 ribu kembalinya 130 ribu. Soale bunga dari kantor 30%.
- Peneliti :Kalau yang ambil 1 juta gmna mas? Apa ada potongan atau sama?
- Informan :Sama, cuman dalam 10 minggu harus lunas, minimal 2 bulan setengah.
- Peneliti :Apakah itu untuk yang punya usaha saja?
- Informan :Enggak, kalau punya usaha tinggal ngajukan berapa pinjamannya. Kalau memang butuh besar, minggu depan baru bisa cair, soale kan diajukan dulu.
- Peneliti :Setiap hari nagih plus masarkan gini ya mas?
- Informan :Ya setiap hari di daerah sini mas, kalo kantor saya di Mangli dekat lampu merah perempatan Mangli. Kita nawarkan kredit kecil-kecilan saja, kalau ada tempat usahanya gini ini, bisa kita pinjami

sampai 1 juta, tetapi kalau tidak ada tempat usahanya ya hanya ratusan ribu saja. Pembayarannya seminggu sekali, sampai 10 kali angsuran.

dan seterusnya.....

12. Wawancara dengan informan berinisial DN berusia 31 tahun dan berprofesi sebagai Marketing BTPN Mikro

Peneliti : Tetep kerasan ndik BTPN ta mas? Gimana sekarang perkembangannya?

Informan : Kalau sekarang tambah sulit. Produk yang awal dulu itu, yang tanpa agunan banyak yang macet.

Peneliti : Emang gak di mentaince ta, kok tambah macet?

Informan : Ya gak kurang-kurang. Jamanmu dulu kan masih enak, yang mau bayar kekantor. Sekarang kita yang jemput. Malah pimpinan yang Jember baru di pecat. Soale NPL tinggi.

Peneliti : Dijemput gimana to mas?

Informan : Kalau sistem yang lama, setiap peminjam diharuskan untuk mengembalikan atau mengangsur kreditnya ke kantor bank yang dipinjami. Hal ini akan memakan waktu, apalagi jika mereka adalah pada wirausahawan yang setiap saat harus melayani pembeli. Sehingga inovasi pelayanan dari setiap microfinance dilakukan salah satunya seperti yang dilakukan oleh BTPN dengan menggunakan kasir pick up.

dan seterusnya.....

13. Wawancara dengan informan berinisial SG berusia 33 tahun dan berprofesi sebagai Marketing PNM

Peneliti : Gimana pola pemasaran jasa kredit di PNM mas?

Informan : Kalau polanya setiap bank pasti sama. Namanya produk jasa kalau gak ditawarkan gak akan ada yang tahu. Kecuali BRI kan memang sudah sejak lama nangani kredit pertanian.

Peneliti : Kan PNM milik pemerintah juga. Apa yang membedakan sistemnya dengan BRI?

Informan : Kalau sistemnya sama. Cuma kalah nama saja. Dari persoalan bunga juga sama. Rata-rata satu persen perbulan untuk kredit produktif. Malah sekarang PNM banyak digunakan oleh koperasi untuk menjadi sumber permodalannya.

Peneliti : Sama apa enggak dengan BTPN ada yang menagih kerumah-rumah nasabah?

Informan : Sama saja. Itu bagian dari pendampingan. Selain mereka meminjam kan ada produk pelatihan usaha. Bagi yang berminat bisa ikut seperti usaha jualan token listrik, pulsa dll. Petugas keliling selain mengingatkan jatuh tempo pembayaran juga mendampingi usaha mereka. Nantinya dikategorisasi, masuk usaha yang menguntungkan atau tidak. Sehingga jika mengambil lagi bisa nilainya bertambah atau tetap atau menurun.

dan seterusnya.....





Aktivitas bu PT sebagai penjual gorengan di Bukit Tidar Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari. PT merupakan nasabah KSP dan berhasil mengembangkan usahanya dari pinjam di lembaga keuangan itu.



SR saat diwawancarai peneliti. SR merupakan penjual pecel di Jalan Kalimantan Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari. SR merupakan nasabah PNPM simpan pinjam di Kelurahan Sumbersari.